

Keluar dari Kemelut

50 Tahun Lembaga Dakwah Islam Indonesia



Agidia Oktavia • Husni Mubarak • Ihsan Ali-Fauzi • Imelda Putri
Raditya Darningtyas • Siswo Mulyartono • Siti Nurhayati

Penyunting: Ihsan Ali-Fauzi

Keluar dari Kemelut

50 Tahun Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Agidia Oktavia • Husni Mubarak • Ihsan Ali-Fauzi • Imelda Putri
Raditya Darningtyas • Siswo Mulyartono • Siti Nurhayati

Penyunting: Ihsan Ali-Fauzi

**Keluar dari Kemelut:
50 tahun Lembaga Dakwah Islam Indonesia**

Penulis:

Agidia Oktavia, Husni Mubarak, Ihsan Ali-Fauzi, Imelda Putri
Raditya Darningtyas, Siswo Mulyartono, Siti Nurhayati

Penyunting:

Ihsan Ali-Fauzi

Tata Letak:

Muhammad Agung Saputro

Tahun terbit:

November 2023

Penerbit

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD),
Yayasan Wakaf Paramadina

Alamat Penerbit:

Bona Indah Plaza Blok A2 No. B11,
JL. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus,
Cilandak Jakarta Selatan 12440.
Telp. (0815-11666-075)

ISBN 978-623-88282-2-7

Daftar Isi

Kata Pengantar PUSAD Paramadina.....vii

Bagian I

Konteks Umum, Pendekatan dan Temuan Riset

Bab 1

Keluar dari Kemelut: 50 Tahun Lembaga Dakwah Islam
Indonesia *oleh Ihsan Ali-Fauzi* 3

Bagian II

Laporan dari Lima Wilayah LDII

Bab 2

Pesantren Wali Barokah dan Lembaga Dakwah
Islam Indonesia di Kota Kediri, Jawa Timur
oleh Husni Mubarak 33

Bab 3

Jatuh-Bangun LDII di Kota Tarakan, Kalimantan Utara
oleh Siswo Mulyartono 63

Bab 4

Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Surakarta,
Jawa Tengah
oleh Raditya Darningtyas & Agidia Oktavia 79

Bab 5

LDII di Banda Aceh: Berdakwah di Daerah Istimewa
Serambi Mekkah
oleh Siti Nurhayati 101

Bab 6

LDII di Provinsi Bali: Minoritas di tengah

Kelompok Minoritas

oleh Ihsan Ali-Fauzi & Imelda Putri 121

Tentang Penulis 151

Kata Pengantar PUSAD Paramadina

Buku ini bermula dari riset kecil untuk lebih memahami 50 tahun perjalanan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Gagasannya muncul dari perbincangan kami (PUSAD Paramadina) dengan seorang aktivis LDII yang biasa kami undang terlibat dalam banyak kegiatan kami. Begitu kami tahu LDII pada 2022 memasuki umur 50 tahun, usia yang cukup matang untuk sebuah organisasi, kami ingin mendalami bagaimana dan mengapa organisasi ini belakangan makin diterima baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia.

Bagi kami, pertanyaan di atas adalah pertanyaan penting, karena kita semua menyadari bahwa keberadaan LDII selama ini cukup kontroversial karena kaitannya dengan organisasi Islam Jama'ah yang sempat dilarang pemerintah dan dicurigai, bahkan dimusuhi, oleh organisasi-organisasi massa (ormas) Islam lain. Inilah awal keingintahuan yang mendorong riset akademis ini. Karenanya, kami mengerangkakan pengalaman yang ingin kami pelajari dari LDII di atas sebagai pengalaman “keluar dari kemelut”, yang kami ambil sebagai judul buku ini.

Namun tujuan riset ini bukan hanya akademis, tetapi juga praktis. Kami ingin mendorong agar kita belajar dari pengalaman baik seperti ditunjukkan LDII di atas, bukan saja belajar dari pengalaman buruk. Pengalaman baik itu perlu dipelajari sungguh-sungguh, agar kita tahu bagaimana hal itu dicapai dan apa saja kerja-kerja sosial (dan politik) yang perlu dilakukan untuk mencapainya.

Dalam melakukan riset ini, perspektif yang kami gunakan adalah perspektif yang ingin memajukan demokrasi dan binadamai. Karenanya, kami tidak mempersoalkan substansi ajaran Islam yang dikembangkan LDII, atau lembaga apa pun selainnya, tetapi kami peduli pada bagaimana ajaran itu disampaikan dan apa akibatnya terhadap kerukunan atau ketertiban umum. Semuanya ini sangat

penting bagi penguatan demokrasi, yang menghargai kebebasan warga negara untuk menganut dan menjalankan agama atau kepercayaan yang diyakininya.

Dalam demokrasi, ketegangan atau konflik yang mungkin terjadi karena perbedaan agama (atau keyakinan) tidak ditumpas secara semena-mena, melainkan dikelola dengan baik dan penuh perdamaian, yakni dalam cara-cara yang tetap menghormati agama (dan keyakinan) masing-masing. Inilah yang sering kita dengar sebagai pluralisme, di mana perbedaan saling ditoleransi dan bahkan hikmah bisa diambil atau dicontoh dari kebaikan yang ada pada pihak lain. Dalam studi-studi perdamaian, proses-proses inilah yang sering disebut sebagai proses-proses binadamai (*peacebuilding*).

Kami menyimpulkan bahwa keberhasilan relatif LDII “keluar dari kemelut” disebabkan tiga faktor utama. Kami sebut relatif karena prosesnya sangat dinamis dan tergantung dari satu ke lain konteks. Ketiga faktor itu kami sebutkan secara ringkas sebagai berikut.

Pertama, sejak dimulainya periode Reformasi dan berakhirnya rezim Orde Baru, mereka tidak lagi mengandalkan perlindungan pemerintah (atau kekuatan lain) untuk menjamin hak mereka untuk hidup dan berkembang di Indonesia, berbeda dari pengalaman mereka selama Orde Baru. Karena faktor ini, mereka relatif terbebas dari kecurigaan sebagai “kaki tangan” pemerintah, terutama Golongan Karya (Golkar), yang menjadi salah satu mesin kekuasaan pada masa itu. Khususnya pada dekade 1970-an dan 1980-an, kecurigaan ini memainkan peran penting dalam penolakan terhadap mereka oleh ormas-ormas Islam, yang memiliki hubungan yang tidak sehat atau malah saling mencurigai dengan penguasa kala itu.

Kedua, pada saat yang sama, para pengurus dan warga LDII secara sadar mulai menjalin hubungan, dialog, dan kerja sama yang baik dengan pihak-pihak lain, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi lainnya. Mereka mulai rajin melakukan apa yang sering mereka sebut dalam percakapan sehari-hari sebagai “silaturahmi”, mengembangkan “budi luhur”, dan menjalankan dakwah yang sejuk dan tidak menyalahkan orang (*green* dakwah). Dengan kata lain, mereka mulai rajin melakukan proses-proses yang dalam perspektif binadamai disebut “membangun jembatan” (*bridging*) dengan pihak-pihak lain. Dalam semua proses ini, dukungan mereka kepada negara sangat jelas dan menonjol, bahkan kepada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

Ketiga, terkait dengan butir pertama dan kedua di atas, para pengurus LDII secara sadar membangun soliditas organisasi, sehingga keutuhannya terjaga dengan rapi dan tanpa riak berarti, dan kaderisasi berjalan dengan jenjang yang jelas dan dijalankan dengan penuh disiplin. Dengan ikatan internal yang kokoh (*bonding*) dan disiplin ke dalam (*internal policing*) yang kuat, para pengurus LDII relatif berhasil menjalkankan kedua agenda pertama di atas. Beberapa kalangan akan menyebut proses-proses internal seperti ini sebagai sesuatu yang tertutup, tetapi bukankah hal itu juga berlangsung pada semua organisasi, ketika keputusan-keputusan tertentu sebaiknya diambil dan dijalankan oleh hanya kalangan terbatas tertentu saja?

Buku ini terdiri dari dua bagian. Pada bagian pertama, yang terdiri dari hanya satu bab, kami menampilkan garis besar latar belakang, proses, dan temuan-temuan pokok riset ini. Di sini, yang menjadi sumber data adalah LDII di tingkat nasional dalam 50 tahun usianya. Namun demikian, beberapa temuan dari LDII di tingkat lokal juga akan dimasukkan pada bab ini, sekadar untuk memberi ilustrasi dari daerah mengenai variasi dinamika LDII di tingkat lokal sejauh ini.

Sementara itu, bagian kedua buku ini terdiri dari lima bab, yang masing-masingnya menampilkan potret LDII di lima daerah yang khusus kami pilih untuk didalami lebih jauh. Kelima daerah itu adalah: LDII di Kota Kediri, Jawa Timur, wilayah di mana LDII pertama kali “didirikan” dan berkembang; LDII di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang usianya termasuk paling tua di Indonesia dan berada di luar Jawa; LDII di Kota Surakarta, Jawa Tengah, satu pusat penting di Jawa di mana persaingan di antara ormas-ormas Islam berlangsung sengit; LDII di Banda Aceh, daerah di mana semua organisasi harus tunduk di bawah keistimewaan khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan LDII di Provinsi Bali, di mana LDII menjadi kelompok minoritas Muslim di tengah kelompok minoritas agama di Pulau Dewata. Kelima bab ini memperlihatkan keragaman “nasib” LDII di berbagai tempat yang berbeda, karena tantangan yang mereka hadapi dan sumber daya yang ada pada mereka juga berbeda.

Dengan terbitnya buku ini, kami berharap kita semua dapat mengambil manfaat dari bagaimana para aktivis dan warga biasa LDII “keluar dari kemelut”. Hal ini tidak saja berlaku untuk mereka yang anggota LDII tetapi yang “nasibnya” masih kurang baik, atau kelompok minoritas agama atau kepercayaan yang keberadaannya sejauh ini masih dipermasalahkan, tetapi juga untuk semua kita warga

negara Indonesia yang ingin memperoleh kerukunan yang lebih baik di antara pada pemeluk agama atau kepercayaan. Semua ini pada gilirannya adalah pelajaran berdemokrasi dan membangun binadamai.

Riset ini dimungkinkan berkat kerja sama kami yang baik dengan para pengurus LDII, baik di pusat maupun daerah. Meskipun kami memperoleh dukungan dari LDII, semua proses riset kami jalankan secara mandiri: mulai dari menyusun desain dan pertanyaan riset hingga memilih narasumber dan menyusun laporan.

Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerja sama di atas. Juga kepada mereka yang menjadi narasumber yang kami wawancarai. Terlepas dari itu, semua kesalahan terkait fakta atau tafsir menjadi tanggung jawab kami sendiri.***

Bagian I

Konteks Umum, Pendekatan, dan Temuan Riset

Bab 1

Keluar dari Kemelut: 50 Tahun Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Ihsan Ali-Fauzi

Latar Belakang

Sepanjang sekitar 15 tahun terakhir, kualitas demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan cukup berat dalam hal tersedianya jaminan terhadap kebebasan warga negara dalam beragama atau berkeyakinan (KBB) dengan meningkatnya aksi-aksi diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas. Aksi-aksi ini berlangsung dalam hubungan di antara berbagai kelompok agama yang berbeda (komunal atau antaragama), di antara berbagai sekte dalam satu agama yang sama (sektarian atau intraagama), atau di antara pemeluk agama tertentu dengan penganut aliran kepercayaan atau agama leluhur tertentu di beberapa tempat.

Meskipun jumlah aksi-aksi di atas tidak banyak jika dilihat dari besarnya penduduk Indonesia dan betapa luas serta majemuknya negara ini, onkos yang diakibatkan aksi-aksi itu cukup mengkhawatirkan. Aksi-aksi itu, misalnya, mencakup serangan atas anggota Ahmadiyah dan Syiah, seperti yang terjadi di Cikeusik (Banten) pada 2011 dan Sampang (Madura, Jawa Timur) pada 2012, yang untuk pertamakalinya dalam sejarah Indonesia menyebabkan kematian (Panggabean & Ali-Fauzi, 2014). Diskriminasi yang bersifat antaragama terjadi khususnya terkait pembangunan rumah-rumah ibadat kelompok minoritas agama tertentu, seperti gereja di Wilayah Indonesia Barat atau masjid dan vihara di Wilayah Indonesia Timur (PUSAD Paramadina, 2020). Sementara itu, berbagai laporan pegiat hak-hak asasi manusia dan

studi terbaru para Indonesianis menunjukkan bahwa sengketa berbasis identitas agama telah menaikkan tingkat intoleransi dan “mobokrasi”, satu situasi di mana ketetapan hukum ditentukan oleh jumlah massa yang melakukan protes dalam satu kasus hukum tertentu dan bukan atas dasar prinsip keadilan (Setara Institute, 2015; Wahid Institute, 2015; Mietzner & Muhtadi, 2019; Jaffrey, 2020). Pada kasus-kasus yang terakhir, kita juga mencatat bahwa berbagai ujaran atau hasutan kebencian disampaikan di ruang publik (Bagir & Mubarak, 2021; YLBHI, 2020).

Berbagai perkembangan di atas tidak saja telah mengganggu kerukunan atau keharmonisan sosial di Indonesia, tetapi juga telah turut mencoreng reputasi internasional negara ini sebagai bangsa Muslim terbesar di dunia yang demokratis (Harsono 2012). Melihat perkembangan ini dan mengingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, wajar jika banyak pertanyaan diajukan terkait peran kaum Muslim dalam demokrasi di Indonesia belakangan ini. Sebagian sarjana dan peneliti Islam di Indonesia mulai bertanya-tanya jika Islam di negeri ini sudah mulai berubah dari yang dulu dikenal sebagai “Islam yang ramah” menjadi “Islam yang marah”, karena makin menguatnya pengaruh Islam konservatif khususnya di bawah dua periode kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) (Azra, 2013; Fealy, 2019; van Bruinessen, 2013; Bourchier, 2019).

Menariknya, aksi-aksi di atas tidak ditujukan kepada organisasi atau individu warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), organisasi Islam yang berdiri pada 3 Januari 1972 di Kota Kediri, Jawa Timur, dan kini menyebar ke banyak wilayah di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Fakta ini sangat menarik terutama karena organisasi ini pernah mengalami aksi-aksi diskriminasi atau dicurigai seperti disebutkan di atas. Di bawah Orde Baru, LDII pernah berkali-kali dicurigai karena keberadaannya dianggap mengancam atau mengganggu kelompok-kelompok Muslim lain seperti Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah. Sementara itu, pada masa-masa awal Reformasi, persisnya pada 2005, bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memasukkan LDII sebagai bagian dari aliran yang “sesat dan menyimpang”. Namun demikian, selama kurang-lebih 15 tahun terakhir, LDII bisa dengan relatif bebas mengembangkan dakwahnya dan para anggotanya terlibat dalam berbagai kegiatan. Kini, warga LDII bahkan ikut berpartisipasi sebagai pengurus pada banyak organisasi payung seperti MUI atau Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan beberapa di antaranya terlibat sebagai kontestan dalam pemilihan

umum (pemilu), meskipun sisa-sisa kecurigaan terhadap mereka masih tetap ada di tempat-tempat tertentu.

Konteks Umum Riset 50 Tahun LDII

Sayangnya, fakta-fakta di atas kurang memperoleh perhatian dari para pengambil kebijakan atau tokoh-tokoh organisasi keagamaan yang selama ini disibukkan oleh upaya-upaya mencari cara memperkuat kerukunan di antara komunitas agama di tanah air. Fakta-fakta itu juga kurang menarik perhatian para akademisi atau peneliti dan pegiat kebebasan beragama, baik di dalam maupun luar negeri, yang sering kali hanya mencatat kasus-kasus buruk terjadinya diskriminasi, seraya mengabaikan kasus-kasus baik di mana diskriminasi tidak terjadi.

Kurangnya perhatian di atas patut disayangkan, karena kerukunan hidup di antara para pemeluk agama dapat ditingkatkan antara lain dengan mempelajari kasus keberhasilan kelompok agama tertentu keluar dari stigma yang pernah mereka alami. Kasus-kasus baik seperti ini juga dapat memberi kita pelajaran mengenai bagaimana individu atau kelompok agama tertentu makin mampu menikmati hak mereka untuk berkumpul, berorganisasi, dan menjalankan keyakinan, meskipun sebelumnya mereka dicurigai dan diawasi.

Riset ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan di atas dengan mempelajari pengalaman LDII “keluar dari kemelut” dalam 50 tahun usianya. Dalam mempelajari kasus ini, kami menggunakan perspektif demokrasi dalam ilmu politik dan perspektif resolusi konflik atau binadamai dalam studi-studi perdamaian.

Sudah luas dikenal bahwa demokrasi adalah sistem politik yang memberi jaminan kepada semua warga negara untuk bebas berorganisasi dan berekspresi, termasuk menjalankan agama atau kepercayaannya masing-masing. Terutama aspek-aspek inilah yang membedakan demokrasi dari sistem politik lawannya, khususnya otoritarianisme. Sesudah mengalami gerakan Reformasi (1998), Indonesia kembali menerapkan sistem politik demokrasi ini dan meninggalkan otoritarianisme seperti dijalankan pemerintahan Orde Baru. Amendemen Konstitusi (2000-2004) makin menegaskan jaminan akan dihormatinya hak-hak warga negara di atas.

Dalam demokrasi, konflik-konflik di antara individu atau kelompok memang diasumsikan (akan) ada dan terjadi. Hal ini karena sebuah masyarakat, apalagi yang berdiam di negara besar

yang sangat majemuk seperti Indonesia, pasti terdiri dari banyak orang atau kelompok dengan aspirasi dan kepentingan yang beragam dan berbeda. Karenanya, sementara konflik-konflik itu diasumsikan ada dan akan terus terjadi serta tidak terhindarkan, semuanya itu harus dikelola secara adil, damai dan berkeadaban. Itulah sebabnya mengapa sejumlah sarjana mengidentifikasi demokrasi sebagai sistem pengelolaan konflik secara damai dan nirkekerasan.

Dalam riset ini, pengalaman LDII akan ditelusuri dan ditinjau dengan kacamata di atas. Karena itu, kami tidak memfokuskan perhatian pada ajaran-ajaran Islam khusus yang dikembangkan LDII dan bagaimana lembaga ini secara internal mengelola organisasinya, karena hal itu merupakan bagian dari hak warga LDII untuk berorganisasi dan menjalankan keyakinan agama mereka. Fokus riset ini lebih kepada bagaimana dampak ajaran dan model pengelolaan organisasi LDII di atas terhadap interaksinya dengan individu dan kelompok masyarakat lain di Indonesia, khususnya kelompok-kelompok Muslim yang pernah mencurigai mereka seperti NU, Muhammadiyah atau MUI. Dalam hal ini, hubungan LDII dengan pemerintah tentu saja juga akan menjadi fokus utama, karena pemerintah adalah pihak yang memperantarai interaksi-interaksi di atas dan menjadi semacam wasit yang mengelolanya.

Riset ini berusaha menjawab tiga pertanyaan pokok sebagai berikut. Pertama, apa yang terus bertahan dan berubah dalam sistem dan praktik pengelolaan kerukunan di antara para pemeluk agama di Indonesia di masa Orde Baru dan era Reformasi? Apa dampaknya terhadap LDII? Bagaimana LDII menanggapiinya?

Kedua, mengingat bahwa cabang-cabang LDII kini sudah berdiri di berbagai tempat di Indonesia, bahkan di luar negeri, mengapa di beberapa tempat perkembangan LDII masih mengalami hambatan, di mana warga LDII masih mengalami diskriminasi atau stigma negatif, sedang di beberapa tempat lain LDII relatif berhasil mengatasi masalah tersebut? Kekhasan apa yang dapat menjelaskan variasi ini?

Ketiga, mengapa LDII berhasil keluar dari ancaman diskriminasi ketika banyak kelompok minoritas agama sejenis lainnya, misalnya Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), justru mengalami aksi-aksi seperti itu di masa Reformasi? Kekhasan apa yang ada di masing-masing keduanya dan menjelaskan perbedaan "nasib" mereka? Apa yang bisa dipelajari JAI dari pengalaman LDII, jika ada?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, literatur yang kini

ada mengenai LDII kurang sekali membantu upaya kami. Studi-studi mengenai LDII yang ada hampir semuanya memfokuskan perhatian pada sisi ajaran yang dikembangkan atau diajarkan LDII, yang tidak banyak membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan riset di atas. Studi yang mungkin paling dikenal menghujat ideologi LDII adalah yang disunting Hartono Ahmad Jaiz (1998), *Bahaya Islam Jama'ah LEMKARI LDII*. Pada 2002, penyunting yang sama menerbitkan buku *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia* dan memasukkan LDII sebagai salah satunya. Studi-studi lainnya membahas ideologi LDII sesudah lembaga itu mengembangkan apa yang disebut sebagai “paradigma baru” dan menelusuri pandangan para ulama mengenainya, antara lain *After New Paradigma: Catatan Para Ulama tentang LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)* (Setiawan, Nurhadi dan Anasy, 2008). Sayangnya, studi yang terakhir ini hanya mencakup pandangan para elit organisasi dan sama sekali tidak melihat proses-proses yang terjadi di tengah masyarakat akar rumput.

Beberapa studi lain, yang sangat menarik karena membahas aspek-aspek sosiologis dan politis dinamika kehidupan LDII, dapat membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Hanya saja, sayangnya, usianya sudah cukup lama dan kurang atau tidak mencakup perkembangan mutakhir, atau hanya mempelajari LDII di wilayah tertentu (contohnya Marzani, 1989; Dodi, 2017; Ricklefs, 2012). Atau, studi-studi itu cukup terbatas karena membahas tidak saja LDII, melainkan juga gerakan-gerakan Islam secara umum di Indonesia di mana LDII menjadi salah satu kasusnya (misalnya van Bruinessen, 1992; Ricklefs, 2012).

Karena alasan-alasan di atas, sumber utama riset ini adalah wawancara dengan para pengurus LDII. Selain dengan para pengurus LDII di tingkat pusat, kami mewawancarai para pengurus LDII di lima wilayah, yaitu: Kediri, Soloraya, Aceh, Tarakan dan Bali. Di tengah keterbatasan yang ada, antara lain karena adanya ancaman Pandemi Covid-19 ketika kami turun lapangan, wilayah-wilayah ini kami pilih untuk melihat variasi pengelolaan LDII di wilayah yang khas dari beberapa segi: tahun berdirinya sebagai perintis dan posisinya sebagai pusat pengelolaan pengajaran (Kediri, Jawa Timur); perkembangannya yang pesat dan posisinya yang cukup dominan di Jawa (Soloraya, Jawa Tengah); tahun berdirinya yang cukup awal dan posisinya yang cukup dominan di wilayah non-Jawa (Tarakan, Kalimantan Utara); tantangannya yang berat karena kekhasan wilayahnya di Sumatra (Banda Aceh, Provinsi Aceh Darussalam); dan posisinya sebagai

bagian dari kelompok minoritas Muslim di tengah masyarakat Hindu (Provinsi Bali). Secara keseluruhan, kami mewawancarai 43 pengurus dan warga LDII, termasuk beberapa aktivis perempuan yang secara umum posisinya cukup terpinggirkan di LDII.

Ketika berkunjung dan melakukan observasi di wilayah-wilayah di atas, kami juga mewawancarai wakil-wakil pemerintah, khususnya di jajaran Kementerian Agama, Kesbangpol, dan Polres. Kami juga mewawancarai tokoh-tokoh organisasi agama yang menonjol di masing-masing wilayah, termasuk pengurus NU, Muhammadiyah, MUI dan FKUB. Di Soloraya, kami juga sempat berinteraksi dengan beberapa aktivis Muslim yang mengaku sebagai mantan warga LDII dan kini melakukan apa yang mereka sebut sebagai “LDII Hijrah”. Dalam kategori narasumber non-LDII ini, kami mewawancarai sejumlah 49 tokoh atau aktivis.

Selain wawancara dan observasi, riset ini kami lengkapi dengan riset literatur khususnya mengenai gerakan-gerakan Islam di Indonesia. Kami memanfaatkan beberapa studi mengenai LDII yang sudah disebutkan di atas sejauh relevan, khususnya studi Ricklefs (2012) yang banyak melaporkan situasi lapangan tentang hubungan LDII dan ormas-ormas Islam serta masyarakat pada umumnya hingga sekitar tahun 2010. Kami juga memeriksa liputan media massa untuk memperoleh informasi terkait langkah-langkah LDII dari sumber-sumber yang kami pandang netral dan bisa dipercaya.

Enam Temuan Riset

Berdasarkan berbagai sumber di atas, riset ini menarik enam kesimpulan khusus mengenai LDII di tingkat pusat maupun di daerah. Semuanya terkait dengan asal-usul kesejarahan LDII dan awal kontroversi mengenainya, terbentuk dan berkembangnya paradigma baru di LDII, hubungan LDII dengan pemerintah dan ormas-ormas Islam, tempat kaum perempuan dalam LDII, dan perbandingan “nasib” LDII dengan Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

Walaupun semua temuan di atas saling terkait dalam tingkatan yang berbeda-beda, kami ingin memaparkannya satu demi satu agar semuanya menjadi lebih jelas. Keenam temuan ini umumnya terkait dengan LDII di tingkat pusat, meskipun implikasinya juga terasa di LDII-LDII daerah. Paparan khusus mengenai LDII-LDII daerah akan disajikan secara terpisah dalam bagian II buku ini.

1. Asal-usul Kesenjarahan LDII dan Awal Kontroversi mengenainya

Secara ringkas dapat disebutkan bahwa cikal-bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai LDII resmi berdiri pada 3 Januari 1972 di Kota Kediri, Jawa Timur, dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI). Nama organisasi ini kemudian diubah menjadi Lembaga Karyawan Indonesia (LEMKARI) pada 1981, dan kemudian diubah lagi pada 1990 menjadi LDII seperti sekarang.

Meskipun demikian, terdapat dokumentasi yang dengan cukup jelas menunjukkan bahwa LDII hingga batas-batas tertentu adalah kelanjutan dari organisasi Islam Jama'ah atau Darul Hadits. Organisasi ini bermula dari kelompok pengajian dan dakwah yang dibentuk Nur Hasan Al-Ubaidah di Desa Burengan Banjaran, Kediri, Jawa Timur, pada 1951, dengan nama Jamaah Qur'an dan Hadis, yang cukup dikenal sebagai organisasi yang mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang eksklusif, militan, dan kadang kala menyalahkan atau bahkan meng-*kafir*-kan kelompok-kelompok Muslim lain yang berbeda pandangan dengan mereka (lebih jauh lihat Marzani, 1989; Dodi, 2017; van Bruinessen, 1992). Karena ajaran dan perilaku organisasi tersebut dianggap meresahkan oleh kelompok masyarakat tertentu, yang kemudian melaporkannya kepada pemerintah Orde Baru, maka pemerintah kemudian melarangnya berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-089/D.A./10/1971 tertanggal 29 Oktober 1971 (Setiawan, Nurhadi & Anasy, 2008: 2).

Kontroversi yang kemudian berkembang secara berkepanjangan mengenai LDII dan bertahannya kecurigaan terhadapnya bermula dari asal-usul kesenjarahan di atas. Ada dua faktor kunci yang memainkan peran penting di sini.

Pertama-tama, dengan alasan menyelamatkan organisasi dari larangan pemerintah di atas, para aktivis Muslim tertentu pada awal mula LDII membentuk organisasi baru di bawah binaan pemerintah yang waktu itu banyak didominasi tokoh-tokoh Orde Baru yang bergabung dalam Golongan Karya (Golkar). Dengan membentuk YAKARI (dan kemudian berubah menjadi LEMKARI), organisasi mereka menjadi bagian dari Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar dan memperoleh legalitas dan perlindungan dari tokoh-tokoh penting di pemerintahan. Beberapa aktivis YAKARI atau LEMKARI kala itu bahkan menjadi juru bicara kampanye untuk kemenangan Golkar dalam Pemilu.

Namun demikian, kecurigaan masyarakat terhadap LDII waktu itu masih terus berlanjut, karena selain dianggap masih terkait dengan organisasi lama, yakni Islam Jama'ah, para aktivis YAKARI kini juga dianggap sebagai bagian dari atau bahkan "alat" partai politik atau Golkar untuk memenangkan Pemilu 1971 dan seterusnya. Dari sisi yang terakhir, bertahannya kecurigaan tersebut mudah dipahami karena adanya ketegangan dalam hubungan antara pemerintah dan organisasi-organisasi Islam pada waktu itu, yang beberapa di antaranya bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menjadi pesaing Golkar dalam Pemilu 1971 dan sepanjang Orde Baru (lihat Effendy, 1998).

Pada dekade 1980-an, kecurigaan di atas masih bertahan. Pada 1988, misalnya, LDII sempat diperiksa Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, MUI, kantor kejaksaan agung provinsi, pemerintah daerah, dan kepolisian. Ini menindaklanjuti laporan Ketua MUI Jawa Timur, yang menuduh organisasi itu masih menyebarkan ajaran sesat dan menyimpang, bersikap tidak loyal kepada pemerintah, dan hanya patuh kepada ajaran-ajaran pemimpinnya. Akibat kasus ini, bahkan Ketua Umum Golkar Jawa Timur kala itu setuju jika LDII dibubarkan (Ricklefs, 2012: 239).

Walaupun demikian, pemerintah Orde Baru kala itu membiarkan organisasi itu tetap hidup dan hanya meminta agar nama organisasinya diubah menjadi LDII seperti kita kenal sekarang, yang dilakukan pada 1990. Perubahan nama ini dilakukan berkat arahan Sudharmono dan Rudini, masing-masing Wakil Presiden dan Menteri Dalam Negeri kala itu. Selain untuk menghindari asosiasi langsung LDII dengan pemerintah seperti tersirat dalam nama LEMKARI, nama terakhir ini juga adalah singkatan dari Lembaga Karate Indonesia yang sudah ada waktu itu (Setiawan, Nurhadi & Anasy, 2008: 3).

Memasuki dekade 1990-an, kecurigaan di atas masih tetap bertahan. Kecurigaan itu kadang berkembang menjadi konflik sewaktu-waktu di tingkat pedesaan. Misalnya, seperti diceritakan Ricklefs, seorang peneliti Islam di Jawa, pada awal 1990-an LDII muncul di Ngoro, Jawa Timur, dan mulai membakari "kitab kuning" karya-karya klasik Islam tradisionalisme yang diajarkan di banyak pesantren NU. Para aktivis LDII beralasan bahwa berbagai kitab kuning tersebut adalah penyebab kemandekan umat Muslim di Indonesia. Akibat peristiwa ini, para kiai NU menginginkan agar LDII dibubarkan, tetapi pemerintah tetap tidak mengindahkan permintaan ini (Ricklefs, 2012: 239-240).

Semua perkembangan di atas terasa pengaruhnya di berbagai daerah di mana LDII berada. Namun, pengaruh itu berbeda-beda tergantung kepada kapan LDII pertama kali masuk ke daerah bersangkutan dan bagaimana para pengurusnya menghadapi tantangan yang ada kala itu. Misalnya, pengaruh itu sangat terasa di LDII Kediri, bahkan mereka menjadi pemain utamanya, karena Kediri adalah tempat di mana LDII sendiri didirikan dengan nama YAKARI dan kemudian LEMKARI di awal 1970-an. Pengaruh itu juga sangat terasa di LDII Soloraya, karena kedekatannya dengan Kediri dan usianya yang sama-sama tua dan berdiri sejak awal. Hal yang sama juga dapat dilihat di LDII Tarakan, karena meskipun posisinya di luar Jawa (Kalimantan), LDII sudah diperkenalkan ke daerah itu ketika masih dalam bentuknya sebagai organisasi Islam Jama'ah pada akhir 1960-an dan terus bertahan sampai sekarang. Sebaliknya, di Bali, pengaruh itu kurang terasa, karena selain diperkenalkan cukup terlambat (1979), LDII di provinsi itu juga hanyalah bagian kecil dari sesama kelompok minoritas Muslim di tengah mayoritas pemeluk agama Hindu. Hal yang sama juga dapat disaksikan di LDII Aceh, karena di wilayah ini ormas-ormas Islam yang berasal dari Jawa memang kurang berkembang, termasuk NU atau Muhammadiyah.

Belakangan, sebab-sebab awal muncul dan bertahannya kontroversi dan kecurigaan masyarakat akibat hubungan antara LDII dengan Islam Jama'ah di atas diakui sendiri oleh Teddy Suratmadji, salah satu Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) LDII. Dia menyampaikan tiga alasan sebagai berikut:

Pertama, LDII memang tidak bisa menafikan ketersambungannya dengan LEMKARI, tetapi kedudukan lembaga ini sesungguhnya adalah untuk menampung dan membina eks-pengikut Islam Jama'ah. Tugas pembinaan ini diberikan oleh Sekber Golkar sebagai konsekuensi dimasukkannya LEMKARI sebagai salah satu organisasi pendukung Golkar. *Kedua*, LDII tidak menafikan adanya pertarungan pengaruh antara alumni Ponpes Burengan, yang merupakan basis awal lahirnya gerakan Islam Jama'ah, dengan "kelompok baru" yang mencoba keluar dari Islam Jama'ah. Pada saat yang sama, kelompok baru ini dengan alasan mencari posisi aman telah membawa kader LEMKARI untuk berpolitik di Golkar. *Ketiga*, LDII secara bertahap telah melakukan perubahan-perubahan paradigma ke arah inklusivitas organisasi yang mencapai

puncaknya pada tahun 2005 dengan keluarnya konsep paradigma baru. (Dikutip dalam Setiawan, Nurhadi & Anasy, 2008: 49)

Faktor kunci kedua terus bertahannya kecurigaan terhadap LDII berhubungan dengan penjelasan Suratmadji terakhir di atas, yakni upaya para pegiat LDII untuk mengubah organisasi mereka menjadi organisasi yang lebih terbuka. Karena berbagai alasan, tidak semua orang percaya bahwa LDII memang sudah berubah, seperti kami paparkan dalam butir kesimpulan berikut.

2. “Paradigma Baru” LDII: Pembentukan dan Penerimaan terhadapnya

Ketika Indonesia memasuki era Reformasi dan Orde Baru selesai pada 1998, sistem politik yang berjalan adalah sistem demokrasi, yang antara lain memungkinkan berbagai kelompok masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing secara bebas dan terbuka. Salah satu organisasi yang paling aktif dan cukup berhasil memperjuangkan kepentingannya pada era ini adalah MUI, yang di masa Orde Baru dianggap lebih berfungsi sebagai “stempel pemerintah” untuk masalah-masalah keagamaan. Di masa Reformasi, MUI berusaha mengembangkan diri sebagai organisasi milik umat dan mengabdikan kepada kepentingan umat Islam (Hasyim, 2023: 100-108).

Karena alasan di atas, beberapa aktivis di MUI mulai melihat lagi kaitan historis dan kultural LDII dengan Islam Jama'ah dan hendak menegaskan kembali keputusan awal tentang kesesatan ajaran LDII. Mereka memperjuangkan kembali aspirasi ini, terutama lewat Musyawarah Nasional MUI ketujuh di Jakarta pada 21-29 Juli 2005. Karenanya, hasil Munas MUI ini menegaskan bahwa beberapa aliran dalam Islam di Indonesia, seperti Ahmadiyah dan LDII, termasuk bagian dari aliran yang “sesat dan menyimpang”. MUI bahkan merekomendasikan agar aliran-aliran sesat tersebut ditindak tegas dan dibubarkan karena meresahkan masyarakat (Lodi, 2017: 238). Terlepas dari hasil Munas MUI itu, tidak ada fatwa khusus MUI menyangkut LDII sebagai aliran yang sesat dan menyimpang. Hal ini penting, karena meskipun MUI adalah organisasi Islam biasa yang keputusannya tidak wajib diikuti pemerintah, pada kenyataannya fatwa atau keputusannya sering menjadi rujukan para pengambil kebijakan dan berpengaruh di masyarakat.

Didorong oleh perkembangan di atas, para aktivis LDII mulai berbenah diri, karena mereka mulai menyadari bahwa kini mereka tidak bisa lagi berharap kepada pihak lain untuk melindungi organisasi mereka, seperti pada masa Ode Baru. Salah satu langkah terpenting yang diambil LDII adalah mengampanyekan dan menjalankan prinsip organisasi yang disebut “paradigma baru” LDII: mereka bersikap lebih terbuka kepada pihak-pihak lain dan tidak menghakimi keyakinan yang berbeda dari keyakinan mereka; mengembangkan dakwah yang lebih sejuk yang belakangan mereka sebut “*green dakwah*”; mendahulukan ajaran mereka tentang budi luhur; menyatakan kesetiaan penuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila; dan rajin terlibat aktif dalam upaya-upaya membangun jembatan silaturahmi. Paradigma baru di atas dinyatakan secara resmi dalam Musyawarah Nasional (Munas) LDII pada 2005, ketika LDII juga menegaskan untuk tidak berafiliasi kepada golongan atau partai politik apa pun (Setiawan, Nurhadi & Anasy, 2008: 3-4).

Dalam konteks di atas, para aktivis LDII juga rajin membangun komunikasi dengan organisasi seperti MUI, yang kala itu Komisi Fatwanya diketuai Ma’ruf Amin, untuk memberi klarifikasi bahwa LDII sudah menganut paradigma baru dan tidak lagi eksklusif. Antara lain berkat usaha-usaha ini, pada 4 September 2006 terbit Keputusan Komisi Fatwa MUI Nomor 03/Kep/KF-MUI/IX.2006 tentang LDII, yang antara lain menyatakan bahwa MUI “dapat menerima pernyataan klarifikasi tingkat nasional dari Dewan Pimpinan LDII Pusat.” Klarifikasi itu sendiri menyangkut lima masalah pokok yang selama ini menjadi sebab-sebab kecurigaan terhadap LDII, yakni bahwa: (1) LDII telah menganut paradigma baru; (2) LDII bukan penerus atau kelanjutan dari Islam Jama’ah dan tidak menggunakan atau mengajarkan ajaran Islam Jama’ah; (3) LDII tidak menggunakan atau menganut sistem keamiran; (4) LDII tidak menganggap Umat Muslim di luar kelompok mereka sebagai kafir atau najis; dan (5) LDII bersedia bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana yang ditetapkan MUI.

Upaya-upaya di atas cukup membawa hasil dalam mengubah pandangan orang mengenai LDII, meskipun keraguan masih ada terkait kesungguhan aktivis LDII untuk menjalankan paradigma barunya sepenuh hati. Dari risetnya di lapangan, Ricklefs misalnya mencatat:

Sejak 2006, ada lebih banyak bukti tentang upaya LDII untuk “berdamai” ... dengan para penganut versi-versi lain dari Islam. Mereka tidak lagi menyebut pemeluk Islam lain di luar pengikut aliran mereka sebagai *kafir*, seperti dilaporkan tokoh-tokoh Muhammadiyah di Kediri, meskipun yang disebut terakhir ini percaya bahwa LDII tidak benar-benar mengubah keyakinan mereka. K.H. Idris Marzuqi berpendapat bahwa LDII memang mengubah beberapa pandangannya, tetapi dia tidak memberi contoh tentang hal itu. K.H. Imam Ghazali Said, seorang aktivis hubungan antaragama, menganggap bahwa LDII kini lebih moderat daripada di masa lalu, tetapi masih merupakan kelompok yang eksklusif. (Ricklefs, 2012: 325)

Sepengetahuan kami, hingga kini tidak ada dokumentasi yang dengan pasti menunjukkan sejauh mana usaha-usaha LDII di atas berhasil meyakinkan pemerintah dan masyarakat. Karenanya, sejauh ini kami juga tidak bisa memastikan apakah para pengurus LDII belakangan ini lebih konsisten menerapkan paradigma baru atau tidak, karena kami tidak punya cukup informasi mengenai bagaimana sikap dan tindakan mereka misalnya sepuluh tahun yang lalu.

Dari dokumentasi yang ada, kesimpulan yang kita peroleh adalah campuran antara percaya atau tidak atau kurang percaya. Mengenai upaya LDII dan reaksi MUI mengenainya di Yogyakarta di tahun 2000-an, Ricklefs misalnya melaporkan:

Di Yogyakarta, LDII bertemu dengan perwakilan dari MUI dan kantor Departemen Agama Yogyakarta. Pejabat MUI mengatakan bahwa “LDII perlu terus menyosialisasikan lembaganya pada ormas-ormas yang lain agar masyarakat luas semakin kenal pada program-program LDII.” LDII menyelenggarakan seminar di sebuah masjid di Sleman untuk mendiskusikan kekerasan dan kriminalitas di kalangan anak muda yang, menurut mereka, diakibatkan oleh kurang memadainya pendidikan agama yang diajarkan sesudah level taman kanak-kanak al-Qur’an. Maka, LDII menyusun berbagai program pendidikan dakwah dan agama untuk anak usia lima hingga 10 tahun dan 10 hingga 15 tahun. Sekretaris MUI Sleman menjadi salah satu pembicara di seminar tersebut. (Ricklefs, 2012: 326-326)

Ricklefs juga melaporkan bagaimana sekitar 45 orang warga LDII kala itu bergaul di tengah masyarakat majemuk di lereng Gunung Kelud di dekat Kediri, persisnya di Desa Manggis. Desa itu berpenduduk sekitar 800 jiwa, sebagian besarnya Muslim, tetapi ada sekitar 30 persen penduduknya yang beragama Hindu. Ricklefs menulis:

Anggota LDII memberi prioritas kepada hubungan-hubungan yang harmonis. Mereka tidak menghadiri pengajian dwimingguan yang digelar jamaah NU atau ambil bagian dalam acara *tahlilan* kaum Islam tradisionalisme. Tetapi, apabila mereka mendapat undangan ketika, misalnya, ada kematian di kalangan komunitas NU, mereka akan datang. Mereka bahkan menghadiri upacara *bersih desa*, menganggapnya sebagai adat kebiasaan setempat, sembari mengabaikan keyakinan akan kekuatan-kekuatan spiritual yang masih dipegang oleh warga desa lainnya. (Ricklefs, 2012: 326-327)

Terlepas dari terbatasnya informasi yang ada, dari riset ini kami dapat menyimpulkan bahwa kecurigaan dan stigma masyarakat umum terhadap para aktivis LDII sekarang secara umum sudah berkurang dibanding misalnya sepuluh tahun, meskipun sisa-sisanya masih tetap terasa. Di antara bukti paling baru yang menunjukkan masih adanya kecurigaan itu adalah terbitnya sebuah dokumen MUI Pusat, pada 27 Mei 2021, yang secara umum menyatakan bahwa LDII “belum melaksanakan Paradigma Baru secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen.”¹ Namun, terbitnya dokumen seperti ini tidak otomatis mengakibatkan memburuknya hubungan antara warga LDII dengan pemerintah atau masyarakat, seperti akan didiskusikan nanti.

Masih bertahannya kecurigaan atau stigma seperti ditunjukkan di atas bukanlah sesuatu yang sulit dipahami karena dua alasan. Pertama, sekalipun jika kita memercayai niat baik para pengurus LDII, tidak ada jaminan juga bahwa mereka mampu sepenuhnya mengontrol semua simpul anggota mereka di berbagai tempat. Sementara itu, seperti diakui secara terbuka oleh Chriswanto Santoso, Ketua Umum DPP LDII, sumber daya dan sumber dana yang ada pada mereka juga terbatas, yang memperberat tugas mereka untuk menyosialisasikan paradigma

¹ Lihat, “Taushiyah DP MUI Terhadap Pelaksanaan Paradigma Baru LDII,” MUI digital, 27 Mei 2021, <https://mui.or.id/berita/30264/taushiyah-dp-mui-terhadap-pelaksanaan-paradigma-baru-ldii/> (diakses 23 Juni 2022).

baru ke semua kalangan anggota.² Kedua, kecurigaan di atas mungkin juga sengaja dipertahankan oleh individu atau kelompok tertentu yang kepentingannya atau mereka terancam oleh makin berkembangnya LDII dengan paradigma baru. Dalam hal ini, mereka memang tidak mau menerima fakta bahwa LDII sudah berubah, karena kepentingan mereka lebih diuntungkan dengan terus bertahannya ingatan publik mengenai kaitan historis LDII dengan Islam Jama'ah yang pernah dilarang pemerintah.

Terkait dua alasan di atas, apa yang disampaikan K.H. Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI di masa-masa genting ketika LDII hendak mengembangkan paradigma baru, sangat menarik. Dia menyatakan:

Kalau orang [LDII] mau bertaubat, jangan dilihat masa lalunya, *maa madha faata*, itu sudah masa lalu. Yang jelas mereka telah berubah. Masa kita mau membongkar Umar (bin Khattab) masa lalu. Sayyidina Umar masa lalunya kan suka mabuk. Tetapi beliau menjadi sahabat utama Nabi. ... Kalau anggota [LDII] di simpul-simpul masih memakai pola lama, itu pasti ada. Sekarang di dalam intern LDII ada pertarungan, antara yang ingin berubah dengan kelompok yang ingin bertahan. Tetapi, kendali organisasi dipegang oleh orang yang ingin berubah secara formal, dari pusat sampai ke wilayah-wilayah. Secara formal, mereka adalah bagian yang sudah berubah. Mereka adalah bagian yang ingin berada di lingkungan MUI. Jadi, menurut saya, kita jangan bertumpu pada simpul-simpul. Simpul-simpul itu harus kita bina supaya mereka berubah. (Dikutip dalam Setiawan, Nurhadi & Anasy. 2008: 77)

3. Hubungan LDII dengan Pemerintah

Terlepas dari masih adanya sisa-sisa kecurigaan terhadap LDII seperti ditunjukkan di atas, hubungan antara LDII dengan pemerintah di masa Reformasi berjalan cukup baik. Hubungan itu bisa dirumuskan demikian: LDII kini bukan lagi organisasi "binaan" pemerintah seperti pada masa Orde Baru, tetapi LDII juga bukan organisasi yang melawan pemerintah, atau bahkan sekadar bersikap kritis terhadapnya.

Hubungan baik di atas antara lain ditunjukkan dalam penerimaan

² Wawancara dengan Chriswanto Santoso, Ketua Umum DPP LDII, Jakarta, 12 Agustus 2022.

pemerintah pusat terhadap LDII. Hal ini jelas berbeda dari keberadaan LDII pada zaman Orde Baru, di mana LDII sempat dilarang atau diperiksa pemerintah. Lebih dari itu, dalam tiga tahun terakhir, misalnya, Presiden Jokowi bahkan menyempatkan diri membuka acara tahunan musyawarah nasional pengurus LDII. Hal yang sama juga ditunjukkan bawahan-bawahannya, misalnya beberapa pejabat tinggi dari kementerian, angkatan bersenjata atau kepolisian, yang menghadiri undangan-undangan LDII..

Hubungan baik di atas juga ditunjukkan oleh fakta bahwa kini para pengurus dan warga LDII bebas berkiprah di kantor-kantor pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mereka sekarang bahkan dapat berpartisipasi dalam politik kepartaian, misalnya dengan tampil sebagai kandidat dalam Pemilu dari partai mana saja. Lagi-lagi, pengalaman ini berbeda dari apa yang mereka alami di bawah sistem otoritarian Orde Baru, ketika mereka harus menjadi anggota Golkar untuk dapat berkiprah.

Dukungan LDII terhadap pemerintah dan ideologi negara Pancasila, bahkan NKRI, sudah muncul dari awal berdirinya organisasi. LDII memandang bahwa Al-Qur'an dan Hadis sudah menegaskan kesesuaian sila-sila dalam Pancasila dengan ajaran Islam. Dalam tafsir keislaman LDII, tidak ada pertentangan di antara keduanya dan bahkan keduanya saling menjiwai. Di dalam NKRI, Pancasila menjadi jembatan yang menengahi berbagai perbedaan agama dan keyakinan yang ada. LDII juga meyakini, sementara negara harus menjamin dan melindungi semua pemeluk agama dan keyakinan, bidang akidah dan pergaulan sehari-hari tidak boleh dicampuradukkan (lihat DPD LDII, 2007).

Belakangan ini, dukungan di atas muncul dalam bentuk pengurus LDII bermitra dengan aktor-aktor pemerintah dalam menjalankan kegiatan bersama seperti vaksinasi massal sehubungan dengan Pandemi Covid-19. Contoh lainnya, dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2021, pengurus LDII Pusat menyelenggarakan diskusi bertema "Peran Ormas Islam dalam Membumikan Pancasila," sambil melibatkan unsur-unsur Kemenag atau kepolisian. Selain itu, dukungan juga kita lihat dalam bentuk-bentuk yang lebih simbolik. Misalnya, di depan kantor LDII di tingkat pusat di Jakarta, kita sering melihat gambar-gambar pejabat tinggi negara, seperti Presiden Jokowi, terpampang besar dengan pesan-pesan kebangsaan tertentu di bawahnya.

Semua dinamika yang digambarkan di atas juga ditemukan di LDII-LDII daerah. Kemitraan dengan aktor-aktor pemerintahan daerah terjadi di semua wilayah LDII yang kami alami. Warga LDII kini bebas berkarier di sektor apa saja yang mereka kehendaki, sehingga beberapa di antara mereka bekerja misalnya sebagai pengusaha, wartawan, atau polisi. Di Tarakan, beberapa kader LDII bukan saja sudah ikut sebagai kontestan Pemilu dari partai yang berbeda, tetapi bahkan menduduki jabatan sebagai anggota legislatif atau eksekutif di daerah. Bahkan di Banda Aceh, wilayah di mana keberadaan LDII masih belum resmi diakui, Ketua LDII Provinsi Aceh menduduki jabatan penting sebagai komandan wilayahul hisbah (polisi syariat). Di semua wilayah LDII yang kami kunjungi kecuali Aceh, warga LDII juga terlibat dalam organisasi lintas-agama seperti FKUB, yang dibentuk pemerintah daerah tingkat provinsi dan kota/kabupaten.

Selain itu, hubungan baik LDII dengan pemerintah juga tampak dari fakta bahwa kami tidak mendengar dari narasumber pemerintah misalnya mengenai “riak-riak” di tengah masyarakat yang merepotkan pemerintah dan diakibatkan oleh keberadaan atau aktivitas tertentu warga LDII. Dugaan bahwa ada kader LDII yang terlibat dalam jaringan terorisme, seperti dikawatirkan beberapa aktivis “LDII Hijrah” di Soloraya, tidak ada bukti-buktinya yang meyakinkan. Peristiwa di Soloraya pada 6 November 2021 (lihat bab khusus mengenai LDII Soloraya dalam buku ini), yang berujung pada demonstrasi ribuan massa LDII ke kantor MUI Surakarta hari itu, justru menunjukkan bahwa LDII setempat kini lebih berani bertindak untuk memperjuangkan kepentingannya dengan melibatkan massa jika dianggap perlu. Bahwa peristiwa itu berakhir damai dengan ditariknya massa LDII seperti permintaan polisi, hal ini lagi-lagi menunjukkan hubungan baik LDII dengan aparat keamanan setempat.

Terlepas dari itu, di tengah hubungan baik LDII dan pemerintah seperti dipaparkan di atas, kita tidak pernah mendengar lembaga itu melakukan kritik terbuka terhadap pemerintah, seperti yang kadang kala dilakukan oleh lembaga resmi NU atau Muhammadiyah. Misalnya, dalam menyikapi soal konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Pengurus Besar NU menyambut aksi pemerintah sebagai sesuatu yang “haram” dan menyatakan bahwa pemerintah seharusnya memfasilitasi sertifikasi tanah rakyat.³ Sementara itu,

³ Lihat, “Muktamar Ke-34 NU: Haram Rampas Tanah Rakyat, Pemerintah Harusnya Fasilitasi Sertifikat,” NU Online, 15 September 2023, <https://nu.or.id/nasional/muktamar-ke-34-nu-haram-rampas-tanah-rakyat-pemerintah-harusnya-fasilitasi->

menanggapi kasus yang sama, Pengurus Pusat Muhammadiyah menyebut pemerintahan Presiden Jokowi “gagal melaksanakan mandat konstitusi dengan menggusur masyarakat yang telah berada di sana jauh sebelum Indonesia merdeka.”⁴

Salah satu penjelasan mengapa LDII tidak bersikap demikian adalah karena LDII menggunakan cara-cara tertentu yang lebih lembut, tidak frontal dan terbuka, ketika menyampaikan nasihat atau kritik termasuk kepada pemerintah, sesuai dengan semangat *green dakwah*.⁵ Kemungkinan penjelasan lainnya adalah kekhawatiran berlebihan LDII akibat pengalamannya sebagai organisasi yang dicurigai dan stigma yang terus dibawanya, yang membuatnya harus terus “tegak lurus” bersama pemerintah. Sementara kedua penjelasan di atas bisa saling melengkapi, dapat dipastikan bahwa NKRI, yang dicintai LDII, akan dirugikan jika pemerintahan tertentu yang sedang menjalankan rodanya mengambil langkah-langkah yang merusak cita-citanya sendiri.

4. Hubungan LDII dengan Ormas-ormas Islam

Belakangan ini, seperti hubungannya dengan pemerintah, hubungan LDII dengan ormas-ormas Islam lain juga berlangsung baik-baik saja, terutama dengan NU dan Muhammadiyah. Baik di pusat maupun wilayah, para pengurus LDII biasa mengundang para pengurus organisasi-organisasi Islam lain untuk memperkuat silaturahmi. Untuk tujuan yang sama, mereka juga akan berusaha meluangkan waktu menghadiri undangan para pemimpin organisasi-organisasi Islam lain. Membangun silaturahmi seperti ini menjadi salah satu kunci paradigma baru LDII, menjadikan mereka lebih terbuka kepada ormas-ormas lain, meskipun kecurigaan terhadap mereka masih tetap tersisa.

Hubungan baik seperti ini tidak pernah terjadi di masa Orde Baru, ketika LDII menjadi “kaki tangan” Golkar. Sebaliknya, akibat posisi

sertifikat-LCyEy (diakses 23 September 2023).

⁴ Lihat “Soal Konflik Pulau Rempang, PP Muhammadiyah: Pemerintah Gagal Laksanakan Mandat Konstitusi,” Tempo.Co, 13 September 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1771442/soal-konflik-pulau-rempang-pp-muhammadiyah-pemerintah-gagal-laksanakan-mandat-konstitusi> (diakses 23 September 2023).

⁵ Wawancara dengan Chriswanto Santoso, Ketua Umum DPP LDII, Jakarta, 12 Agustus 2022.

yang diambilnya itu, muncul “kecurigaan politik” (Setiawan, Nurhadi & Anasy, 2008: 32) terhadap LDII dari para tokoh ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah, yang berakibat panjang.

Posisinya [LDII] yang diametral dengan ormas-ormas Islam pada umumnya telah menyebabkan LDII berada pada posisi yang dianggap “tidak solider”. Pada akhirnya, hal itu mendorong gerakan “penghakiman publik” terhadap LDII. Gerakan penghakiman tersebut beriringan dengan sikap masyarakat Indonesia yang secara umum menghakimi Golkar sebagai arsitek Orde Baru. Dan gerakan penghakiman tersebut secara serentak bermula pada saat reformasi politik terjadi pada tahun 1998. (Setiawan, Nurhadi & Anasy, 2008: 32)

Antara lain karena berkembangnya hubungan baik di atas, belakangan ini kita tidak pernah mendengar berita misalnya tentang benturan antara warga LDII dengan warga NU atau Muhammadiyah karena praktik saling meng-*kafir*-kan, seperti terjadi sepuluh atau duapuluh tahun lalu. Benturan seperti ini, yang terjadi di awal Reformasi di Yogyakarta, misalnya dilaporkan Ricklefs sebagai berikut:

LDII masih terus tumbuh pada tahun-tahun setelah 1998, menarik pengikut baru dari beragam versi Islam yang lain dan memunculkan konflik di beberapa tempat. Seorang aktivis dakwah di wilayah Yogyakarta turun tangan di sebuah desa di mana umat beralih menjadi anggota LDII, menyediakan literatur anti-LDII dan, dengan cara demikian, menghentikan laju proses tersebut. Setelah menerima informasi dari aktivis itu, warga desa berkumpul dan memutuskan bahwa pengajian LDII tidak akan lagi digelar di desa mereka dan, apabila orang LDII bersikeras untuk tetap melakukannya, dia harus meninggalkan desa. Tokoh senior pesantren Lirboyo, K.H. Idris Marzuqi, menyatakan bahwa LDII “sangat bertentangan dengan kita.” (Ricklefs, 2012: 234)

Belakangan, “riak” yang mengakibatkan benturan seperti disebutkan di atas tidak pernah terdengar lagi. Jika pun ada, maka riak itu justru menandakan makin meningkatnya kepercayaan diri warga LDII di tengah pergaulan mereka dengan warga Muslim Indonesia lainnya, yang dilakukan secara sah dan damai. Di atas sudah disebutkan salah satu contohnya di tingkat daerah, yakni peristiwa demonstrasi massa

LDII di depan kantor MUI di Soloraya pada 6 November 2021. Contoh lainnya, yang berskala nasional, adalah demonstrasi warga LDII terhadap penulis Hartono Ahmad Jaiz ketika yang bersangkutan mengadakan diskusi mengenai isi bukunya yang mengkritik LDII dan memandang ajaran-ajarannya sesat dan menyimpang. Peristiwa ini terjadi pada 2006, ketika eksistensi LDII sedang dipertaruhkan, di Jakarta dan Soloraya.

Hubungan makin baik di antara para pemimpin LDII dan ormas-ormas Islam lainnya juga yang menjelaskan pelibatan warga LDII tertentu dalam kepengurusan MUI di berbagai wilayah dalam posisi yang beragam. Meskipun MUI Pusat di Jakarta mengeluarkan pernyataan bahwa LDII harus lebih konsisten menerapkan paradigma baru mereka, kami menemukan bahwa warga LDII sudah menjadi bagian dari pengurus MUI di Kediri, Soloraya, Tarakan, bahkan Bali. Di wilayah-wilayah itu, warga LDII juga biasa ditemukan menjadi pengurus di banyak organisasi “payung” seperti Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).

Dalam riset kami, beberapa kalangan menilai bahwa LDII lebih rajin berhubungan dengan pemerintah daripada dengan pihak-pihak lain seperti organisasi-organisasi Islam. Meskipun mungkin penilaian ini ada dasarnya, sulit untuk membahas lebih lanjut apa makna penilaian ini, karena masing-masing aktivis organisasi memiliki kesibukan dan skala prioritas mereka sendiri-sendiri. Kita bisa berefleksi dengan misalnya balik bertanya: Apakah para pemimpin atau pengurus organisasi lain seperti NU atau Muhammadiyah juga rajin mengundang pihak-pihak lain untuk memperkuat tali silaturahmi, apalagi pihak-pihak lain itu seperti aktivis LDII yang jumlah pengikutnya lebih kecil dan pernah mereka curigai?

Keterbatasan di atas dapat pula menjelaskan mengapa sementara hubungan para petinggi LDII dengan para petinggi ormas-ormas Islam lain berlangsung baik, kecurigaan terhadap LDII masih ada dan berkembang di kalangan tertentu masyarakat awam. Tampaknya apa yang terjadi di antara para pemimpin atau pengurus organisasi belum sepenuhnya tersosialisasikan kepada masyarakat umum.

Beberapa pihak bersikap skeptis, bahkan cenderung tidak percaya, terhadap niat baik para pengurus LDII ini. Mereka menyebut bahwa para pengurus LDII itu sedang mempraktikkan *taqiyah* (menyembunyikan kepercayaan yang sesungguhnya), atau “lain di mulut, lain di hati”. Terkait hal ini, KH Ma’ruf Amin mempunyai pandangan menarik. Dia

menyatakan:

Taqiyah tidak usah kita urusi. Itu urusan dalam hati mereka. Urusan mereka dengan Allah.... Kalau nanti ada indikasi bahwa hal itu (bahwa janji LDII sudah berubah) hanya akal-akalan, ya kita cabut lagi klarifikasinya. Tapi ketika dia bersungguh-sungguh (mau berubah) ya kita berikan (kesempatan). Masa kita mau membelah dadanya. (Dikutip dalam Setiawan, Nurhadi & Anasy, 2008: 41)

Saran di atas adalah saran yang paling realistis dan dampaknya positif bagi hubungan di antara warga negara dalam sistem demokratis. Hubungan itu makin baik jika dapat meningkatkan sikap saling percaya (*trust*) di antara warga negara, yang menjadi modal penting bagi terbangunnya kerjasama dan upaya-upaya binadamai.

5. Peran Perempuan dalam LDII

Patut disayangkan bahwa kelompok perempuan kurang sekali memperoleh perhatian atau perlakuan khusus dari para pengurus LDII, yang hampir semuanya laki-laki. Padahal, jumlah mereka cukup besar dan beberapa di antaranya cukup menonjol dalam bidang tertentu dan terkenal secara nasional. Salah satu contohnya adalah Ida Royani, yang pernah berkarier sebagai penyanyi, salah seorang pelopor perancang busana Muslim di Indonesia, dan pada 2014 sempat ikut sebagai kontestan Pemilu legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketika diangkat sebagai pengurus LDII, peran perempuan hanya mengurus sektor-sektor tertentu yang terkait dengan perempuan, anak, atau kesehatan keluarga. Mereka umumnya berkumpul dalam satu biro yang dinamakan “Biro Pemberdayaan Wanita dan Kesejahteraan keluarga”. Tugas biro khusus di atas adalah menyelenggarakan kegiatan seperti seminar tentang kesehatan perempuan, kandungan, parenting, kesehatan ibu dan bayi, atau tema-tema sejenis, yang hanya terkait dengan kehidupan perempuan atau keluarga.

Dengan mengambil kebijakan seperti ini, LDII sebagai organisasi dakwah sebenarnya potensial kehilangan kesempatan untuk berkembang lebih pesat lagi, karena para pengurusnya menyia-nyaiakan sumber daya manusia yang sebenarnya dapat memberi kontribusi besar kepada kemajuan organisasi. Dalam hal ini, LDII juga belum mengikuti kebijakan pemerintah, yang rencana pembangunan jangka panjangnya antara lain bertujuan “mencapai kesetaraan gender

dan pemberdayaan perempuan, baik tua mau-pun muda.”⁶

6. Membandingkan “Nasib” LDII dan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia

Riset ini juga memungkinkan kami untuk memperoleh penjelasan mengenai perbedaan nasib LDII, seperti dipaparkan di atas, dengan nasib organisasi-organisasi Islam lain yang hingga kini masih dicurigai oleh pemerintah dan masyarakat, khususnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Kecurigaan terhadap kelompok terakhir itu tampak misalnya dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah tahun 2008 (SKB 2008), dari segi pemerintah, dan dalam fatwa MUI mengenai Ahmadiyah yang dikeluarkan pada 1980 dan terus bertahan sampai sekarang, dari segi masyarakat.

Kedua keputusan di atas saling terkait, karena banyak dokumentasi yang memperlihatkan bahwa SKB tentang Ahmadiyah pada 2008 dikeluarkan pemerintah akibat tekanan keras kelompok-kelompok Islam, yang diwakili MUI (lihat misalnya Hasyim, 2023: 273-284; Hicks, 2014). Meskipun demikian, dampak yang dialami kelompok JAI akibat penolakan para penentangannya yang didorong keluarnya SKB di atas berbeda-beda di tempat dan waktu yang berbeda. Misalnya, sementara konflik akibat penolakan terhadap JAI di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2006 mengakibatkan terusirnya banyak warga JAI dari tempat asal mereka, konflik sejenis di Cikeusik, Banten, pada 2011 menyebabkan terjadinya kekerasan yang memakan korban tiga nyawa (Panggabean & Ali-Fauzi, 2014). Di tempat-tempat lain seperti di Kuningan, Jawa Barat, di mana warga JAI jumlahnya cukup besar, hubungan di antara mereka dan kelompok-kelompok lain yang menolak mereka tidak ditandai dengan terjadinya aksi-aksi kekerasan, meskipun ketegangan kadang mewarnai hubungan itu. Akhirnya, harus juga disebutkan bahwa terlepas dari adanya SKB di atas, warga JAI tidak mengalami ancaman kekerasan atau gangguan sama sekali, meskipun rumah ibadah mereka kadang dipermasalahkan, seperti baru-baru ini terjadi di Depok, Jawa Barat.⁷ Keragaman dalam dampak SKB di atas terhadap hubungan di antara warga Ahmadiyah dan mereka yang

⁶ Lihat dokumentasinya dalam Bappenas, “Kesetaraan Gender,” <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5/> (diakses 11 Agustus 2022).

⁷ “Biang Kerok Penyegelan Masjid Ahmadiyah Depok: SKB 3 Menteri,” *Tirto*.id, 26 Oktober 2021, <https://tirto.id/gkJK> (diakses 12 Agustus 2022).

menentanginya ini perlu diperhatikan dalam usaha kita menjelaskan perbedaan nasib warga LDII dan warga Ahmadiyah.

Ada dua faktor yang menjelaskan perbedaan nasib warga LDII dan warga Ahmadiyah di atas. Faktor pertama adalah alasan mengapa kedua organisasi itu pertama-tama dicurigai, yakni ajaran-ajaran Islam yang dipeluk dan diajarkan kedua organisasi itu, yang dianggap bertentangan dengan kecenderungan utama ajaran-ajaran Islam yang dipeluk sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia. Namun, dalam hal ini, penentangan masyarakat Muslim Indonesia terhadap Ahmadiyah kadarnya lebih besar karena organisasi ini antara lain mengajarkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad, pendiri organisasi atau gerakan itu, bukan saja seorang pembaharu, melainkan juga seorang nabi. Masyarakat Muslim Indonesia, yang umumnya beraliran Sunni (Ahlu Sunnah Wal Jamaah), menentang keras ajaran itu karena hal itu dianggap bertentangan dengan ajaran pokok Islam bahwa Muhammad SAW. adalah penutup para nabi (Zulkarnain, 2005: 142). Sementara itu, kecurigaan masyarakat terhadap LDII tidak sebesar di atas karena mereka semua sama-sama beraliran Sunni, tetapi hanya kepada ajaran tertentu dan metode dakwah LDII yang dianggap eksklusif, tertutup, dan kadang meng-*kafir*-kan kelompok Muslim lain. Dengan LDII mengembangkan paradigma baru, unsur-unsur terakhir di atas mulai dihilangkan dan karenanya kecurigaan terhadapnya juga menurun, meskipun sisa-sisanya masih ada.

Namun, meskipun tampak memuaskan, penjelasan berbasis faktor pertama di atas saja tidak cukup. Penjelasan itu tidak sepenuhnya dapat menerangkan mengapa di tempat dan waktu tertentu penolakan terhadap warga Ahmadiyah begitu keras, seperti di Cikeusik pada 2011, padahal di tempat dan waktu yang lain penolakan yang sama tidak sekeras itu, melainkan hanya berbentuk ketegangan seperti di Kuningan atau protes atau penyegelan terhadap masjid Ahmadiyah di Depok.

Faktor kedua yang dapat melengkapi penjelasan di atas adalah seberapa kuat atau besar sumber daya yang ada pada masing-masing organisasi LDII dan JAI, yang menjadi landasan bagi perhitungan para penentanginya untuk menjadikan mereka sebagai target aksi-aksi diskriminasi atau tidak. Dalam hal ini, sumber daya LDII jelas lebih besar dibanding sumber daya JAI. Meskipun mungkin JAI lebih diuntungkan di tingkat global karena memiliki jaringan internasional, namun LDII sudah berkembang pesat dengan cabang yang mencakup

seluruh Indonesia, bahkan dunia, dengan banyak “teman” atau “pelindung” di berbagai tingkat dan sektor pemerintahan. Faktor ini pulalah yang dapat menjelaskan mengapa warga Ahmadiyah di Kuningan tidak diserang para penentangannya, seperti yang dialami warga Ahmadiyah di Cikeusik, yang komunitasnya sangat kecil dan terpencil. Pada saat yang sama, faktor ini pulalah yang menjelaskan mengapa negara, khususnya aparat keamanan, memutuskan untuk sungguh-sungguh mencegah terjadinya aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok tertentu, yang sebenarnya menjadi kewajiban utamanya, atau tidak menggubrisnya dan mengabaikannya (Panggabean & Ali-Fauzi, 2014: 307-320). Dengan kata lain, seperti dirumuskan Ricklefs, “dalam kasus LDII [berbeda dari kasus Ahmadiyah], sasarannya terlampaui besar, sehingga biaya yang diakibatkan bila terjadi kekerasan sosial pun akan jauh lebih tinggi” (Ricklefs, 2012: 325).

Terlepas dari itu, fakta di atas tidak berarti bahwa warga Ahmadiyah tidak bisa dan tidak perlu mengambil pelajaran dari pengalaman para aktivis LDII dalam upaya-upaya mereka “keluar dari kemelut”. Mereka mungkin perlu mengembangkan sesuatu semacam paradigma baru yang dikembangkan dalam LDII, menjangkau lebih banyak kalangan dalam beragam silaturahmi, sambil menerangkan mengapa mereka sebagai manusia - yakni sesama makhluk Allah - menganut ajaran Ahmadiyah, sebagian besarnya sejak lahir dan bukan karena pilihan sendiri, dan hidup berbahagia karenanya. Pada akhirnya, sementara demokrasi memberi jaminan warga negara untuk memeluk dan menjalankan agama atau kepercayaannya masing-masing, salah satu ajaran Islam paling pokok menyatakan bahwa kebenaran paling akhir hanya ada di tangan Allah.

Kesimpulan Umum dan Penutup

Kami menyimpulkan bahwa keberhasilan relatif LDII “keluar dari kemelut” disebabkan tiga faktor utama. Kami sebut relatif karena prosesnya sangat dinamis dan tergantung dari satu ke lain konteks. Ketiga faktor itu kami jelaskan secara ringkas sebagai berikut.

Pertama, sejak dimulainya periode Reformasi dan berakhirnya rezim Orde Baru pada 1998, para aktivis LDII tidak lagi mengandalkan perlindungan pemerintah (atau kekuatan lain) untuk menjamin hak mereka untuk hidup dan berkembang di Indonesia, berbeda dari pengalaman mereka selama Orde Baru. Karena faktor ini, mereka relatif terbebas dari kecurigaan sebagai “kaki tangan” pemerintah,

terutama Golkar, yang menjadi salah satu mesin kekuasaan pada masa itu. Khususnya pada dekade 1970-an dan 1980-an, kecurigaan ini memainkan peran penting dalam penolakan terhadap mereka oleh ormas-ormas Islam, yang memiliki hubungan yang tidak sehat atau malah saling mencurigai dengan penguasa kala itu. Di bawah era Reformasi, mereka relatif otonom dari campur tangan pemerintah dan sekaligus tidak lagi dimusuhi ormas-ormas Islam akibat asosiasinya dengan pemerintah.

Kedua, pada saat yang sama dan melalui apa yang mereka sebut sebagai “paradigma baru”, para pengurus dan warga LDII secara sadar mulai menjalin hubungan, dialog, dan kerja sama yang baik dengan pihak-pihak lain, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi lainnya. Mereka mulai rajin melakukan apa yang sering mereka sebut dalam percakapan sehari-hari sebagai “silaturahmi”, mengembangkan “budi luhur”, dan menjalankan dakwah yang sejuk dan tidak menyalahkan orang (*green* dakwah). Dengan kata lain, mereka mulai rajin melakukan proses-proses yang dalam perspektif binadamai disebut “membangun jembatan” (*bridging*) dengan pihak-pihak lain. Dalam semua proses ini, dukungan mereka kepada negara sangat jelas dan menonjol, bahkan kepada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

Ketiga, terkait dengan butir pertama dan kedua di atas, para pengurus LDII secara sadar membangun soliditas organisasi, sehingga keutuhannya terjaga dengan rapi dan tanpa riak berarti, dan kaderisasi berjalan dengan jenjang yang jelas dan dijalankan dengan penuh disiplin. Dengan ikatan internal yang kokoh (*bonding*) dan disiplin ke dalam (*internal policing*) yang kuat, para pengurus LDII relatif berhasil menjalankan kedua agenda pertama di atas. Beberapa kalangan akan menyebut proses-proses internal seperti ini sebagai sesuatu yang tertutup, tetapi bukankah hal itu juga berlangsung pada semua organisasi, ketika keputusan-keputusan tertentu sebaiknya diambil dan dijalankan oleh hanya kalangan terbatas tertentu saja?

Akhirnya, riset ini tentu saja ada batas-batasnya. Kami hanya mengandalkan wawancara dengan jumlah narasumber yang terbatas, sebagian besarnya para pemimpin dan bukan orang biasa, observasi sekilas saja, ditambah studi kepustakaan. Temuan-temuannya mungkin akan berbeda atau lebih meyakinkan lagi jika kami misalnya melakukan survei yang lebih luas mengenai keberadaan LDII di seluruh Indonesia atau tinggal lebih lama di beberapa lokasi di mana

LDII berada di tingkat lokal. Namun demikian, kami percaya bahwa temuan-temuan di atas bisa dipertanggungjawabkan akurasi, karena kami sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang tepat untuk riset ini, menanyakannya dan mengumpulkan jawabannya dari para narasumber yang tepat, dan menganalisisnya sebaik yang kami mampu.

Hasil-hasil riset ini dan masukan yang kami sampaikan, baik implisit maupun eksplisit, kami yakini akan bermanfaat bagi warga LDII di mana saja untuk melangkah lebih maju lagi. Bagi organisasi-organisasi lain di luar LDII, khususnya yang masih dirundung masalah penerimaan pihak-pihak lain, pengalaman LDII ini akan berguna sebagai bahan pembelajaran untuk keluar dari jeratan itu dan melangkah menyongsong masa depan bersama yang lebih baik.***

Daftar Rujukan

- Anwar, Marzani. 1989. "Gerakan Islam Jamaah." Dalam Abdul Aziz, Imam Tholkhah, Soetarman (peny.), *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, hal. 21-73. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Azra, Azyumardi. 2013. "Distinguishing Indonesian Islam: Some Lessons to Learn." Dalam Jajat Burhanudin dan Kees van Dijk (peny.), *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations*, hal. 63-74. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Bagir, Zainal Abidin dan Husni Mubarak. 2021. *Kerangka Hukum dan Kelembagaan Tata Kelola Kehidupan Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.
- Bourchier, David M. 2019. "Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism." *Journal of Contemporary Asia* 49 (5): 691-712.
- Dewan Pimpinan Pusat LDII. 2007. *Himpunan Keputusan Munas VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2007*. Jakarta: LDII.
- Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Paramadina.
- Fealy, Greg. 2019. "Reformasi and the Decline of Liberal Islam." Dalam *Activists in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia*, disunting Thushara Dibley dan Michele Ford, hal. 119-133. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Harsono, Andreas. 2012. "Indonesia Is No Model for Muslim Democracy." *New York Times*, 21 May.
- Hasyim, Syafiq. 2023. *The Shariatization of Indonesia: The Politics of the Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI)*. Leiden & Boston: Brill.
- Hicks, Jacqueline. 2014. "Heresy and Authority: Understanding the Turn against Ahmadiyah in Indonesia." *South East Asia Research* 22 (3): 321-339.
- Hilmi, M. 2012. *Pergulatan Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kediri Jawa Timur*. Disertasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Antropologi, Program Studi Pascasarjana, Universitas Indonesia.
- Jaffrey, Sana. 2020. "In the State's Stead?: Vigilantism and Policing of Religious Offence in Indonesia." Dalam Thomas Power dan

- Eve Warburton (peny.), *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?*, hal. 303-324. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Jaiz, Hartono Ahmad (peny.). 1998. *Bahaya Islam Jama'ah Lemkari LDII: Pengakuan Mantan Gembong-gembong LDII*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam.
- (peny.). 2022. *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Lodi, Limas. 2017. "Metamorfosis Gerakan Sosial Keagamaan: Antara Polemik, Desiminasi, Ortodoksi, dan Penerimaan terhadap Ideologi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)." *Al-Tahrir* 17 (1): 227-246.
- Mietzner, Marcus dan Burhanudin Muhtadi. 2019. "The Mobilisation of Intolerance and its Trajectories: Indonesian Muslims' Views of Religious Minorities and Ethnic Chinese." Dalam Greg Fealy dan Ronit Ricci (peny.), *Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia*, hal. 155-174. Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute.
- Panggabean, Rizal dan Ihsan Ali-Fauzi. 2014. *Pemolisian Konflik-konflik Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Yayasan Paramadina.
- PUSAD Paramadina. 2020. "Meninjau Kembali Peraturan Bersama Menteri 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama: Temuan dari Pangkalan Data," Laporan Riset. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.
- Ricklefs, M.C. 2012. *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c. 1930 to Present*. Singapore: NUS Press.
- Setiawan, Habib, Robi Nurhadi dan Muhamad Muchson Anasy. 2008. *After New Paradigm: Catatan Para Ulama tentang LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)*. Jakarta: Pusat Studi Islam Madani Institute.
- van Bruinessen, Martin. 1992. "Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial-Budaya." *Ulumul Qur'an* 3(1): 16-27.
- 2013. "Introduction: Contemporary Developments in Indonesian Islam and the 'Conservative Turn' of the Early Twenty-first Century." Dalam Martin van Bruinessen (peny.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"*, hal. 1-20. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Wahid Institute. 2015. *Monitoring Report on Freedom of Religions in Indonesia*. Jakarta: Wahid Institute. YLBHI. 2020. *Outlook Kebebasan*

Beragama Atau Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Zulkarnain, Iskandar. 2005. *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara).

Bagian II

Laporan dari Lima Wilayah LDII

Bab 2

Pesantren Wali Barokah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Kediri, Jawa Timur

Husni Mubarak

Pengantar

Laporan tentang Pesantren Wali Barokah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kota Kediri, Jawa Timur, ini adalah bagian dari penelitian yang lebih luas mengenai LDII di Indonesia. Riset ini dilakukan dalam rangka 50 tahun LDII. Pertanyaan utama riset ini adalah setelah 50 tahun berdiri, LDII secara umum berhasil keluar dari kemelut sebagai organisasi yang dicurigai tidak sejalan dengan ortodoksi Islam di Indonesia. Bagaimana LDII, khususnya di Kediri Kota, keluar dari kemelut tersebut? Bagaimana peran pesantren Wali Barokah dalam prosesnya? Faktor apa saja yang berperan mendukung LDII di Kediri Kota menjadi bagian tak terpisahkan dari organisasi keagamaan dan pondok Wali Barokah kokoh sebagai satu di antara pondok terbesar di Kediri Kota?

Setidaknya dua tulisan, dalam bentuk disertasi, telah berusaha menjawab pertanyaan di atas. Pertama, *Pergulatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kediri, Jawa Timur* karya Hilmi M (2012). Menurut Hilmi, LDII bertahan karena agensi aktor-aktor organisasinya mentransformasi diri sehingga mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dan memperlebar jaringan agar tidak bergantung kepada aktor negara. Agensi LDII tidak berdiri sendiri. Sayangnya, riset tersebut kurang mengeksplorasi konteks sosial politik yang memungkinkan

daya agensi LDII diterima di Kota Kediri. Untuk menjawab argumen tersebut, Limas Dodi, dosen IAIN Kediri, menulis disertasi dengan judul, *Responss Tokoh Masyarakat Kediri terhadap Ideologi lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)* karya Limas Dodi. Dodi menilai bahwa daya tahan LDII terutama karena tokoh Islam non-LDII Kediri terbelah antara mereka yang resistan dan akomodatif terhadap perubahan LDII. Keterbatasan studi ini adalah mengemati perak aktor di sekeliling LDII Kota Kediri.

Mengisi keterbatasan tersebut, laporan ini menemukan bahwa LDII Kota Kediri keluar dari kemelut karena tiga faktor: (1) Struktur sosial, politik, dan ekonomi Kota Kediri membuka diri kepada minoritas keagamaan; (2) LDII Kota Kediri, didukung pondok Wali Barokah yang bersejarah, menggunakan modal sosial yang dimiliki untuk menyambungkan tali silaturahmi dengan berbagai pihak; dan (3) menggeser wacana dari Islam Jamaah ke LDII berparadigma baru.

Laporan ini terdiri dari lima bagian: Bagian pertama, laporan ini menyajikan demografi Kota Kediri beserta struktur sosial, politik, dan ekonomi yang membuka diri terhadap aneka kelompok minoritas yang di wilayah lain tidak aman. Pada bagian berikutnya, laporan ini memaparkan Pondok Wali Barokah, ikon LDII Kota Kediri dan nasional, yang menopang kelancaran interaksi dengan berbagai pihak. Setelah itu, laporan ini menunjukkan bagaimana LDII Kota Kediri membangun relasi dengan pemerintah kota dan organisasi masyarakat lainnya dengan memanfaatkan aneka sumber daya yang dimiliki. Sebelum penutup, laporan ini mencatat bagaimana LDII meletakkan perempuan dalam pergerakannya.

Demografi Kediri Kota

Demografi Kota Kediri menguntungkan LDII tidak hanya untuk bertahan tetapi tumbuh dan berkembang. Kota Kediri adalah di antara kota tertua di Indonesia, tahun 2022 berulang tahun ke 1.143. Kota ini telah menjadi pusat kota kerajaan Medang. Pada masa penjajahan Belanda, Kota Kediri dinyatakan sebagai swapraja atau kota dengan otonomi khusus yang mana mempunyai dewan kota (terdiri dari delapan orang Belanda, empat pribumi dan seorang Asia Timur) dan kemudian ditetapkan sebagai kota dengan otonomi penuh pada 1928. Penjajah Jepang memperluas cakupan wilayah Kota Kediri seperti saat ini pada 1942. Setelah kemerdekaan hingga saat ini, Kota Kediri merupakan pusat kota, wilayah urban, dan pusat perekonomian.

Saat ini, Kota Kediri adalah satu di antara tiga kota terbesar di Jawa Timur, setelah Kota Surabaya dan Kota Malang, dilihat dari jumlah penduduknya. Dari Kota Surabaya, butuh dua jam perjalanan darat, melalui jalan bebas hambatan, untuk sampai ke Kota Kediri. Luas kota ini adalah 63,40 km² atau satu jam untuk mengelilingi kota ini menggunakan kendaraan roda empat. Kota ini terdiri dari tiga kecamatan: Mojoroto (14 kelurahan), Kota (17 kelurahan), dan Pesantren (15 kelurahan). Penduduk Kota Kediri 286.796 jiwa, terdiri dari 27 persen generasi Z (di bawah 24 tahun), 24 persen generasi millennial (berusia 24-39 tahun), 22,7 persen generasi X (berusia 40-55 tahun), dan 13,9 persen generasi lansia (usia 56-70 tahun). Data ini menunjukkan mayoritas penduduk Kota Kediri adalah usia produktif (generasi Z, millennial, dan generasi X). Pada siang hari, penduduk Kota Kediri bertambah sekitar 30 ribu, karyawan PT. Gudang Garam dari berbagai kota di Jawa Timur, dibanding malam hari.

Mayoritas penduduk Kota Kediri beragama Islam. Penduduk Muslim di Kota ini sebanyak 91,8 persen. Populasi terbanyak kedua adalah penganut Kristen Protestan, yakni 5,5 persen. Penganut agama Katolik sebanyak 2,2 persen, Hindu 0,08 persen, Budha 0,37 persen, lainnya 0,04 persen.¹ Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan Islam paling dominan di Kota Kediri. Mayoritas pondok-pondok besar di Kota Kediri adalah berafiliasi ke NU. Sejumlah kiai di pondok besar di Kota Kediri menduduki jabatan penting di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Secara kelembagaan, boleh dikatakan NU penentu arah kerukunan di Kota Kediri. Tentu hal ini sangat tergantung pada siapa tokoh di baliknya. Semakin peduli pada kerukunan, semakin arah pergerakan komunitas lintas agama di Kota Kediri akan mempertahankan kerukunan. Posisi strategis aneka organisasi keagamaan seperti MUI, PAUB-PK, dan FKUB diketuai oleh tokoh yang berafiliasi dengan NU.

Demografi yang asimetris antara penduduk Muslim dan non-Muslim, juga antara pengikut NU dan non-NU, di atas merupakan modal sosial bagi Kota Kediri menjadi kota yang ramah dan nyaman bagi aneka perbedaan keyakinan dan agama. Dalam dua tahun

¹ BPS, *Kota Kediri Dalam Angka 2021, 2022*, hlm. 168. Perkiraan mengenai penganut agama lainnya di sini kemungkinan merujuk penganut agama leluhur seperti Sapto Dharmo. Sapto Dharmo adalah satu di antara komunitas yang masuk dalam Paguyuban Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (PAUB-PK), organisasi lintas agama yang dibentuk merespons transisi dari Orde Baru ke Reformasi.

terakhir, Kota Kediri masuk 10 besar kota paling toleran (peringkat 8 pada 2020 dan peringkat 10 pada 2021).² Wali kota Kediri menilai masalahnya teknis, bukan realitas lapangan. “Peringkat kami turun semata-mata karena staf kami tidak mengisi formulir yang disediakan Setara Institute dengan cermat dan detail. Mereka mengisi sambil kerja di rumah di masa pandemi,” ungkapnya (Wawancara Abdullah Abu Bakar, 11 April 2022). Pada 2017 misalnya, Kota Kediri menempati peringkat ke-60 pada Indeks Kota Toleran walaupun tidak ada catatan diskriminasi maupun konflik kekerasan keagamaan di kota tersebut. Terlepas dari peringkat, kota ini menyediakan ruang aman bagi kelompok yang paling mendapat tekanan dan kekerasan di Indonesia. Penganut Ahmadiyah, misalnya, tetap dapat secara tenang menjalankan kegiatan keagamaan di masjid at-Taqwa ketika kekerasan menimpa komunitas Ahmadiyah Cikeusik, Banten, pada 2011.³

Capaian tersebut merupakan hasil usaha seluruh komponen di Kota Kediri. Jauh sebelum pemerintah kota mengukuhkan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemangku kepentingan Kota Kediri telah membentuk Paguyuban Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (PAUB-PK) pada 1998. Muhammad Salim, ketua PAUB-PK menjelaskan latar belakang pendirian paguyuban tersebut sebagai berikut,

Paguyuban ini dibentuk dalam rangka menjaga agar Kota Kediri tidak terkena imbas kerusuhan pada 1998 sebagaimana kota-kota lain di Indonesia. *Alhamdulillah*, Kota Kediri aman pada masa kejatuhan rezim Orde Baru tersebut. Sampai sekarang, pertemuan bulanan rutin kami selenggarakan, kecuali pada masa pandemic. Setiap majelis agama berlomba-lomba ingin menjadi tuan rumah, termasuk pesantren Wali Barokah. (Wawancara Muhammad Salim, 11 April 2022).

Pemerintah dan penduduk Kota Kediri menyediakan ruang bagi semua komponen masyarakat untuk tampil dalam perhelatan kota. Kecuali pada masa pandemi, ulang tahun Kota Kediri biasanya

² Lihat Setara Institute, *Indeks Kota Toleran tahun 2020*, hlm. 12, dan Setara Institute, *Ringkasan Eksekutif: Indeks Kota Toleran 2021*, hlm. 4.

³ “Jamaah Ahmadiyah Kediri Tetap Beraktivitas di Tengah Perasaan Trauma,” *Detik.com*, 10 Februari 2011, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1568490/jamaah-ahmadiyah-kediri-tetap-beraktivitas-di-tengah-perasaan-trauma> (diakses 22 Juni 2022).

dimeriahkan oleh aneka kesenian dan doa bersama semua agama termasuk kepercayaan. Semua tampil mendoakan agar Kota Kediri menjadi kota yang nyaman bagi penduduknya. Ahmad Jainudin, Kepala Bagian Kesra menceritakan kontribusi majelis-majelis agama pada masa pandemi sebagai berikut:

Pada 2021, ketika level pembatasan telah longgar, kami menyelenggarakan doa bersama, tetapi tidak berkerumun. Setiap agama dan kepercayaan mengirim tokoh dan sejumlah umat. Mereka berdoa di kelas-kelas di kantor Pemkot Kediri. Wali kota berkeliling untuk mengikuti doa menurut keyakinan masing-masing. Kami fasilitasi kegiatan tersebut. (Wawancara Ahmad Jainudin, 12 April 2022)

Kota Kediri juga merupakan daerah tidak tercatat berita aksi main hakim sendiri oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Aksi main hakim sendiri kebanyakan dilakukan masyarakat terhadap kejadian kriminal di pasar, penjabretan, atau tabrak lari. Menurut Kus Sumardi, Kabag Sumber Daya Manusia, yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat, Polres Kediri, aksi kekerasan paling banyak terjadi antarperguruan silat. Setidaknya, 15 perguruan silat tergabung dalam Ikatan Perguruan Silat Indonesia (IPSI) Kota Kediri. “Perselisihan antarpengikut perguruan silat beberapa kali terjadi, walau tempat kejadian di luar Kota Kediri. Namun, ikrar damai diselenggarakan di Kota Kediri mengingat markasnya ada di sini,” lanjutnya (wawancara Kus Sumardi, 12 April 2022). Organisasi kepemudaan yang di wilayah lain dikenal terlibat aksi kekerasan berwajah berbeda di Kota Kediri. Sebagai contoh, Polresta Kediri bekerja sama dengan Pemuda Pancasila menyalurkan bantuan Sembilan bahan pokok bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.⁴

Kota Kediri juga adalah kota industri. Faktor ini turut menunjang Kota Kediri menjadi kota toleran dan ramah bagi aneka perbedaan. Perusahaan Gudang Garam menyumbang 70 persen pendapat daerah Kota Kediri. Selain itu, penduduk Kota Kediri dan kota penyangganya bergantung pada perusahaan tersebut. Semua pihak berkepentingan menjaga Kota Kediri kondusif. Situasi tidak aman, akibat kekerasan

⁴ “Polres Kediri Kota Bareng Pemuda Pancasila Bagikan Bantuan Paket Sembako”, *Tribunnews.com*, 24 Agustus 2021, <https://jatim.tribunnews.com/2021/08/23/polres-kediri-kota-gandeng-pemuda-pancasila-bagikan-bantuan-sembako-untuk-warga-terdampak-covid-19> (diakses 22 Juni 2022).

atau berita buruk lainnya, dapat mengganggu perjalanan bisnis perusahaan maupun pihak-pihak yang menggantungkan nasibnya kepada perusahaan tersebut. Dukungan terhadap stabilitas Kota Kediri juga datang dari pondok pesantren. Menurut Muhamad Salim, hubungan pesantren dengan pabrik rokok tergolong unik. Mayoritas pesantren NU tentu mendukung pabrik rokok karena merokok adalah bagian dari keseharian pesantren. "Pesantren bahkan ikut berdoa ketika pendiri perusahaan Gudang Garam meninggal dunia," ungkapnya (wawancara Muhammad Salim, 11 April 2022).

Data di atas memperlihatkan bahwa demografi Kota Kediri merupakan faktor penunjang LDII bertahan dan berkembang di kota ini. Pengalaman sebagai kota lebih dari seribu tahun, relasi antarkelompok masyarakat yang terbiasa dengan perbedaan, minimnya aksi main hakim sendiri oleh kelompok ormas, dan kebutuhan akan kota aman demi menjaga stabilitas perniagaan merupakan situasi terbaik bagi LDII Kota Kediri mengembangkan diri. Faktor eksternal tidak bermakna bila situasi di dalam kelembagaan LDII tidak solid. Untuk mengurai faktor internal, bagian berikutnya akan mendiskusikan Pondok Pesantren Wali Barokah.

Pondok Pesantren Wali Barokah

Cikal Bakal Wali Barokah

Tidak lengkap mendiskusikan LDII Kota Kediri tanpa menguraikan peranan pondok pesantren Wali Barokah. Pondok Wali Barokah merupakan cikal bakal gerakan pemurnian Islam yang kemudian bertransformasi menjadi LDII. Sebagai cikal bakal, pondok ini tidak bisa dipisahkan dari sosok Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis bin Abdul bin Thahir bin Irsyad (selanjutnya Nur Hasan). Nur Hasan lahir di Desa Bangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada 1908 (sumber lainnya, 1915). Semasa remaja, ia pernah *mondok* di beberapa pesantren di Jawa Timur, di antaranya Pondok Pesantren Semelo Perak Jombang, Tebu Ireng Jombang, Termas Pacitan, Batuampar Madura dan lain-lain, termasuk Pondok Pesantren Lirboyo. Ia kemudian pergi ke Mekkah untuk menjalankan ibadah haji sekaligus belajar pada 1930. Ia menetap cukup lama di Mekkah setelah kembali sebentar ke tanah air. Di sana ia meyakini bahwa sumber hukum Islam hanya Al-Qur'an dan hadis. Konon ia menguasai qiroah sab'ah (tujuh jenis cara baca-Al-Qur'an) dan menguasai 49 kitab hadis. Atas penguasaannya itu, ia kemudian merumuskan ajaran Islam yang murni dan bersih dari

tafsir yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an maupun praktik Nabi sebagaimana dikumpulkan dalam hadis.⁵

Ajaran Nur Hasan tidak populer di kampung halamannya. Ia ajarkan keyakinannya mengenai ajaran Islam yang murni kepada keluarga. Ia juga ajarkan kepada saudara dan tetangga di kampung sekembali dari Mekkah. Ia tidak diterima saat itu. Ia kemudian pindah ke Gading Mangu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada 1951. Di sana, ia mendapat dukungan dari Kepala Desa yang juga masih keluarga yang ikut memercayai ajaran Nur Hasan sebagai kebenaran. Di Gading Mangu, para pengikutnya berbaiat untuk setia kepada dan mendaulat Nur Hasan sebagai pemimpin spiritual sekaligus organisasi.⁶ Ia saat itu menamai majelis taklimnya sebagai *Jamaah Quran dan Hadits*.

Dua tahun berselang, tepatnya 1953, Nur Hasan kembali ke Kediri. Ia merintis dan mendirikan pengajian di Burengan, Kota Kediri. Di Pondok pesantren ini, Nur Hasan mentransformasi organisasi *Jamaah Quran dan Hadis* menjadi *Islam Jamaah*. Sebagai gerakan, anggota *Islam Jamaah* semakin banyak dan tersebar di berbagai wilayah di Kediri dan beberapa kabupaten lainnya. Selain masyarakat umum, sejumlah ulama dan pimpinan pondok pesantren menyatakan bai'at kepada wNur Hasan. Santri dan masyarakat di sekitar pesantren ikut berikrar atas kepemimpinan Nur Hasan. Dia dikenal sebagai orang kaya karena di samping kediamannya ada beberapa kios yang disewakan dan beberapa rumah bertingkat. Menurutnya, semuanya itu merupakan wakaf untuk perjuangan Islam sehingga anak keturunannya tidak dapat mewarisi semua harta tersebut kecuali menempati sebagaimana anggota jamaah lainnya.⁷

Selain ilmu agama, Nur Hasan juga dikenal sebagai sosok yang menyenangkan ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan. Sebagian orang mengikrarkan dirinya setia dan mengikuti jalan pikiran Nur Hasan karena kepiawaiannya dalam ilmu kanuragan. Menurut Ikhwan Abdillah, satu di antara kiai di Pondok Wali Barokah, beberapa tokoh pesantren di Jombang mengikuti Nur Hasan setelah mengakui keunggulan ilmu kebatinannya (wawancara Ikhwan Abdillah, 09 April 2022). Tetapi, lebih dari itu, Nur Hasan juga dikenal sebagai sosok yang sabar dan terbuka untuk berdiskusi dengan siapa saja yang ingin

⁵ Lihat, Hilmi, *Perulatan Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kediri Jawa Timur*, 2018, hlm. 64-67.

⁶ Anwar, "Gerakan Islam Jamaah," 1991, hlm. 23

⁷ Anwar, "Gerakan Islam Jamaah," 1991, hlm. 25.

mengetahui ajarannya. Dia selalu memukau dalam aneka perdebatan publik. Banyak orang yang hendak mengklarifikasi mengenai ajarannya berujung ikrar kesetujuan dan kesetiaan kepada ajarannya.

Pemerintah Melarang Islam Jamaah/Darul Hadis

Ajaran Nur Hasan mendapat tantangan dari berbagai pondok, khususnya berbasis NU. Mereka menilai ajaran Nur Hasan menyimpang dari ajaran Islam. Aneka tuduhan bermunculan. Misalnya, ajaran Nur Hasan mewajibkan baiat kepada pengikutnya sebagai tanda kesetiaan kepada pemimpin spiritual sekaligus pemimpin gerakan. Kepasrahan tidak hanya dalam ibadah ritual seperti salat, tetapi juga dalam kehidupan sosial lainnya. Tuduhan lainnya adalah bahwa Nur Hasan mengajarkan belum Islam mereka yang tidak berbaiat. Sebagai konsekuensi, mereka tidak dapat menjadi imam dalam beribadah. Tuduhan mengenai kesesatan Islam Jamaah mengemuka dan menarik perhatian pemerintah. Setelah menerima surat dari Menteri Agama, Departemen Dalam Negeri, Kepolisian, Kejaksaan Tinggi di beberapa kota, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melarang Islam Jamaah pada 29 Oktober 1971.

Sosok Nur Hasan dan pondok Wali Barokah sebetulnya memiliki hubungan cukup unik dengan pemerintah. Tiga bulan sebelum putusan Kejaksaan Agung tentang Islam Jamaah, Nur Hasan dan pondok Wali Barokah adalah dikenal sebagai pendukung Golkar (Golongan Karya) cukup terbuka pada pemilu Juli 1971. Artinya, mereka yang secara terang-terangan berkampanye untuk memenangkan Golkar melalui kampanye menggunakan motor gede (moge) di masa kampanye. Kampanye terbuka ini ia lakukan di tengah masyarakat Jawa Timur, khususnya Kediri, umumnya mendukung Partai Persatuan Pembangunan (P3) dan sebagian kecil Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dukungan terhadap partai Golkar tidak mampu menghentikan keputusan Kejaksaan Agung untuk melarang Islam Jamaah, yang dipelopori Nur Hasan.

Pelarangan terhadap Islam Jamaah bukanlah akhir dari keberadaan Pondok Wali Barokah.⁸ Pondok Wali Barokah mula-mula bernama Pondok Burengan-Banjara, Kediri. Pada 1981, LEMKARI yang resmi berkantor pusat di Jakarta mengubah nama pondok ini menjadi pondok pesantren LEMKARI. Mubes 1990 mengubah nama organisasi

⁸ Lihat “Sejarah Singkat Pondok Pesantren Wali Barokah,” *Walibarokah.org*, diakses pada 17 Mei 2022.

dari LEMKARI menjadi LDII, dan penamaan pesantren pun berubah menjadi Pondok Pesantren LDII. Pada 2010, pondok ini kemudian diserahkan kepada Yayasan Wali Barokah sebagai payung hukum dan memiliki kemandirian dalam menjalankan organisasi. Nama pondok ini pun berubah menjadi Pondok Wali Barokah. Secara kelembagaan, pesantren ini bukan di bawah DPP LDII, melainkan lembaga independen di bawah payung Yayasan Wali Barokah. Meski secara organisasi mandiri, tetapi dari segi pemikiran LDII tidak bisa dipisahkan dari pondok Wali Barokah karena transfer pengetahuan keislaman anggota dan pengurus LDII se-Indonesia menginduk kepada pondok Wali Barokah.

Sejak 1972, Nur Hasan tidak aktif memimpin pondok karena kesehatannya menurun. Pondok ini kemudian dikelola secara kolektif melalui Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI). Yayasan ini merupakan payung bagi Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI). Pondok Pesantren Wali Barokah kemudian dipimpin secara berturut-turut oleh Drs. Bachroni Hertanto (1972-1985), H. Abdurrohman (1985-1990), K. H. Manshur, S.H. (1991-2001), K.H. Kuncoro Kaseno Abdullah Thohir (2001-2009) dan saat ini dipimpin K.H. Sunarto, M.Si (2009-).⁹ Transformasi organisasi payung menyelamatkan pondok pesantren bertahan dan bertumbuh sebagai pusat pengkajian Islam bagi pengikut LDII di Indonesia saat ini.

Keunikan Wali Barokah sebagai Pondok

Pondok Wali Barokah tergolong unik dibanding pondok-pondok lainnya di Indonesia. Di antara keunikan pondok ini adalah tidak dipimpin kiai, melainkan seorang manajer. Sebagaimana telah diuraikan, pondok ini bukan milik keluarga yang kepemimpinan turun temurun. Pondok ini dikelola secara kolektif kolegial. Sempat dikelola organisasi, per tahun 2010 pondok ini berada di bawah pembinaan yayasan terpisah dari LDII pusat. Organisasi atau yayasan menentukan kualifikasi seorang pimpinan pesantren. Sunarto, pimpinan Wali Barokah saat ini, sebagai ilustrasi. Ia diminta memimpin Wali Barokah setelah pensiun pada 2009. Dia berlatar belakang pendidikan ilmu pemerintahan. Dia telah menjadi pegawai negeri sipil sejak 1977, dan sebelum pensiun jabatan terakhir adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sunarto mengisahkan pengalamannya sebagai pimpinan pondok sebagai berikut,

⁹ Lihat, Hilmi, *Pergulatan Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kediri Jawa Timur*, 2018, hlm. 68.

Barangkali pengalaman saya menjadi pimpinan di birokrasi sebagai pertimbangan kenapa pihak Yayasan mempercayakan kepemimpinan pondok Wali Barokah kepada saya. Saya menerima dengan rida. Saya anggap inilah bentuk pengabdian saya kepada nusa, bangsa, dan agama. Musyawarah rutin minimal seminggu sekali untuk mengurai persoalan dan mencari solusinya dengan dilandasi rasa kebersamaan dan amal sholih adalah kunci bagaimana pondok tetap solid. (Wawancara Sunarto, 09 April 2022)

Keunikan lain pondok Wali Barokah dilihat dari sistem pendidikannya. Pondok ini hanya menerima santri yang hendak mendalami ilmu keislaman. Tidak ada pendidikan formal seperti SMP atau SMA di pondok ini. Sejauh ini, pondok ini tidak menerima santri nonanggota LDII. Setiap santri di Pondok Wali Barokah wajib menyelesaikan pendidikan selama 1,5 tahun. Setiap santri harus lulus lima level kelas: *Pegon, Bacaan, Lambatan, Cepatan, dan Saringan*. Umumnya, setiap santri akan menyelesaikan dalam 18 bulan karena sebelum masuk ke Pondok Wali Barokah, mereka umumnya telah belajar semua materi di masjid atau di pondok mini milik jamaah LDII. Selain lima kelas tersebut, santri juga akan belajar berkelompok berdasarkan kompetensi individu, yakni di kelas *Hidayatul Mustafid*. Anak-anak LDII pada dasarnya akan belajar materi di lima kelas tersebut di masjid masing-masing sejak dini. Mereka akan diajari materi tersebut oleh alumni pondok Wali Barokah yang telah berijazah. Mereka yang bercita-cita menjadi *mubalig* dan *mubalighah* akan melanjutkan pendidikan di Pondok Wali Barokah. Keunikan lainnya, tidak ada awal dan akhir tahun pembelajaran. Setiap bulan Pondok Wali Barokah menerima santri baru dan meluluskan santri lama. Dengan siklus penerimaan santri tersebut, Wali Barokah setiap bulan dihuni setidaknya 3.000 santri dari berbagai wilayah di Indonesia.

Kurikulum di Pondok Wali Barokah mengalami perkembangan. Pada masa awal (1950-1972), pondok ini mengajarkan akidah, praktik ibadah, amalan doa sehari-hari. Hampir semua pembelajaran di pondok fokus pada ilmu agama. Pada periode ini, kumpulan Al-Qur'an dan hadis dibagi menjadi: *Kitabus Sholah* (bab tentang salat), *Kitabus Sholatin Nawafil* (bab tentang salat-salat sunah), *Kitabul 'Ilmi* (bab tentang wajibnya mencari ilmu), dan *Kitabud Da'awat* (bab tentang doa-doa). Periode kedua (1972-1990), setelah dikelola LEMKARI, pondok tidak hanya mengajarkan ilmu keagamaan saja, tetapi

juga wawasan kebangsaan. Sedangkan untuk pendidikan formal disediakan dalam bentuk Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustha/SMP dan tingkat Ulys/SMA dengan sistem *boarding school*. Periode ketiga (1990-sekarang), kumpulan Al-Qur'an dan hadis berkembang menjadi beberapa bab tambahan: *Kitabul Adab* (bab tentang budi pekerti), *Kitabus Sifati Janna wa Nar* (bab tentang keadaan surga dan neraka), *Kitabul Ahkam* (bab tentang hukum-hukum agama Islam), *Kitabul Janaiz* (bab tentang jenazah), *Kitabul Adillah* (bab tentang dalil-dalil), *Kitabus Shoum* (bab tentang puasa), *Kitabul Jihad* (bab tentang cerita-cerita perjuangan umat Islam jaman nabi), *Kitabul Hajji* (bab tentang dalil-dalil haji), *Kitabul Manasikil Hajji* (bab tentang tata cara haji) dan *Kanzil Umal* (bab tentang kepemimpinan dan tata cara membina umat Islam menurut Nabi).

Pemikiran utama Pondok Wali Barokah, dan LDII secara keseluruhan, adalah Al-Qur'an dan hadis. Ajaran pokok Islam terdapat dalam dua sumber tersebut. Seluruh praktik ritual keagamaan dalam Islam harus bersumber pada dua rujukan tersebut. Empat metode tafsir menurut ulama LDII, yang tergabung dalam Majelis Taujih, secara berurutan sebagai berikut: (1) Ayat (Al-Qur'an) dengan ayat (Al-Qur'an); (2) Ayat (Al-Qur'an) dengan hadis; (3) Ayat (Al-Qur'an) dengan ijma' para sahabat; dan (4) Ayat (Al-Qur'an) dengan ucapan sahabat.

Metode tafsir pertama, ayat dengan ayat adalah ajaran Islam paling tinggi. Doktrin Islam paling utama bila tertulis secara jelas dalam Al-Qur'an dan ditafsirkan dengan ayat lain dalam Al-Qur'an. Bila tidak ada tafsir dalam ayat lain, maka cari bagaimana hadis menjelaskan ayat tersebut. Bila tidak ada dalam hadis, cari bagaimana sahabat nabi bersepakat memaknai ayat tersebut. Bila tidak ada juga, maka cari ucapan sahabat yang menjelaskan ayat tersebut. Ikhwan Abdullah, salah seorang kiai di Pondok Wali Barokah menjelaskan mengenai tafsir sebagai berikut:

Sebetulnya, para ulama merujuk pada beberapa kitab tafsir, seperti tafsir *Ibnu Katsir*. Tetapi, umat tidak perlu dibuat ribet dengan mengetahui terlalu detail. Kita himpun saja dalam kumpulan Al-Qur'an dan hadis yang sudah kami telusuri sampai kepada Nabi Muhammad. Warga terima jadi saja. Mereka tinggal menjalankan dalil Al-Qur'an dan hadis yang sudah dipilihkan secara ketat oleh guru-guru terdahulu. (Wawancara Ikhwan Abdillah, 09 April 2022)

Metode penafsiran yang dikembangkan LDII, dan diajarkan di Wali Barokah, senada dengan model penafsiran kalangan salafi. Semuanya bermuara pada Al-Qur'an, hadis, ijma' sahabat, dan ucapan sahabat. LDII dan salafi tidak menerima ijma' ulama dan qiyas sebagai metode penafsiran yang menjadi hukum Islam. Ijma' ulama tidak dimungkinkan karena Islam sudah menyebar ke seluruh dunia. Sementara qiyas sudah keluar dari ketentuan Al-Qur'an dan hadis itu sendiri. Betapa pun mirip dari segi metode penafsiran, LDII memiliki pemahaman yang berbeda dengan kelompok salafi dalam beberapa hal. Misalnya, kepemimpinan perempuan. Semua sepakat bahwa perempuan tidak dapat menjadi imam salat. LDII dan salafi juga berbagi pemahaman bahwa *kholifah* seharusnya adalah perempuan. Menurut Ikhwan Abdillah, salah seorang kiai di Pondok Wali Barokah, perempuan bisa menjadi pemimpin politik karena Indonesia bukan negara Islam atau khilafah. "Indonesia negara demokratis. Di dalam demokrasi, perempuan sama-sama berhak dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin, selama mereka dinilai kompeten," tambahnya (Wawancara Ikhwan Abdillah, 09 April 2022). Paparan Ikhwan tersebut berbeda dengan beberapa kelompok salafi yang dengan tegas menyatakan bahwa pemimpin utama, termasuk negara dan pemerintahan, adalah laki-laki.¹⁰

Bagaimana ulama di Wali Barokah menjelaskan tentang konsep *amir*. Konsep amir merujuk pada ayat mengenai ketaatan kepada Allah, Rosul, dan *ulil amri* (pemimpin). *Amir* di sini merujuk kepada pemimpin baik di pemerintahan maupun di organisasi. Seluruh anggota LDII wajib taat kepada pemimpin negara yang telah terpilih secara demokrasi. Menurut Sunarto, "Coba Anda cari di mana LDII melakukan demonstrasi menolak kebijakan pemerintah? Tidak ada, dan tidak akan ada." (Wawancara Sunarto, 09 April 2022). Konsep *amir* lainnya adalah pemimpin organisasi di internal LDII. Seorang pemimpin di setiap tingkatan adalah hasil musyawarah atau kesepakatan bersama, bukan penunjukan. Kesepakatan dalam penentuan ketua di semua level disebut sebagai '*amrun jami'* atau keputusan bersama. Sunarto selaku pimpinan pondok bagaimana seharusnya jamaah merespons hasil musyawarah, sebagai berikut:

Setiap keputusan diambil, siapa pun yang sempat tidak setuju harus mengikuti keputusan tersebut. Misalnya,

¹⁰ "Dalam Agama Islam, Wanita Tidak Diperbolehkan Menjadi Pemimpin | Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas", *Youtube.com*, <https://www.youtube.com/watch?v=bZ5ak8d72Y> (diakses 14 Juni 2022).

pemilihan ketua pengurus cabang. Dalam musyawarah terjadi perdebatan untuk menentukan siapa ketua. Perdebatan bisa alot dan panjang. Namun, semua pihak harus menerima keputusan akhir dari musyawarah tersebut. Bukan hanya penentuan ketua organisasi, tetapi semua urusan. (Wawancara Sunarto, 09 April 2022)

Dalam konteks itulah, anggota LDII harus taat kepada *amir*, atau ketua organisasi di semua level. Mereka meyakini bahwa amir organisasi juga tidak akan membuat keputusan sendiri. Setiap masalah akan diselesaikan secara musyawarah bersama pengurus harian.

LDII di Indonesia tidak menganjurkan jamaahnya merokok. Merokok bagi mereka tidak haram, tetapi dianggap perbuatan sia-sia. Jamaah LDII yang percaya dengan ajaran tersebut tidak akan merokok. Sementara itu, pabrik Gudang Garam adanya di Kota Kediri. Bagaimana hukumnya jamaah LDII bekerja di pabrik rokok. Jamaah LDII diperbolehkan bekerja di pabrik rokok kecuali pada bidang pembuatan rokok dan mendistribusikan. Bila bekerja sebagai satpam, penjaga kebun, atau unit lainnya yang bukan bagian produksi dan pemasaran rokok tidak apa-apa.

Hubungan kelembagaan DPP LDII dan Wali Barokah

Hubungan kelembagaan Pondok Wali Barokah dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII berubah-ubah. Sesaat setelah Islam Jamaah dinyatakan terlarang, Pondok Burengan (nama sebelum Wali Barokah) dikelola oleh Yayasan yang menaungi LEMKARI. Saat itu, orang mengenai pondok Burengan sebagai salah satu unit dari lembaga tersebut. Ketika LEMKARI berubah menjadi LDII pada 1990, pondok Burengan berubah menjadi Pondok Pesantren LDII di bawah tanggung jawab DPP LDII. Pondok ini kemudian berubah menjadi Pondok Wali Barokah dan berada di bawah Yayasan Wali Barokah pada 2010. Sejak saat itu, hubungan Pondok Wali Barokah dengan DPP LDII bersifat koordinatif dan saling menopang satu sama lain.

Kaderisasi jamaah LDII nasional secara formal dilakukan di Pondok Wali Barokah. Roh organisasi LDII adalah ajaran keagamaan memiliki keunikan dari organisasi keagamaan Islam lainnya. Seluruh *mubalig* dan *mubaligah* LDII mendapat lisensi untuk mengajar di pondok-pondok mini (sebutan untuk pondok pesantren kecil LDII), dan masjid-masjid baik tingkat cabang atau anak cabang se-Indonesia. Setiap bulan, Wali Barokah meluluskan 800-1000 orang yang akan menjadi *mubalig* dan

mubaligah muda dan mengajar di masjid-masjid dan pondok-pondok mini milik LDII di Indonesia. Selain pondok Wali Barokah, kini DPP LDII telah mendirikan pondok Minhaajurrosyidiin untuk memberi lisensi kepada *mubalig* dan *mubaligah* yang akan mengabdikan di Indonesia bagian barat sementara Pondok Wali Barokah memberi surat tugas untuk mereka yang akan mengabdikan di Indonesia bagian timur.

Pondok Wali Barokah juga menjadi markas bagi lembaga kajian DPP LDII, atau Majelis Taujih Wal Irsyad. Majelis ini menganalisis dan memilih ayat dan hadis mana yang paling kuat dilihat dari periwayatannya (khususnya untuk hadis) yang akan menjadi rujukan untuk menjawab masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Mereka menggunakan metode yang disebut *mankul*, pemilihan ayat dan hadis yang dilakukan guru-guru terdahulu, yang telah diyakini kesahihannya. Mereka percaya bahwa para guru terdahulu memiliki otoritas untuk mempelajari dan memilih ayat dan hadis mana yang periwayatannya sampai kepada Nabi Muhammad. Setiap perbedaan pendapat dan perdebatan akan diselesaikan di majelis tersebut. Hasil akhir majelis tersebut akan menjadi pegangan bagi LDII se-Indonesia.

Hubungan MUI dan LDII: Pengalaman Pusat dan Kota Kediri

Pada 2005, DPP LDII mengajukan audiensi dengan MUI. Saat itu, Komisi Fatwa MUI di bawah kepemimpinan Ma'rif Amin menerima kunjungan tersebut. DPP LDII menyampaikan sembilan poin klarifikasi mengenai tuduhan yang dialamatkan kepada LDII selama ini. Setelah membaca klarifikasi tersebut, MUI menggelar rapat Komisi Fatwa yang membahas klarifikasi LDII tersebut pada 4 September 2006. Komisi fatwa pada hari itu juga mengambil keputusan bahwa MUI menerima klarifikasi tersebut dan menyatakan bahwa LDII telah menganut paradigma baru; LDII bukan kelanjutan Islam Jamaah atau Darul Hadis; LDII tidak menggunakan apa pun sistem ke-*amir-an*; LDII tidak menganggap umat Islam di luar organisasinya kafir atau najis; LDII bersedia, sebagaimana ormas-ormas lainnya, mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana yang ditetapkan MUI. Selain menerima, MUI juga menyarankan agar klarifikasi ini juga dilakukan ditingkat daerah, serta menyelenggarakan musyawarah nasional agar menjadi keputusan organisasi dan dipatuhi oleh seluruh anggota LDII di Indonesia.

Fatwa MUI tersebut segera beredar di Indonesia. Sejak saat itu, Wali Barokah menjadi tempat di mana ulama dari berbagai daerah melihat

dari dekat paradigma baru sebagaimana dinyatakan MUI pada 2006. MUI dan ulama dari daerah lain belakangan mengunjungi Pondok Wali Barokah. MUI Kabupaten Malang misalnya mengunjungi Pondok Wali Barokah pada Mei 2015.¹¹ Sementara itu, MUI pusat mengunjungi pondok Wali Barokah pada Juni 2021. Saat itu, K.H. Marsudi Syuhud memberikan tausiah kebangsaan di pondok tersebut. Melengkapi kunjungan itu, untuk pertama kali, salat Jumat di pondok Wali Barokah dipimpin oleh non-LDII. Bertindak sebagai imam adalah Ahmad Subakir, rektor IAIN Kediri, dan khatib Ali M Abdillah, Sekretaris Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI pusat.¹²

Di Kota Kediri, pengurus LDII telah menjadi anggota MUI sejak 1990, jauh sebelum klarifikasi DPP LDII ke MUI. Saat itu, tiga orang menjadi pengurus MUI mewakili LDII. Sejak saat itu, LDII selalu punya wakil di MUI Kota Kediri, namun jumlahnya menyusut. Saat ini, wakil LDII hanya seorang, yakni Usman Arif. Usman mengusulkan untuk regenerasi wakil LDII di MUI. MUI menolak dan mempertahankan Usman Arif sebagai wakil LDII di MUI Kota Kediri. Menurut Usman, alasan utama kenapa LDII Kota Kediri diterima MUI Kota Kediri adalah kedekatan personal. Pengurus MUI Kota Kediri telah lama menerima bahwa LDII sama dengan organisasi Islam lainnya, dan bukan wujud baru Islam Jamaah (Wawancara Usman Arif, 03 Agustus 2022).

Selain MUI, pengurus LDII juga telah menjadi pengurus Baznas Kota Kediri dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Kediri sejak sebelum fatwa MUI pusat keluar tahun 2006. Baznas baru akan pergantian kepengurusan pada 2022. Baznas belum menginginkan kader baru dari LDII untuk menggantikan Usman Arif, yang kini masih mewakili LDII Kota Kediri. Sementara itu, DMI telah setuju bahwa di kepengurusan berikutnya bisa diwakili generasi yang lebih muda, yang ada di kepengurusan DPD LDII Kota Kediri.

Pondok Wali Barokah menjadi tempat andalan DPD LDII Kota Kediri bila menjadi tuan rumah pertemuan lintas komunitas keagamaan di Kota Kediri. PAUB-PK dan FKUB, organisasi lintas

¹¹ “Silaturrohim Ulama dan Tokoh Agama Kabupaten Malang ke Ponpes LDII Wali Barokah dan Ponpes Budi Utomo” *Nuansaonline*, tanpa tanggal, <https://nuansaonline.net/silaturrohim-ulama-dan-tokoh-agama-kabupaten-malang-ke-ponpes-ldii-wali-barokah-dan-ponpes-budi-utomo/> (diakses 27 Juli 2022).

¹² “Pertama Sejak 70 Tahun, Imam Khatib Masjid Pusat LDII dari Kalangan Luar”, *mui.od.id*, 21 Juni 2021, <https://mui.or.id/berita/30288/pertama-sejak-70-tahun-imam-khatib-masjid-pusat-ldii-dari-kalangan-luar/> (diakses 27 Juli 2022).

agama dan keyakinan menyelenggarakan pertemuan bulanan. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Kediri selalu menjadi pilihan sebagai tuan rumah pertemuan tersebut. Selain dapat menampung lebih dari 500 orang, juga paling memungkinkan dari ketersediaan ruang parkir di lingkungan pondok. Menurut Muhammad Salim, “Beberapa kiai bahkan bercerita mengenai bagaimana relasi leluhurnya dengan kiai Nur Hasan di masa silam. Mereka memuji relasi keduanya dan mengajak untuk melanjutkan relasi tersebut” (Wawancara Muhammad Salim, 11 April 2022).

Pondok juga memfasilitasi pelaksanaan program-program pemerintah Kota Kediri. Selama pandemi Covid-19, Pondok Wali Barokah mengikuti instruksi pemerintah, mulai dari pengurangan aktivitas berkerumun, tes antigen bagi santri dan pengajar, dan vaksinasi. Sementara beberapa pihak, termasuk pondok pesantren masih ragu menerima program vaksin, pondok Wali Barokah menyatakan siap menerima program pemerintah tersebut. Pemerintah tinggal datang membawa petugas dan vaksin. Kebutuhan proses vaksinasi telah disediakan pesantren, seperti konsumsi, peralatan, tenda, dan lainnya. Pondok juga menyediakan santri sebanyak yang diperlukan pemerintah. Pondok Wali Barokah mendukung program pemerintah karena percaya pemerintah bermaksud baik bagi umat, bukan mencelakai. LDII juga cukup ketat menerapkan kewajiban mengikuti ulama dan ulil amri atau pemerintah. LDII sudah pasti mendukung kebijakan negara, atau setidaknya tidak protes terhadapnya.

Sampai di sini tampak bahwa pondok Wali Barokah merupakan modal sosial bagi DPD Kota Kediri membangun relasi dengan komunitas lintas agama, lintas profesi, serta pemerintah. DPD Kota Kediri misalnya sering kali menerima tamu-tamu dari berbagai lembaga Kota Kediri di Pondok Wali Barokah. Keberadaan pondok sangat signifikan bagi LDII bertahan dan bertumbuh di tengah aneka hujatan dan tuduhan kesesatan ajaran dan pemikiran LDII. Namun, keberadaan pondok tidak bermanfaat bila pengurus LDII Kota Kediri minim kreativitas dalam menjalin hubungan dengan pemerintah dan pengurus organisasi keagamaan lainnya.

LDII Kota Kediri: Inovatif dan Andal

DPD Kota Kediri terdiri dari tiga Pimpinan Cabang (PC), yakni PC Mojoroto, PC Kota, dan PC Pesantren. PC Mojoroto terdiri dari 10 Pimpinan Anak Cabang (PAC) dari 14 kelurahan. Dari 10 PAC itu,

anggota LDII sekitar 1.700 orang. PC Kota sudah membentuk enam PAC dari 17 kelurahan. Sekitar 500 anggota aktif dalam aneka kegiatan di PC Kota. Sementara itu, PC Pesantren, lokasi di mana pesantren Wali Barokah berdiri, terdiri dari sembilan PAC dari 15 kelurahan. 700-an anggota LDII yang tinggal di PC Pesantren (tidak termasuk santri Wali Barokah yang setiap bulan santri masuk dan keluar). Selain Wali Barokah, LDII di Kota Kediri juga memiliki pondok-pondok mini yang rata-rata menampung sekitar 200 santri. Mereka belajar aneka ilmu agama di bawah kurikulum LDII. Santri pondok kecil ini pada usia tertentu akan dikirim ke pondok Wali Barokah untuk memperdalam ilmu keislaman dan menjadi *mubalig* LDII.

Kegiatan utama LDII, termasuk di Kota Kediri, adalah pengajian. Setiap PAC mengadakan pengajian dua kali seminggu. Untuk PAC dengan populasi besar dan memiliki beberapa masjid, maka pengajian dilakukan di setiap masjid. Materi pengajiannya macam-macam tergantung kebutuhan. Ada pengajian yang isinya *tahsin* Al-Qur'an, atau kajian tafsir Al-Qur'an, dan lainnya. Setiap pengajian, anggota akan mengeluarkan *infaq*, atau sumbangan untuk organisasi. Uang tersebut dikumpulkan dan dipergunakan pengurus untuk mengurus segala kebutuhan pengajian dan anggota. Infaq tersebut adalah bagian dari *jihad fi sabilillah*, perjuangan di jalan Allah. Pengurus PAC akan bertemu secara rutin untuk mendiskusikan program yang sedang dan akan dilaksanakan. Dalam seminggu, pengurus harian bisa bertemu empat kali. Tidak heran bila semua informasi yang berkaitan dengan organisasi LDII mudah diketahui pengurus mengingat jumlah pertemuan, selain keberadaan media sosial, yang cukup sering.

Profil PAC mencerminkan kegiatan PC dan DPD. Pengurus Cabang juga mengadakan pengajian dua kali setiap minggu. Di luar itu, mereka akan mengadakan rapat-rapat rutin maupun dadakan tergantung kebutuhan. PC Mojoroto misalnya saat ini tengah mempersiapkan pengiriman tim sepak bola untuk liga santri tingkat nasional yang diadakan TNI. Pengurus Daerah tingkat Kota Kediri juga pengajian dua kali seminggu, di luar pertemuan rutin dan insidental. Agung Riyanto, Ketua DPD LDII Kota Kediri mengungkapkan,

Bila harus menghadiri seluruh pengajian, pengurus LDII Kota Kediri butuh lebih dari 30 hari dalam sebulan. Di luar pengajian rutin, mereka juga secara rutin mengadakan rapat koordinasi pengurus Kota Kediri untuk menjalankan berbagai program internal maupun eksternal, termasuk

menerima dan melayani tamu dari luar. Karenanya, hampir tidak ada informasi yang tidak sampai kepada pengurus bila terjadi sesuatu dengan jamaah. (Wawancara Agung Riyanto, 10 April 2022)

Demografi Kota Kediri yang memungkinkan toleransi dan keberadaan pondok pesantren Wali Barokah tidak memadai untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LDII Kota Kediri (selanjutnya LDII Kota Kediri) bertahan dan bertumbuh tanpa inovasi dan andal. Kota Kediri memang ramah terhadap minoritas. Tetapi, pengakuan komunitas yang lebih luas kepada komunitas minoritas berbeda tergantung seberapa aktif. Kelompok minoritas yang aktif lebih dikenal daripada mereka yang tidak melakukan interaksi secara aktif dan terbuka. Di sisi lain, Pondok Wali Barokah memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan pemerintah dan ormas keagamaan, tetapi tenaga dan pikiran pengurus dan pengelola terfokus pada pondok. Inovasi dan keandalan pengurus LDII Kota Kediri di tengah masyarakat membuka peluang pengakuan dari masyarakat dan pemerintah di satu sisi, dan menjembatani relasi antara pemerintah dan ormas keagamaan dengan pondok Wali Barokah. Karakter LDII Kota Kediri singkatnya andal.

Keandalan anggota LDII dapat dirasakan sejumlah organisasi yang melibatkan orang LDII sebagai panitia atau pengurus aktif. Salah satu contohnya, Paguyuban Antar Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan (PAUB-PK). Lima orang menjadi pengurus PAUB PK. Usman Arif, dewan pembina LDII Kota Kediri, mengisahkan pengalamannya bersama PAUB-PK sebagai berikut:

Kapan pun PAUB-PK membutuhkan orang untuk kepanitiaan kegiatan baik pertemuan bulanan, program temporer, maupun kegiatan tahunan, LDII selalu terdepan menyerahkan nama apa pun peranannya. Itu semua ada jelmaan dari prinsip tabiat luhur yang sudah menjadi keseharian kami: rukun, kompak, kerja sama, jujur, amanah, dan kerja keras. Anggota LDII akan memegang prinsip ini di mana pun mereka bekerja dan berdedikasi untuk organisasi. Di mana pun sampean bertanya, anggota LDII akan mengembalikan pada tabiat luhur tersebut. (Wawancara Usman Arif, 10 April 2022)

Keandalan LDII Kota Kediri juga dirasakan pejabat Polres Kediri Kota. Kus Sumardi, yang sempat menjadi Kepala Satuan Pembinaan

Masyarakat Polres Kota Kediri mengungkapkan:

Saya paling nyaman ketika menjalankan program kepolisian di komunitas LDII, ketika saya menjabat kepala pembinaan masyarakat Polres Kediri Kota. Saya tinggal telepon bahwa ada program vaksinasi untuk warga, pengurus LDII dalam sekejap bisa mengumpulkan jumlah massa sesuai jumlah vaksin yang polisi miliki—saat itu masih terbatas jumlahnya. Tenda, kursi, konsumsi, dan kebutuhan lain sudah tersedia. Kami tinggal membawa vaksin, dokter, dan peralatan lainnya. Saya salut sama LDII Kota Kediri. Mereka gerak cepat dan kompak. (Wawancara Kus Sumardi, 12 April 2022)

LDII mengajarkan apa yang disebut sebagai tabiat luhur. Tabiat luhur itu terdiri dari enam nilai: jujur, amanah, dan kerja keras, rukun, kompak, dan kerja sama. Tiga nilai awal merupakan aspek dalam diri. Seorang LDII di mana pun dan kapan pun harus berperilaku jujur, amanah, dan bekerja keras. Usman Arif menceritakan pengalaman saat masih aktif sebagai birokrat sebagai berikut:

Saya juga heran kenapa ya, selama menjadi PNS saya ditugaskan sebagai penentu dalam tender di dinas di mana saya bekerja. Mungkin mereka menilai saya orangnya tidak bisa dibujuk rayu dengan macam-macam. Mereka tahu saya anggota LDII. Dan, saya harus menunjukkan bahwa saya menjalankan nilai-nilai pada tabiat luhur LDII itu. (Wawancara Usman Arif, 10 April 2022)

LDII Kota Kediri merefleksikan fase-fase gerakan LDII nasional. Mereka membagi tiga fase. Pertama, periode 1980-2000 adalah fase berkarya. Pada fase ini, anggota LDII harus membuktikan bahwa ajaran-ajarannya melahirkan karya sekecil apa pun di lingkungan mereka tinggal dan atau kerja. Kedua, periode 2000-2017 sebagai fase komunikasi. Pada fase ini, LDII menunjukkan bahwa mereka adalah aliran dalam Islam yang sama dengan aliran-aliran lainnya yang menjalankan dan mempraktikkan inti ajaran Islam. Pada fase ini, LDII mengklarifikasi aneka tuduhan yang menurut mereka sudah bukan menjadi bagian dari ajaran LDII sebagaimana tergambar dalam surat klarifikasi kepada MUI. Ketiga, periode 2018-sekarang sebagai fase berkontribusi. Seluruh anggota LDII tidak boleh berhenti melakukan hal terbaik bagi organisasi semata, tetapi wajib berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program-

program pemerintah yang mereka Yakini dibuat demi kesejahteraan warga. Meski dibagi tiga periode, fase berkarya dan berkomunikasi terus dilakukan pada periode kontribusi.

Hubungan LDII dengan Pemerintah Daerah

LDII menganggap pemerintah penting karena alasan keagamaan dan keorganisasian. Dari segi keagamaan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, LDII memandang pemerintah sebagai representasi *ulil amri* yang harus ditaati setelah Allah dan rasul. Mereka meyakini bahwa pemerintah memang bertugas untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya. LDII karenanya tidak akan pernah memusuhi pemerintah. Dari segi keorganisasian, LDII memandang bahwa pemerintah adalah mitra strategis untuk pengembangan organisasi. Setelah pemerintah menetapkan Islam Jamaah terlarang, para penerus Nur Hasan mendekati kepada penguasa, dalam hal ini Golkar. Mereka juga mengikuti saran-saran petinggi Golkar untuk masuk ke dalam struktur partai. Saat itu, LEMKARI dikenal sebagai organisasi binaan partai Golkar. Relasi dengan pemerintah menguntungkan bagi pembenahan di tubuh organisasi untuk keluar dari tuduhan bahwa mereka merupakan jelmaan lain dari Islam Jamaah. Belajar dari pengalaman tersebut, serta keyakinan keagamaannya, LDII di mana pun akan mendekati pemerintah sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk melindungi warga negara.

LDII Kota Kediri karenanya memiliki hubungan baik dan dekat dengan pemerintah kota, khususnya Wali kota. Wali kota Kediri, misalnya memuji LDII mengelola aset dengan baik sehingga pondok ini tumbuh dan berkembang. “Saya kagum dengan LDII, hebat dalam pengelolaan aset, mengatur umat, dan kebersihan pondoknya.” tutur Wali kota. Ia melanjutkan, “para pendahulu LDII sudah menyiapkan beberapa tanah – tanah dan bangunan yang dibeli untuk pengembangan dan peramutan umat, ini luar biasa.”¹³ Pujian ini muncul karena pengurus LDII rajin menjalin komunikasi dan menyampaikan perkembangan organisasi terkini, termasuk Pondok Wali Barokah kepada pemerintah. Wali kota selalu mendapat informasi terkini perkembangan pondok.

Komunikasi bagi LDII Kota Kediri adalah kunci. Mereka akan

¹³ Masyhari, “Wali Kota Kediri: LDII Hebat dalam Pengelolaan Aset”, *Beritajatim*, 28 April 2022, <https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/wali-kota-kediri-ldii-hebat-dalam-pengelolaan-aset/> (diakses 14 Juni 2022).

menyapa pejabat pemerintah yang baru dilantik. Setelah waktunya memungkinkan, mereka akan berkunjung secara resmi sebagai bentuk silaturahmi. Setelah silaturahmi, komunikasi berlanjut pada kemungkinan kolaborasi dan kerja sama untuk kemajuan masyarakat. LDII Kota Kediri terapkan pola ini kepada semua pejabat baik yang ditugaskan dari luar kota maupun pejabat karier yang menduduki posisi di birokrasi pemerintah daerah. Begitu pun pejabat baru di Kota Kediri mesti mengagendakan untuk menemui pengurus LDII maupun pondok Wali Barokah, sebagai satu di antara organisasi kemasyarakatan yang cukup besar dan aktif di Kota Kediri.

Periode ini adalah kepemimpinan ketiga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Kediri di mana ada wakil dari LDII. Dua periode pertama diwakili Usman Arif. Periode ketiga, Agung Riyanto, ketua DPD LDII Kota Kediri, mewakili LDII. Agung didaulat sebagai anggota FKUB bidang hubungan masyarakat. Hal ini wajar karena LDII juga sudah masuk dalam jajaran pengurus MUI Kota Kediri. MUI mengutus perwakilan dari organisasi kemasyarakatan untuk menjadi anggota FKUB, salah satunya dari MUI. Di sisi lain, pengurus FKUB pasti anggota PAUB-PK, tetapi tidak semua pengurus PAUB-PK adalah anggota FKUB. Pengurus dan keanggotaan FKUB diatur hanya boleh 17 orang, sementara PAUB-PK lebih dari 50 orang dari berbagai majelis agama, termasuk aliran kepercayaan. Di PAUB-PK, LDII mengirim lima orang sebagai anggota yang aktif di kepemimpinan. Kelima orang tersebut paling aktif untuk setiap kegiatan.

Jajaran pengurus LDII Kota Kediri inovatif dalam menjalin hubungan dengan pemerintah daerah. Mereka menyadari bahwa menyambung silaturahmi dengan komponen masyarakat tidak hanya bisa dilakukan melalui FKUB dan atau PAUB-PK, tetapi juga kegiatan lainnya, yang tidak ada kaitan dengan agama sama sekali. Para pejabat Kota Kediri menyukai olahraga tenis lapangan. Beberapa pengurus LDII juga punya hobi serupa. Pada 2009, di bawah kepemimpinan Usman Arif, DPD LDII Kota Kediri menyelenggarakan turnamen tenis lapangan, LDII Cup. Penyelenggaraan tahun 2009 sukses, mereka ulangi lagi pada 2020 dan 2011. Pada 2013, mbah Usman menginisiasi pembentukan Paguyuban Tenis Kediri (PTK). Saat itu, pengurus PTK terdiri dari Polres Kediri Kota, Kodim Kediri, LDII, dan Bapras. PTK menjadi wadah penyuka tenis lapangan main bareng. Sejak 2013, anggota PTK main bareng dengan lokasi berpindah-pindah. Setiap organisasi anggota PTK berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Main bareng hanya berhenti selama pandemi covid-19. Mereka melanjutkan

setelah pemerintah mencabut status PPKM. Anggota PTK saat ini mencakup hampir seluruh instansi pemerintah, pengusaha, dan lembaga keagamaan.

Pertemuan rutin PTK di lapangan melengkapi Forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah) Kota Kediri. Perwakilan lintas pemangku kepentingan selalu hadir dalam pertemuan rutin di lapangan setiap bulan. Kapolres Kediri Kota, Dandim, kepala Kejaksaan Tinggi, perwakilan Kemenag, Pemda, pengusaha (Telkom, Apotek, Gudang Garam, dan lainnya), dan tokoh agama selalu hadir dalam pertandingan bulanan. Di sela-sela pertandingan, mereka mendiskusikan aneka persoalan dan atau program di Kota Kediri. Ide-ide baru mengenai bagaimana mempertahankan karakter guyub Kota Kediri lahir dari obrolan ringan di selama bermain tenis. Masalah keamanan di Kota Kediri juga sering kali menjadi topik pembicaraan. Bahkan misalnya masalah keterbatasan daya pada jaringan internet selama pandemi Covid-19 menjadi masalah yang diselesaikan usai pertandingan rutin. Penyelenggaraan pertemuan bulanan di lapangan tersebut diketahui oleh mbah Usman, Dewan Pembina LDII Kota Kediri. Mbah Usman kembali mengingatkan mengenai tabiat luhur sebagai ajaran utama LDII yang memotivasi dirinya mendedikasikan diri pada PTK walau usia tidak lagi muda.

Hubungan LDII dengan Ormas Agama

LDII Kota Kediri adalah contoh di mana berhasil meyakinkan ormas Islam lainnya sebagai berparadigma baru. LDII, di hampir seluruh Indonesia, berusaha keras untuk dapat diterima sebagai ormas Islam yang tidak menyimpang. Dalam sejarahnya, LDII tidak bisa dilepaskan dari Islam Jamaah yang telah dinyatakan terlarang oleh Kejaksaan Agung pada 1971. Kejaksaan Agung melarang Islam Jamaah karena masyarakat keberatan terhadap beberapa doktrin: baiat kepada amir sebagai tanda keislaman; konsep amir yang bukan sekadar pemimpin organisasi, melainkan spiritual; dan, di luar organisasinya belum Islam alias kafir. Ketiga doktrin ini menimbulkan kesalahpahaman. Ketiga doktrin ini mengakibatkan mereka akan membersihkan lokasi orang Muslim di luar LDII yang ikut salat (ibadah) di masjid LDII karena bukan Muslim dan tidak suci.

LDII telah merevisi ketiga doktrin di atas. Baiat misalnya adalah bentuk kesetiaan kepada organisasi, layaknya seseorang dilantik menjadi anggota tertentu. Amir, sebagaimana diuraikan di atas,

merujuk kepada pemimpin pemerintah dan organisasi di semua level. LDII merevisi model dakwah dengan model berdebat dan memojokkan pihak lawan debat. Menganggap kafir kepada lawan debat bukan lagi model dan cara LDII berdakwah. LDII kini mempromosikan *green dakwah* (dakwah hijau) yang hanya boleh menyejukkan dan lebih banyak menggunakan contoh untuk berdakwah kepada orang lain. LDII tidak mengurangi keyakinan mengenai haramnya praktik *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat*. Tetapi, mereka melarang stigma kafir secara publik kepada mereka yang masih mempraktikkan hal yang terlarang dalam Islam tersebut.

Islam Jamaah yang direvisi tersebut melahirkan LDII paradigma baru. Di satu sisi, LDII paradigma baru bukan Islam Jamaah karena tiga doktrin utamanya telah hilang: *baiat*, *amir*, dan *takfiri*. Tetapi, di sisi lain, sejumlah ajaran lainnya masih dipertahankan. Misalnya, kembali ke Al-Qur'an dan Hadis. LDII ketat mempertahankan keyakinan bahwa seluruh aktivitas peribadatan harus memiliki landasan hukum dalam Al-Qur'an dan hadis. Sungguhpun demikian, dalam praktik keagamaan yang secara tekstual tidak diketemukan landasan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka tetap menggunakan *ijma'* ulama dan *qiyas*. Doktrin lain Islam Jamaah yang masih dipertahankan adalah pandangan mengenai *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat*. Yang membedakan adalah metode mendakwahnya berubah. Doktrin penting lainnya adalah konsep jamaah dalam memperjuangkan Islam. Bagi LDII, yang merupakan warisan Islam Jamaah, adalah Islam hanya bisa tegak jika umat Islam bersatu dalam jamaah. Jamaah haruslah guyub dan mengerti Islam yang sebenar-benarnya seperti tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Jamaah karenanya harus sedia mengaji. Tidak heran bila bagi jamaah LDII mengaji setiap pekan itu penting dan akan mereka hadiri selagi sehat.

Klarifikasi LDII pusat berhasil meyakinkan MUI pusat bahwa LDII telah menerapkan paradigma baru, bukan lagi konsep lama seperti Islam Jamaah periode awal. MUI pusat menerima klarifikasi tersebut setelah beberapa kali mengunjungi Pondok Wali Barokah, memimpin salat Jumat, dan tidak ada *amir* dalam makna spiritual. MUI pusat menerima klarifikasi tidak otomatis MUI daerah menerima. LDII di setiap daerah harus meyakinkan dengan berbagai cara bahwa doktrin bermasalah Islam Jamaah tidak lagi mereka praktikkan.

LDII Kota Kediri di antara LDII yang setelah MUI pusat ambil keputusan segera menerima wakil di kepengurusan MUI tingkat kota.

Setidaknya dua faktor yang memungkinkan penerimaan tersebut. Pertama, MUI pusat mengklarifikasi pernyataan LDII ke pesantren Wali Barokah. MUI pusat ke Wali Barokah didampingi MUI Kota Kediri. MUI Kota Kediri ikut menyaksikan sendiri, selain sebelumnya telah selalu berhubungan dalam aneka kegiatan, mengenai praktik paradigma baru tersebut. Kedua, LDII telah aktif di PAUB-PK bersama pengurus MUI lainnya. Pondok Wali Barokah dengan kepanitiaan dari LDII Kota Kediri berkali-kali menjadi tuan rumah pertemuan rutin PAU-PK yang melibatkan tidak kurang dari 500 peserta. Peserta Muslim tentu saja ibadah salat di masjid utama pondok, dan tidak ada tanda bekas salat dipel sebab beralaskan karpet tebal.

Setelah meyakinkan mengenai paradigma baru, LDII juga harus menjaga relasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). LDII paradigma baru tetap meyakini bahwa *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat* dilarang dalam Islam. Apa yang mereka sebut sebagai *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat* itu dipraktikkan oleh jamaah atau pimpinan ormas tertentu.

Misalnya, di NU ada ritual *tahlil*. LDII tetap menghormati bahwa hal tersebut adalah bagian dari keyakinan mereka. LDII memang tidak mengamalkan ritual tahlilan (membaca tahlil) dikaitkan dengan mengenang orang yang telah meninggal dalam hitungan hari, bulan dan tahun. Tetapi LDII sangat menganjurkan kepada jamaahnya tetap membaca tahlil dan kalimat-kalimat thoyibah lainnya sebagai amalan andalan dan wiridan. Tidak diamalkannya ritual yang berbau syirik, *bid'ah*, khurafat dan takhayul, karena warga LDII takut tersesat dan diancam masuk neraka (Wawancara Sunarto, 23 Juli 2022)

Pandangan mengenai keharaman *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat* tidak termasuk dalam doktrin Islam Jamaah yang terlarang, melainkan pandangan umum gerakan yang hendak memurnikan Islam seperti dilakukan Muhammadiyah, Persis, dan kelompok salafi lainnya. Sementara, bagi NU mengajarkan *tahlil* sebagai ritual penting mengantarkan keluarga yang meninggal dan mengingat leluhur yang telah tiada. Praktik ini bagi NU sebagaimana diajarkan di hampir semua pondok NU di Kota Kediri memang *bid'ah* tetapi tergolong *bid'ah hasanah* (sesuatu yang baru yang baik).

Green dakwah sebagaimana diuraikan di atas adalah strategi membina hubungan baik dengan NU. LDII melarang mubalig dan

mubaligh LDII mendiskusikan mengenai *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat* di luar jamaahnya. Doktrin mengenai *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafati* hanya disampaikan dalam pengajian internal dan tanpa pengeras suara, dalam arti pengeras suara masjid maupun media sosial. LDII melarang para pendakwah yang memiliki kanal di *Youtube* misalnya mendiskusikan *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat* karena bisa menyinggung pihak-pihak lain. Menurut Sunarto, Wali Barokah tidak segan menindak mubaligh atau mubalighah yang melanggar aturan ini. “Kalau ketahuan ada mubaligh atau mubalighah melanggar prinsip *green* dakwah, kami tidak segan mencabut ijazah dan surat tugasnya,” ujarnya (wawancara Sunarto, 09 April 2022).

Relasi antara pengikut LDII dan NU di tingkat akar rumput dinamis. Pengikut LDII dan NU sama-sama menyesuaikan diri dalam kondisi tertentu. Budiyanto, ketua Pengurus Cabang Mojoroto, mengalami dinamika berhubungan dengan warga NU. Ia menikahi seorang perempuan dari ibu NU tulen dan ayah nasionalis. Istrinya sudah lama tidak mempraktikkan tradisi NU walau keluarga tetap menjaga tradisinya. Budi menikahi istrinya setelah menyatakan masuk LDII. Dia mengisahkan bahwa tidak begitu sulit baginya mendapat restu dari keluarga calon istri. Menurutnya, lebih berat meyakinkan keluarga sendiri karena bukan berasal dari LDII. Seiring perjalanan waktu, ayah mertuanya jadi lebih akrab kepada Budi daripada menantu lainnya. Budi menuturkan,

Saya biasa berangkat kerja pukul 03:30 dini hari dari Kediri ke Jombang. Saya bangun, bapak mertua sudah menyiapkan air hangat untuk saya. Dan, itu hampir setiap hari. Lalu, ketika beliau sakit selama dua bulan di RS, tidak mau kalau didampingi orang lain kecuali saya. Ketika beliau akan diinfus, beliau kesakitan dan memegang saya. Beliau memegang tangan saya hingga tertidur. Saat itu, saya ke kamar mandi tetapi tangan saya masih dipegang erat dan tidak bisa lepas. Akhirnya, saya bisa ke kamar mandi. Setelah saya kembali, beliau ternyata telah menghembuskan nafas terakhir. (Wawancara Budianto, 12 April 2022)

Beberapa saat setelah ayah mertuanya meninggal, relasi antara LDII dan NU teruji. Sebagai ketua PC Mojoroto, ia memiliki pasukan cukup untuk meramut mayat namun tidak langsung mendapat izin untuk melakukannya. Ia mengenang proses merumut janazah bapak mertuanya sebagai berikut:

Setelah sampai di Kediri, saya segera menghubungi orang LDII untuk mempersiapkan semuanya termasuk perlengkapan untuk memandikan jenazah. Begitu akan dimandikan oleh teman-teman LDII, saat itu pukul tiga dini hari, saya berbicara kepada ibu mertua. Ibu Mertua dan kakak ipar tidak mengizinkan karena akan diurus oleh modin, petugas desa untuk urusan keagamaan termasuk mengurus jenazah. Hingga menjelang zuhur hari, modin dari kelurahan itu datang. Petugas modin kebingungan cara memandikan jenazah. Saya akhirnya berdiskusi dengan ibu mertua kembali dan beliau mengizinkan tim saya memandikan almarhum bapak mertua. Waktu itu, kuburan juga tidak segera digali, akhirnya saya mengerahkan teman-teman LDII. (Wawancara Budianto, 12 April 2022)

Budi juga membantu menyelenggarakan tahlilan walau pun secara teologi tidak ia yakini sebagai ajaran Islam. Ia lakukan semata-mata sebagai penghormatan dan pengabdian kepada ibu mertua. Ia menuturkan,

Saya menghormati ibu. Setelah 100 hari bapak mertua meninggal, saya membantu dan mengikuti tahlilan. Pengadaan sarana dan prasarana serta tenaga untuk meramut jenazah bapak mertua, saya anggap sebagai infak dan bakti saya kepada orang tua. Namun, saya tetap tidak meyakini *tahlilan* sebagai ajaran Islam. Tapi apa mungkin ketika saya tinggal serumah dengan ibu dan tidak membantu ibu sama sekali? Bagaimana perasaannya? Apakah itu tidak lebih menyakiti hati beliau dan dosanya itu lebih besar? Saya menyediakan tempat dan konsumsi acara tahlil. Dan, itu saya anggap sedekah. Saya memandangnya seperti itu. (Wawancara Budianto, 12 April 2022)

Sampai di sini tampak bahwa LDII bukan saja perlu menunjukkan bahwa mereka berparadigma baru, tetapi juga berdakwah secara baru untuk membangun hubungan sosial lebih baik. Populasi pengikut LDII di Kota Kediri lumayan banyak dan sudah hidup berbaur dengan tetangga dengan berbagai latar belakang. Mereka mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan cara hidup tetangga yang mungkin punya kebiasaan berbeda. Interaksi panjang mereka dengan

komunitas lainnya, baik sesama Islam maupun dengan non-Muslim, memungkinkan hidup berdampingan dalam damai.

Posisi Perempuan dalam LDII

Perempuan tidak bisa menjadi pemimpin bila Indonesia menggunakan syariat Islam. Selama sistem negara kita demokrasi, perempuan bisa ikut berkontestasi selagi memiliki kapasitas. Begitu doktrin LDII mengenai kepemimpinan perempuan. Apakah hal itu tercermin dalam organisasi LDII? Dewan pembina dan pengurus harian DPD LDII Kota Kediri tidak ada perempuan. DPD LDII Kota Kediri baru saja membentuk badan otonom perempuan. Pembentukan lembaga otonom ini mengikuti kebutuhan formal. Ada banyak undangan kepada DPD LDII dari pemerintah maupun ormas dalam bidang perempuan. Agung Riyanto mengatakan bahwa lembaga otonom khusus perempuan telah dibentuk, tetapi belum aktif. Ia menuturkan, “Hal ini dimungkinkan karena DPW LDII tingkat provinsi Jawa Timur juga telah membentuk lembaga otonomi perempuan. Mereka baru akan mengadakan rapat kerja bulan depan. Untuk kemudahan berkoordinasi, mereka menunjuk istri saya sebagai ketua” (wawancara Agung Riyanto, 10 April 2022).

Tanpa organisasi perempuan khusus, urusan perempuan dan anak di lingkungan LDII telah terurus. Ketika saya tanyakan mengenai isu *stunting*, Lulu Imtichana, yang baru saja ditunjuk menjadi ketua LDII perempuan Kota Kediri, balik bertanya, “*stunting* itu apa?” Pertanyaan balik ini tampak polos, tetapi sebetulnya mencerminkan bahwa *stunting* bukan isu bagi perempuan di LDII. Setelah dijelaskan bahwa *stunting* itu istilah untuk anak dengan gizi buruk, Lulu menjelaskan bahwa di LDII selama ini tidak pernah mengalami gizi buruk. “Selemah-lemahnya anggota LDII dari segi ekonomi, mereka tidak akan mengalami gizi buruk. Wanita LDII yang hamil akan mendapat perhatian dari pengurus di level tingkat PAC bila ada kebutuhan yang tidak bisa ditangani keluarga. Lagi pula, laki-laki LDII tidak merokok sehingga risiko kerusakan janin akibat asap rokok tidak akan terjadi di keluarga LDII,” jelasnya (wawancara Lulu Imtichana, 11 April 2022).

Jumlah santri laki-laki dan santri perempuan di Pondok Wali Barokah berimbang. Sumber daya perempuan di lingkungan LDII yang memiliki pengetahuan dan keterampilan aneka bidang pasti banyak. Pekerjaan besar di lingkungan LDII Kota Kediri khususnya dan LDII se-Indonesia adalah bagaimana memajukan peran perempuan dalam

berbagai bidang, termasuk kemungkinan memimpin organisasi di semua level.

Penutup

Laporan tentang Pesantren Wali Barokah dan LDII Kediri Kota ini adalah bagian dari penelitian yang lebih luas mengenai LDII di Indonesia. Berikut ini beberapa kesimpulan laporan ini.

Pertama, struktur sosial, politik, dan ekonomi Kota Kediri membutuhkan situasi damai, baik dalam arti absen dari kekerasan fisik maupun kekerasan struktural dan kultural. Sumber pendapatan daerah Kota Kediri dari perusahaan. Bisnis terhambat bila rasa tidak aman menyelimuti kota. Bisnis macet, pendapatan negara juga menurun. Tidak hanya itu, hampir 40 persen penduduk Kota Kediri menggantungkan nasibnya kepada perusahaan yang ada di Kota Kediri. Bisnis perusahaan tersebut macet, sumber penghasilan mereka juga akan lenyap. Membina rasa damai di Kota Kediri tidak hanya berhenti pada menjaga agar tidak ada kekerasan fisik, tetapi juga diskriminasi kepada kelompok minoritas. Tidak hanya LDII, pemerintah dan masyarakat mengakui keberadaan Ahmadiyah dan penganut Sapto Dharmo, penghayat kepercayaan, padahal di daerah lain keduanya mendapat tekanan dan bahkan menjadi sasaran tindak kekerasan.

Kedua, LDII Kota Kediri mengerahkan seluruh kemampuan dan modal sosial yang dimiliki untuk menjalin silaturahmi dengan pemerintah dan masyarakat sipil. Mereka mempergunakan fasilitas yang dimiliki Pondok Wali Barokah yang bersejarah untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam berbagai bidang. Pondok memfasilitasi aneka kebutuhan agar program pemerintah berjalan sesuai rencana seperti program vaksinasi santri. Pondok Wali Barokah dan LDII Kota Kediri segera menyatakan siap ketika pemerintah hendak menyuntikkan vaksin kepada siswa dan guru di pondok. Mereka tidak mempertanyakan status kehalalan vaksin. Pihak pemerintah menilai penerimaan LDII yang serbacepat dan tangkas itu memperbesar kepercayaan aktor pemerintah kepada LDII. LDII Kota Kediri juga pandai memanfaatkan sumber daya nonkeagamaan (dalam hal ini olahraga tenis lapangan) untuk membuka ruang komunikasi dengan pejabat kota. Aneka masalah dibicarakan dengan pejabat dari pemerintah kota, kejaksaan, kepolisian, perusahaan, dan bahkan TNI di sela-sela pertandingan tenis.

Terakhir, LDII Kota Kediri berhasil menggeser wacana dari Islam Jamaah ke LDII berparadigma baru. Wacana mengenai LDII paradigma baru adalah instruksi LDII pusat. Namun, bagaimana wacana tersebut membumi adalah tanggung jawab setiap daerah dengan mempertimbangkan konteks sosial politiknya. LDII Kota Kediri menunjukkan, bukan hanya mengatakan, bahwa mereka telah bertransformasi menjadi lembaga dengan paradigma dan wawasan baru. Konsep *baiat*, *amir*, dan *takfiri* bukan lagi norma utama LDII. LDII paradigma baru mencintai NKRI, mendorong demokrasi, menghargai perbedaan, dan membuka diri terhadap berbagai pihak untuk menjalin tali silaturahmi. MUI Kota Kediri telah memasukkan wakil LDII dalam kepengurusan sebagai wujud penerimaan atas paradigma baru.***

Narasumber wawancara

Abdullah Abu Bakar, Wali kota Kediri, 11 April 2022.

Agung Riyanto, Ketua DPD LDII Kota Kediri, 10 April 2022.

Ahmad Jainudin, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial (Kesra) Kota Kediri, 12 April 2022.

Ashari Eko Prayitno, Ketua Pemuda LDII Kota Kediri, 09 April 2022.

Budianto, Ketua PC Mojoroto Kota Kediri, 12 April 2022.

Ikhwan Abdillah, Pengajar di Pondok Wali Barokah, 09 April 2022.

Kus Sumardi, Kepala Bagian Sumber Daya (Kabag Sumda), Polres Kediri Kota, 12 April 2022.

Lulu Imtichana, Ketua Perempuan LDII Kota Kediri, 11 April 2022.

Mayor Inf (P) Puguh Jatmiko, Pengurus Harian Paguyuban Tenis Kediri (PTK) perwakilan Kodim Kota Kediri, 10 April 2022.

Muhammad Salim, Ketua FKUB Kota Kediri dan Ketua PAUB-PK Kota Kediri, 11 April 2022.

Slamet Tedjo Purnomo, Pengurus Harian Paguyuban Tenis Kediri (PTK) perwakilan Kodim Kota Kediri, 10 April 2022.

Sunarto, Ketua Pondok Wali Barokah, 09 April 2022.

Usman Arif, Dewan Pembina DPD LDII Kota Kediri, 10 April 2022 dan 02 Agustus 2022.

Zainal Arifin, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA), 12 April 2022.

Bab 3

Jatuh-Bangun LDII di Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Siswo Mulyartono

“Kalau ormas-ormas Islam lain bertindak seperti LDII, tugas pemerintah jadi ringan. Sebab, LDII tidak pernah meminta uang ke pemerintah untuk membangun masjid, sekolah, pesantren atau kegiatan-kegiatan keagamaan.”

- Jusuf Serang Kasim, Wali kota Tarakan (1999-2009)

“LDII bagian dari Islam. Perbedaan dengan ormas Islam lain hanya sebatas *khilafiah*. Kami ikut membantu LDII berkomunikasi dengan pemerintah daerah maupun ormas-ormas Islam lain yang masih menganggap LDII menyimpang.”

- Pengurus Nahdlatul Ulama dan Ketua MUI Kota Tarakan

Pendahuluan

Provinsi Kalimantan Utara merupakan Daerah Otonom Baru (DOB), hasil pemekaran dari Kalimantan Timur pada 25 Oktober 2012. Kehidupan keagamaan di provinsi ke-34 ini bisa dibilang sepi dari pemberitaan negatif. Kementerian Agama Republik Indonesia pernah menobatkan Kalimantan Utara sebagai provinsi dengan kehidupan keagamaan paling rukun di Indonesia pada 2019. Studi Nathanael Sumaktoyo (2016) tentang toleransi menemukan bahwa Kalimantan Utara adalah provinsi yang paling toleran.¹

¹ “Survei: Kalimantan Utara Paling Toleran, Aceh Paling Intoleran,” *Tirto.id*, 17 Juli 2018, <https://tirto.id/survei-kalimantan-utara-paling-toleran-aceh-paling-intoleran-cN2C> (diakses 5 Juni 2022).

Meski demikian, sebelum terjadi pemekaran provinsi, beberapa kabupaten dan kota yang menjadi bagian dari Kalimantan Utara pernah mengalami insiden konflik etnis-agama dalam skala kecil maupun besar. Konflik dalam skala kecil kerap muncul di wilayah Nunukan. Konflik tersebut melibatkan aliran-aliran keagamaan di dalam Islam yang berbeda etnis.² Insiden konflik etnis-agama dalam skala besar meletus. Insiden yang disebut dengan Kerusakan Tarakan ini mengakibatkan ribuan orang mengungsi, puluhan orang meninggal, dan kerusakan properti.

Meski Kerusakan Tarakan dibingkai dalam wadah perseteruan etnis, unsur agama juga sempat ditarik ke dalam pusaran konflik. Masuknya unsur tersebut adalah ketika Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Tarakan dituduh terlibat karena beberapa anggota dan simpatisannya menjadi bagian dari aktor perseteruan. Namun, tuduhan tersebut cepat direspons oleh pengurus organisasi LDII Kota Tarakan sehingga kerusakan tidak bergeser ke isu sektarianisme Islam.

Sebagai aliran heterodoks dalam Islam yang memiliki posisi rentan mengalami persekusi dan diskriminasi, kerusakan Tarakan berpotensi memperburuk citra LDII di tengah upaya mereka untuk terus berintegrasi dengan kelompok Muslim ortodoks seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Tarakan. Kerusakan Tarakan adalah salah satu momen penting dalam sejarah LDII di sana di tengah tantangan-tantangan lain dalam konteks lokal maupun nasional.

Laporan ini mendeskripsikan sejarah LDII Kota Tarakan, bagaimana ia muncul, berkembang, dan mengatasi tantangan yang ia hadapi baik dalam skala lokal maupun nasional. LDII Kota Tarakan menjadi bagian penting dalam perkembangan LDII di tingkat nasional karena ia memiliki anggota terbanyak dibandingkan dengan cabang-cabang lain di Pulau Borneo. Selain itu, ia berhasil melakukan reintegrasi dengan organisasi Islam lain dan memiliki posisi ekonomi-politik yang penting di Kota Tarakan.

Dengan mempelajari sejarah, demografi, dan hubungan LDII dengan pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat sipil etnis maupun keagamaan di Kota Tarakan, tulisan ini menemukan bahwa pesatnya perkembangan LDII di sana karena kapabilitas elite LDII lokal dalam merespons perubahan ekonomi-politik. Tulisan

² *Pelita*, "Rumah Ketua LDII Tegal Dirusak dan Dijarah Massa", 29 Agustus 1998.

ini juga menemukan bukti-bukti tentang pentingnya kebebasan beragama dalam pembangunan. Jika pemerintah daerah melarang atau membatasi LDII Kota Tarakan maka akan mengganggu roda perekonomian di sana karena warga LDII adalah salah satu pemain utama perkembangan ekonomi Kota Tarakan.

Kajian ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota LDII Kota Tarakan, pengurus Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan unsur-unsur pemerintahan daerah maupun pusat. Selain itu, penulis juga menggunakan arsip-arsip lama LDII Kota Tarakan sebagai data primer.

Setelah pendahuluan, tulisan ini mengulas sejarah dan demografi LDII Kota Tarakan. Kemudian, tulisan ini mengulas salah satu tokoh dan peristiwa penting yang membuat LDII Kota Tarakan berkembang pesat. Pada bagian berikutnya, penulis mengulas bagaimana agamawan LDII generasi kedua berhubungan dengan pemerintah daerah dan ormas Islam. Selanjutnya, tulisan akan menempatkan LDII di Tengah Politik kesukuan yang menjadi ciri khas kontestasi di Kalimantan secara umum. Tulisan ini diakhiri dengan diskusi tentang kemampuan elite-elite kelompok minoritas lokal mengatasi tantangan dan mendiskusikan pentingnya kebebasan beragama untuk pembangunan di daerah.

Sejarah LDII Kota Tarakan: Tentara dan Penjara

Kota Tarakan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Utara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam. Jumlahnya sekitar 72% beragama Islam. Posisi kedua ditempati Kristen (20%), sisanya beragama Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada 2000 mayoritas penduduk Kota Tarakan (30%) berasal dari Suku Bugis. Sedangkan Suku Jawa jumlahnya sekitar 25%. Sisanya terdiri dari warga asli yakni Suku Tidung (7,6%) dan beberapa warga dari Suku Sunda, Banjar, Melayu, Tionghoa, dan lainnya. Komposisi ini tak jauh berbeda dengan sensus penduduk pada 2010.

Sekitar 8.000 penduduk Muslim berafiliasi ke LDII. Jumlah ini menempatkan LDII sebagai ormas terbesar kedua di Kota Tarakan setelah Nahdlatul Ulama. Saat ini, jumlah masjid LDII di Kota Tarakan sebanyak 22, tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Tarakan. Masjid-masjid tersebut dikelola oleh Pengurus Anak Cabang (Tingkat

Kelurahan) LDII. Mereka juga memiliki Pondok Pesantren Al-Mukminun dan Sekolah Umum di Kampung Empat Kota Tarakan yang dikelola oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Tarakan.

Mayoritas warga Muslim Bugis terutama Bugis Letta di Kota Tarakan merupakan warga LDII. Suku Jawa yang aktif di LDII juga relatif besar ketimbang suku-suku lain misalnya Melayu, Banjar, Tionghoa, dan Tidung. Meski Kalimantan Utara menjadi Daerah Otonom Baru pada 2012, LDII Kota Tarakan masih di bawah Pimpinan Wilayah (DPW) Kalimantan Timur setidaknya sampai 2015.

Ketika DPW LDII Kaltara dibentuk, pengurus DPD LDII Kota Tarakan banyak menjadi pengurus DPW LDII Kalimantan Utara. Karena itu, LDII Tarakan kerap kali diidentifikasi sebagai pusat dari LDII di Kalimantan Utara. Selain karena sejarah tersebut, LDII Tarakan juga bisa dibilang terbesar di Pulau Borneo dari segi jumlah warganya.

Asal-usul LDII Kota Tarakan bisa dilacak pada 1960-an, ketika masih menggunakan nama Islam Jamaah atau Darul Hadis. Awalnya dibawa oleh salah satu tentara Korps Komando Operasi (KKO) dari Jawa Timur ketika Tarakan menjadi salah satu pangkalan militer Indonesia untuk konfrontasi dengan Malaysia (1962-1966). Tentara tersebut kerap bertemu dengan salah satu tokoh agama di Kampung Empat yakni Bapak Sarmin.

Bapak Sarmin seorang Muslim tradisional, sering berdiskusi tentang Islam dengan tentara KKO itu. Lama kelamaan, Bapak Sarmin tertarik dan membuat pengajian Islam Jamaah. Waktu awal-awal, ia hanya mengajak keluarganya dan beberapa saudaranya di Kampung Empat. Tentara KKO tersebut pulang ke Jawa Timur ketika konfrontasi terhadap Malaysia berhenti pada 1966. Mubaligh Islam Jamaah dari Jawa mulai dikirim ke Tarakan.

Bapak Sarmin bersama mubaligh dari Jawa berhasil menyebarluaskan ajaran Islam Jamaah ke desa-desa lain, terutama Kampung Enam. Di kampung Enam ia berhasil mengajak salah satu alumni Gontor yang merantau ke Tarakan, yakni Achmad Machasin. "Waktu awal perkembangannya, sekitar akhir 1969, jumlahnya hanya sekitar 10-30 warga di Kampung Enam," kata salah satu anak Achmad Machasin, "mereka sempat dituduh menyebarkan aliran sesat atau agama baru."

Tuduhan-tuduhan tersebut berujung kepada laporan warga. Pihak

Kejaksanaan atau Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) setempat akhirnya memanggil 10 tokoh Darul Hadis atau Islam Jamaah di Tarakan. Pemanggilan ini berujung kepada pemidanaan. Bahkan rumah ibadat mereka di Kampung Empat disegel. Di balik jeruji besi, Bapak Sarmin tetap konsisten mengamalkan ajaran Darul Hadis. Bahkan, ia membuat pengajian di penjara. Di sana, ia bertemu para jago dari Suku Bugis Letta, salah satunya adalah Bapak Sani. “Bapak Sani sempat bingung, kenapa orang taat beribadah bisa dipenjarakan,” kata Zainudin.

Bapak Sarmin bebas sekitar 1970-an, ia mendekam di balik jeruji hampir satu tahun. Rekan-rekannya juga bebas, kecuali Achmad Machasin yang sebelumnya menjadi tahanan rumah karena sakit dan baru dipenjarakan ketika ia sembuh.

“Generasi awal Islam Jamaah mayoritas beretnis Jawa, ada juga yang Bugis dan suku lain tapi jumlahnya tidak banyak. Orang-orang Jawa yang merantau ke Tarakan umumnya bekerja sebagai pegawai Pertamina, Guru Agama, dan pedagang. Suku lainnya yang berafiliasi dengan Islam Jamaah bekerja sebagai nelayan, pegawai negeri sipil, dan pedagang,” kata Zainal.

Bebas dari penjara bukan berarti bebas dari pengawasan. Sempat muncul tuduhan, ketika sudah bebas dari penjara, bahwa Bapak Sarmin dan teman-temannya adalah anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) Putih. Kebetulan, ketika Bapak Sarmin dan teman-temannya bebas, para tahanan politik yang dituduh sebagai PKI juga mulai dibebaskan di Tarakan. “Waktu Pak Sarmin mulai pengajian lagi juga pernah dituduh sebagai pengajian gelap, karena waktu pengajian malam tidak pakai lampu. Padahal dulu belum ada listrik, pakai lampu tradisional yang durasinya terbatas, jadi begitu lampu obor itu mati, pengajiannya jadi gelap. Tapi warga menuduh kami sebagai pengajian gelap, ajarannya gelap-gelapan,” kata Zainudin.

Dinamika Islam Jamaah Kota Tarakan tidak bisa dilepaskan dari dinamika Islam Jamaah tingkat pusat. Ketika tokoh-tokoh pusat melakukan transformasi organisasi dan politik, Kota Tarakan juga mengikutinya. Islam Jamaah berubah menjadi Lemkari dan memutuskan untuk mendukung Golkar. Dua tahun sesudah keputusan tersebut, Islam Jamaah Kota Tarakan juga mengalami transformasi, yakni berubah menjadi Lemkari dan menjadi juru kampanye Golkar di Tarakan. Mengapa dua tahun baru bertransformasi? Karena, waktu itu

komunikasi dan transportasi dari Jawa masih sangat terbatas.

Begitu berganti nama, Lemkari Tarakan mulai menyusun organisasi tingkat Kecamatan (Komisariat Kecamatan atau Komcat). Kampung Empat menjadi basis dari Komcat-Komcat. Lemkari juga mulai bisa menggunakan masjid di Kampung Empat dengan penjagaan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Mubaligh-mubaligh dari Jawa juga mulai dikirim ke Komcat-Komcat yang sudah berdiri.

Golkar, Haji Sani dan Krisis Ekonomi 1998

Tidak ada perbedaan dari apa yang diajarkan oleh Darul Hadis atau Islam Jamaah dengan Lemkari dan LDII. Materi pengajiannya sama: Al-Qur'an dan Hadis. "Substansinya sama dengan yang di Pusat, perbedaannya hanya soal waktu pengajaran. Misalnya di kelurahan A baru mengkaji terkait cara-cara memandikan Jenazah, sedangkan di kelurahan B baru mengkaji tentang sholat, tapi nanti juga akan mengkaji tentang memandikan jenazah" kata salah satu pengurus DPD LDII Kota Tarakan.

Selain itu, pengajian-pengajian mereka berjalan secara programatik. Maksudnya, setiap tingkatan wajib memiliki program pengajian dan substansinya terkontrol oleh wilayah maupun pusat. Wilayah (tingkatan Provinsi) maupun daerah (Kota/Kabupaten) juga memiliki pengajian, minimal sebulan sekali. "Kalau di tingkatan Kelurahan pengajian seminggu tiga kali, bahkan ada pengajian khusus tingkatan anak-anak dan pengajian untuk Wanita LDII," Kata Ketua LDII Kota Tarakan.

LDII tidak melarang perempuan LDII untuk meniti karier. Perempuan yang tergabung ke dalam LDII punya sebutan sebagai Wanita LDII. Menggunakan kata wanita supaya lebih menyesuaikan dengan konteks Indonesia. Wanita LDII Kota Tarakan membantu pengurus LDII dalam mengadakan pengajian rutin ibu-ibu, remaja putri, dan anak-anak. Meski Wanita LDII belum pernah menjabat sebagai ketua LDII, program-program mereka tidak ditentukan oleh pengurus laki-laki. "Kalau program dan substansi pengajian *kan* memang sudah ada kurikulumnya dari pusat, tetapi kalau program sosial kemasyarakatan Wanita LDII datang dari kami sendiri. Misalnya, kami mengusulkan untuk membuat seminar tentang kesehatan, makanan untuk ibu-ibu LDII maupun warga luar LDII," kata salah satu pengurus Wanita LDII. Wanita LDII juga aktif di Gabungan Organisasi Wanita (GOW)

Kota Tarakan, menjadi kader-kader posyandu di lingkungan di mana mereka tinggal.

Mengapa LDII kerap dituduh menyimpang? “Karena, bisa jadi kami mengajarkan sesuatu yang berbeda, tapi perbedaan itu soal khilafiyah. Syahadat kita sama seperti NU dan Muhammadiyah dan ormas Islam lain. Tapi sejak dulu kita mengharamkan rokok. Mengajarkan jamaah menggunakan celana di atas mata kaki dan berkerudung bagi perempuan. Zaman Orde Baru hal tersebut terlihat aneh. Mungkin. Tapi sekarang, celana cingkrang, berjenggot, dan berkerudung bagi perempuan juga diajarkan oleh beberapa umat Islam di luar LDII. Karena, memang ada hadisnya *kan,*” Kata Pengurus Ponpes Al-Mukminun.

Hal lain yang membuat Islam Jamaah kontroversial adalah sikap politiknya yang mendukung Golkar. “Kami menghadapi pilihan sulit karena tidak semua warga suka dengan politik. Jika bersikap apolitis, kami akan mengalami kesulitan dalam beribadah. Pengurus Pusat menginstruksikan supaya mendukung Golkar waktu itu, karena Golkar akan menjamin keselamatan warga Lemkari. Untungnya, setelah Orde Baru runtuh, Pusat membebaskan warga LDII untuk aktif di Partai Politik mana saja,” kata Zainudin.

Banyak ulama di Kota Tarakan protes waktu itu, dan bilang “Orang Islam kok mendukung Partai Pohon Sarang Setan, Islam macam apa itu,” tutur Zainal. Para tokoh Lemkari Kota Tarakan mulai terang-terangan dan aktif di Golkar ketika Pemilihan Umum Kedua pada Zaman Orde Baru (1977) ketika Partai-partai mengalami fusi. Hanya ada tiga partai sejak 1977 hingga 1997: PPP, PDI, dan Golkar. Bapak Sarmin menginstruksikan kepada seluruh warga Lamkari untuk memilih Golkar. Ia juga menjadi juru kampanye Golkar di Kota Tarakan. Bahkan, anggota Lemkari banyak yang masuk Golkar dan menjadi DPRD Kota Tarakan waktu akhir 1990-an.

Namun, pesatnya perkembangan LDII Kota Tarakan bukan karena aktivitas politik Sarmin di Golkar. Melainkan karena kesabaran dan konsistensinya dalam berdakwah. Dakwahnya di penjara pada akhirnya membuahkan hasil. Bapak Sani, narapidana Kota Tarakan yang pernah bertemu Sarmin, bebas pada 1980-an. Ketika bebas, ia tidak pulang ke Sulawesi Selatan melainkan mencari Sarmin dan memutuskan menetap di Kota Tarakan. Sani juga memutuskan untuk lebih mendalami Islam dari Sarmin. Dengan kata lain, menjadi aktifis LDII.

Sani pada awalnya bekerja sebagai buruh tambak di Kota Tarakan. Lama-lama ia merintis usaha tambak secara mandiri, memiliki tambak sendiri meski lahannya kecil, menyewa lahan untuk memperluas usaha tambaknya. Ia adalah generasi pertama dalam sejarah pertambakan di Kalimantan Utara. Ia pelopor budi daya Udang Windu. Ketika usaha tambak Haji Sani mulai berkembang, sanak saudaranya dari Sulawesi Selatan ikut membantu usahanya. Selain bekerja, mereka juga mengikuti pengajian LDII yang diadakan oleh Sani. Mereka akhirnya menjadi warga LDII. Tapi waktu itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Melonjaknya warga LDII dari Suku Bugis Letta terjadi ketika usaha tambak Sani berkembang pesat saat krisis 1998 hingga 2005.

Sejak 1990-an hingga saat ini, tambak di Kalimantan Utara adalah pemasok utama Udang Windu Nasional. Dari dermaga pengolahan di Pulau Tarakan, sekitar 80% udang diekspor ke Jepang, sisanya ke negara Asia lain, bahkan kerap diekspor ke Amerika dan Eropa. Perputaran uang bisnis udang bahkan melampaui anggaran pendapatan belanja pemerintah daerah (APBD). Pada 2014 misalnya, perputaran uang bisnis udang mencapai 32,5 triliun. Angka ini mengerdilkan APBD Provinsi Kalimantan Utara pada 2017 yang hanya 2,3 triliun.³

Waktu krisis 1998, harga udang windu menjulang tinggi. Harga per kilogram mencapai ratusan ribu waktu itu. Sani sebagai petani udang windu memperoleh untung berlimpah. Keuntungannya untuk membeli lahan tambak lagi selain disumbangkan ke LDII. Ia juga datangkan lagi orang-orang Sulawesi untuk bekerja di Tambak. Mereka ikut pengajian LDII dan menjadi warga LDII. Bapak Sani sendiri memberikan *sodaqoh* ke LDII sekitar 10 persen dari keuntungan usaha tambaknya waktu itu. Sodaqoh tersebut dikelola organisasi untuk membangun masjid dan sekolahan. Di luar itu, ia juga kerap membantu warga LDII dan non-LDII ketika menghadapi kesulitan ekonomi.⁴

Tidak semua orang yang bekerja ke Bapak Sani adalah warga Bugis Letta, ada juga dari etnis-etnis lain dan bukan warga LDII. Karena itu, Bapak Sani juga dikenal sebagai tokoh Bugis Letta yang telah ikut membangun perekonomian warga Kota Tarakan dan Kalimantan

³ “Menjaga Habitat Mangrove, Meraih Asa di Delta Kayan Sembakung,” National Geographic Indonesia, 26 Januari 2019, <https://nationalgeographic.grid.id/read/131615503/menjaga-habitat-mangrove-meraih-asa-di-delta-kayan-sembakung?page=all> (diakses 10 Juni 2022).

⁴ “Baznas Pulangkan Warga Terlantar,” Prokal.co, 7 Januari 2019, <https://kaltara.prokal.co/read/news/25536-baznas-pulangkan-warga-terlantar.html> (diakses 8 Juni 2022).

Utara secara umum. Hal ini diakui sendiri oleh para pejabat pemerintah daerah, salah satunya Zainal Arifin Paliwang Gubernur Kalimantan Utara.⁵

Saat tubuh Haji Sani hendak disemayamkan, Wali kota Tarakan Khairul mengatakan “Bagi saya beliau tidak hanya sebagai tokoh masyarakat Sulawesi Selatan, tapi juga sebagai tokoh di Kota Tarakan. Karena selama ini saya melihat begitu banyak kontribusi almarhum untuk pembangunan di Kota Tarakan.”⁶ Ketokohan Bapak Sani juga ikut memengaruhi persepsi warga biasa terhadap LDII. “Bapak Sani saja ikut LDII, masa LDII aliran sesat? Kalau aliran sesat seharusnya sudah ditinggalkan Bapak Sani dari dulu,” kata salah satu pemuda non-LDII di Kota Tarakan.

Elite LDII, Pemerintahan Daerah dan Organisasi Keagamaan

Hubungan baik dengan Golkar mempermudah kader-kader LDII untuk menjalin kerjasama dengan Pemda Kota Tarakan. Apalagi sejak reformasi hingga sekarang, banyak kader LDII yang bekerja sebagai anggota dewan daerah, staf ahli anggota legislatif dan pegawai negeri sipil.

LDII Pusat selalu menekankan supaya LDII di daerah ikut membantu pemerintah dalam pembangunan melalui program partisipasi pembangunan siapapun pemimpin daerahnya. “Jadi, meski kader-kader LDII aktif di berbagai partai, kita tetap mendukung program pemerintah terlepas dari asal-usul partainya,” kata Zainudin. “Kita wajibkan warga LDII punya SIM jika berkendara sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum,” kata pengurus LDII Kota Tarakan, “bahkan banyak kader-kader LDII yang berprestasi di bidang olahraga ikut pelatihan nasional dan bertanding dengan atas nama Indonesia melawan negara lain. Atlet Pencak Silat Indonesia di Sea Games Hanifan yang merangkul Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo adalah warga LDII.”

Program kerja LDII Kota Tarakan dengan Pemkot disesuaikan

⁵ “Almarhum Haji Sani, Sosok Yang Sangat Menginspirasi Dimata Zainal A. Paliwang,” Inakoran, 9 September 2020, <https://inakoran.com/almarhum-haji-sani-sosok-yang-sangat-menginspirasi-dimata-zainal-a-paliwang/p26003> (diakses 15 Juni 2022).

⁶ “Wali Kota: Alm Puang H. Sani Banyak Berkontribusi,” Radar Kaltara, 6 September 2020, <https://kaltara.prokal.co/read/news/34467-wali-kota-alm-puang-h-sani-banyak-berkontribusi> (diakses 16 Juni 2022).

dengan kebutuhan. Tidak dirancang melalui rapat kerja, tetapi selalu menyediakan sumber daya manusia dan materi ketika pemerintah daerah butuh bantuan dari LDII. Ketika ada musibah, misalnya kebakaran, LDII yang paling banyak mengerahkan bantuan untuk pemerintah menangani musibah tersebut. LDII juga selalu mengundang pejabat-pejabat Pemkot maupun Pemprov ketika mengadakan kegiatan buka bersama, *halalbihalal*, peresmian masjid, pengajian wilayah maupun daerah, atau musyawarah wilayah maupun daerah LDII.

Hubungan sinergi tersebut membuat LDII Tarakan bisa lebih cepat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Misalnya pada 2012 ketika MUI Kota Tarakan mengadakan forum klarifikasi LDII kepada ormas-ormas Islam di Tarakan karena LDII dituduh mengafirkan ormas Islam lain. "Waktu itu diadakan dialog antara LDII dengan Ormas Islam dan para takmir masjid di Tarakan. MUI memfasilitasi dialog tersebut. Kepolisian, pejabat Pemkot, dan Mantan Wali kota Bapak Jusuf juga hadir. Pernyataan atau testimoni Pak Jusuf di forum itu membuat suasana cair. Pak Jusuf itu Muslim tradisional, mengatakan LDII itu tidak sesat, tidak ada itu orang luar LDII masuk masjid LDII dipel, dibersihkan lagi. Pak Jusuf juga bilang kalau ormas lain seperti LDII, tugas pemerintah jadi ringan karena LDII tidak pernah minta bantuan pemerintah," kata Zainudin.

LDII sendiri telah memiliki masjid setidaknya satu di setiap kelurahan yang ada di Kota Tarakan. Ia juga memiliki sekolah dan pondok pesantren yang terbuka untuk warga LDII maupun non-LDII. Aset-aset tersebut ia bangun dengan uang sendiri, tidak menggunakan bantuan pemerintah daerah maupun pusat. Selain mengelola zakat, LDII mengelola uang shodaqoh dan infak warga LDII yang besarnya disepakati oleh pengurus organisasi dan warga LDII. Organisasi mewajibkan warga LDII untuk menyalurkan zakat, shodaqoh, dan infaq ke satu pintu yakni organisasi LDII. Kemudian, organisasi yang akan mengelola peruntukkan uang-uang tersebut.

Tokoh-tokoh LDI, salah satunya KH. Zainudin Al Amin Ketua LDII Kota Tarakan, juga terlibat aktif dalam proses pembentukan Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonom Baru. Zainudin bersama tokoh-tokoh Ormas Islam lainnya kerap diundang oleh Wali kota Tarakan Jusuf Serang Kasim untuk membahas persiapan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Keterlibatan aktif ini mempermudah LDII bisa beradaptasi dan memobilisasi sumber daya yang dimilikinya secara tepat ketika provinsi ke-34 di Indonesia disahkan pada 2012.

KH. Zainudin Al Amin adalah generasi kedua tokoh LDII Kota Tarakan. Ia warga pendatang dari Palembang. Ia bisa dikatakan sebagai figur yang berhasil melanjutkan hubungan harmonis LDII dengan pemerintah daerah. Ia juga berhasil membawa LDII masuk ke dalam forum-forum keagamaan intra dan antaragama di Kota Tarakan. Ia memperhatikan detail-detail kecil ketika berusaha mengatasi masalah yang sedang dihadapi organisasinya.

Tidak ada konflik kekerasan antara LDII dengan ormas Islam lain di Kota Tarakan sejak awal perkembangan LDII hingga sekarang. Meski sudah berkembang lama, LDII baru bisa menjadi pengurus MUI Kota Tarakan pada 2010. Hal tersebut berkat KH. Zainudin Dalila, Muslim tradisional (Al-Khairat) berasal dari Palu.

Waktu itu, Zainudin Dalila mengajak Ketua LDII Kota Tarakan Zainudin Al Amin untuk menjadi pengurus MUI. Meski punya hubungan baik dengan Zainudin Dalila, keberadaan LDII di MUI Kota Tarakan masih sering diperbincangkan oleh Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, dan Hidayatullah karena LDII masih dianggap sebagai aliran menyimpang. Karena itu, Zainudin Dalila selaku Ketua MUI Kota Tarakan pada 2012 mengadakan dialog antara LDII dengan ormas-ormas Islam dan para takmir masjid di Kota Tarakan.

Sempat terjadi insiden kecil yang mengganggu proses dialog. Salah satu anggota MUI Kota Tarakan sempat mempersoalkan posisi duduk anggota LDII yang tidak berbaur dengan peserta lain. Ia menganggap bahwa posisi duduk tersebut adalah ciri khas LDII sebagai ormas yang eksklusif. Tudingan tersebut dijawab KH. Zainudin Al Amin dengan mengatakan bahwa kami sengaja duduk satu kelompok supaya lebih mudah mengenalkan anggota-anggota LDII yang hadir di forum dialog tersebut. Penjelasan ini melegakan para peserta non-LDII. Berkat kegiatan dialog MUI, LDII bisa diterima penuh sebagai pengurus MUI Kota Tarakan.

Selain di MUI, LDII juga aktif sebagai anggota FKUB Kota Tarakan, dan Badan Koordinasi Mubaligh Se-Indonesia (Bakomubin) Kalimantan Utara. Kehadiran LDII di lembaga-lembaga tersebut memberikan dampak positif bagi pengembangan infrastruktur lembaga. MUI Kota Tarakan, misalnya, banyak terbantu oleh LDII dalam penyediaan fasilitas kantor. "Gedung MUI Tarakan selesai dibangun oleh Pemkot pada 2021. Pemkot hanya fasilitasi gedung. Isinya tidak ada. Waktu itu kami pengurus MUI rapat, memutuskan setiang ormas Islam yang

ada di MUI membawa meja dan kursi masing-masing. Kalau kami, pengurus dari NU, Muhammadiyah, hanya membawa satu meja dan kursi untuk masing-masing. Tapi, LDII membawa 8 meja dan 40 kursi. Padahal mereka hanya butuh satu meja saja. Sisanya, kata mereka untuk MUI. Jadi MUI tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli meja tamu atau meja dan kursi ketika mengadakan acara," kata pengurus MUI dari Muhammadiyah.

LDII juga memfasilitasi Kantor Bakomubin Kalimantan Utara. Salah satu rumah KH. Zainudin Al Amin dijadikan kantor Bakomubin. Bahkan Ketua Bakomubin berasal dari organisasi LDII, menjadikan Kalimantan Utara sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki pucuk pimpinan Bakomubin di luar NU dan Muhammadiyah.

Seperti dijelaskan sebelumnya, LDII mewajibkan anggotanya menyalurkan zakat, shodaqoh, dan infaq ke LDII sendiri. Meski demikian LDII menyalurkan donasi-donasi tersebut bukan hanya untuk warga LDII. Dalam pengelolaan zakat fitrah, misalnya, LDII mengumpulkan zakat fitrah anggotanya kemudian disalurkan sebagian besar ke Baznas setelah dibagikan ke anggotanya yang kurang mampu. "LDII menjadi penyalur zakat fitrah terbesar dalam bentuk beras ke Baznas Kota Tarakan dibanding ormas-ormas Islam lain," kata pengurus Baznas Kota Tarakan, "Bahkan untuk hari raya Idul Adha, LDII merupakan ormas Islam penyuplai daging Qurban Sapi terbanyak di Kota Tarakan."

LDII dan Politik Etnis

Ketegangan etnis kerap bereskalasi menjadi kekerasan di Kalimantan. Menjelang kejatuhan Orde Baru dan masa transisi demokrasi, beberapa konflik kekerasan terjadi di sini akibat pertikaian etnis melibatkan etnis Madura, Dayak, dan Melayu (Davidson 2008). Namun tidak semua provinsi mengalami konflik kekerasan setidaknya sampai fase transisi demokrasi berakhir (2004).

Salah satu provinsi di Kalimantan yang tidak mengalami konflik kekerasan etnis adalah Kalimantan Timur. Predikat aman bagi seluruh etnis di Kalimantan Timur mulai pudar ketika wilayah ini mulai menyelenggarakan politik otonomi daerah dan tumbuhnya organisasi-organisasi primordial. Keberadaan organisasi kesukuan berhasil memanfaatkan tersingkirnya elite-elite politik pribumi, marginalisasi ekonomi Suku Dayak Tidung untuk membangun aliansi politik

melawan etnis pendatang yang menguasai sektor ekonomi dan politik di Tarakan. Puncaknya adalah kerusuhan Tarakan yang melibatkan Suku Tidung dan Bugis Letta (Wilson 2013).

Masing-masing suku membawa bendera organisasi priomordialnya sendiri-sendiri. Di Belakang Suku Tidung ada Pusaka (Persekutuan Suku Asli Kalimantan), Lembaga Adat Tidung Ulun Pagun (LATUP), dan Forum Komunikasi Rumpun Tidung (FKRT). Sedangkan di sisi orang Bugis Letta ada Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dan Kerukunan Keluarga Pinrang (KKP). Mengapa LDII terseret ke dalam kerusuhan Tarakan?

Kerusuhan Tarakan bermula dari keributan kecil antarpemuda dari suku Tidung dan Bugis Letta pada Minggu malam, 26 September 2010 di Perumahan Juwa Permai. Pemuda Bugis Letta dianggap mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Merasa tersinggung, mereka menyerang rumah pemuda Tidung hingga mengakibatkan nyawa melayang. Penduduk Suku Tidung dimobilisasi ormas-ormas primordial untuk membalas dendam. Kebetulan pemuda Bugis itu memiliki anggota keluarga yang merupakan warga LDII dan dekat dengan Haji Sani.

Suku Tidung menuduh Haji Sani menyembunyikan para pemuda Bugis Letta yang belum tertangkap polisi. Karena itu, mereka menyerang rumah Haji Sani, kios-kios milik penduduk Suku Bugis Letta dan hampir merusak masjid Babul Haq milik LDII di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo. Karena merasa perlu melindungi asset LDII, anggota LDII yang ada di masjid tersebut terlibat pertikaian. Warga Bugis Letta dan LDII berhasil memukul mundur. Mereka akhirnya melakukan konsolidasi di Masjid Agung Ma'arif Kota Tarakan.

Masjid Agung Ma'arif adalah masjid publik, identik dengan Nahdlatul Ulama, kebetulan dipimpin oleh ulama kharismatik yang juga Ketua LATUP yakni KH. Abdul Wahab. Konflik semakin mengalami eskalasi ketika KH. Abdul Wahab terlibat mobilisasi. Melihat situasi makin mengarah kepada konflik sektarianisme agama, KH. Zainuddin Al Amin bersama beberapa pengurus tidak memilih untuk melakukan mobilisasi tandingan meski anggota dan aset-asetnya terancam oleh mobilisasi masa.

Mereka meminta warga LDII tidak terlibat dalam kekerasan. Mereka juga mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Muslim di Kota

Tarakan untuk menjelaskan bahwa LDII tidak terlibat dalam mobilisasi kekerasan. Tindakan ini mencegah konflik kekerasan etnis menjadi sektarian. Respons cepat dari pemerintah pusat juga ikut meredakan situasi. Aktifitas LDII di kelurahan-kelurahan yang mayoritas suku Bugis terhenti hampir sampai satu bulan karena banyak warga Bugis Letta mengungsi ke Sulawesi.

Heterogenitas etnis di dalam LDII Tarakan menjadi salah satu pendorong mengapa LDII secara organisasi tidak terlibat dalam mobilisasi kekerasan. Banyak orang-orang LDII yang bukan beretnis Bugis Letta menolak untuk terlibat kekerasan meskipun bersimpati terhadap saudaranya yang LDII dari Bugis Letta. Selain itu, keputusan penting LDII daerah harus mendapatkan izin dari Pusat. LDII pusat tidak mengizinkan seluruh anggotanya baik yang berasal dari Jawa, Sumatra, maupun Sulawesi untuk terlibat kekerasan. Pascarekonsiliasi, Haji Sani dan KH. Abdul Wahab mewakili organisasi etnis-agama masing-masing rutin mengadakan ceramah di masjid-masjid untuk mengobarkan perdamaian bukan perang.

Penutup

LDII menjadi salah satu organisasi heterodoks Islam di Indonesia yang berhasil keluar dari kemelut internal maupun eksternal. Keberhasilannya telah menjadikan LDII sebagai ormas Islam yang penting dalam dinamika sosial, politik, dan keagamaan nasional maupun lokal. Namun, keberhasilan LDII melakukan integrasi di level nasional tidak sama seperti di tingkat lokal. Dengan kata lain, masih ada LDII di level Kabupaten atau Kota yang belum bisa mengatasi diskriminasi dan persekusi. Kasus LDII Kota Tarakan menunjukkan bagaimana mereka berhasil membangun LDII di tengah ancaman hukum penodaan agama, tindakan intoleransi dari masyarakat dan pemerintah, dan menguatnya politik identitas.

Proses adaptasi organisasi (Hilmi 2013) dalam merespons perubahan politik nasional menjadi bingkai penting mengapa organisasi ini bisa bertahan, semakin berkembang, dan terhindar dari implementasi pasal penodaan agama. Organisasi heterodok Islam lain seperti Ahmadiyah dan Al-Qiyadah al-Islamiyah tidak mampu menghindari tuduhan sesat dan menodai Islam hingga akhirnya pemerintah membatasi mereka.

Keberhasilan LDII di tingkat pusat dalam merespons perubahan politik ditantang ketika Indonesia memasuki tata kelola agama-politik

yang jauh lebih rumit. Meski Agama menjadi domain urusan pemerintah pusat, Kepala Daerah kerap mengatur kehidupan agama warganya demi menjaring dukungan agamawan kelompok mainstream lokal. Dampaknya kebijakan publik lebih memfavoritkan aspirasi kelompok tertentu, mendiskriminasi organisasi yang dianggap menyimpang.

Keberhasilan LDII Kota Tarakan dalam melakukan reintegrasi dengan kelompok-kelompok Muslim ortodoks banyak ditentukan oleh kemampuan elite-elite lokal LDII dalam memanfaatkan momentum keterbukaan politik dan krisis ekonomi. Kemampuan elite-elite LDII lokal berjalan maksimal karena adanya pembagian kerja di antara mereka. LDII Kota Tarakan juga cenderung menghindari ketergantungan kepada kepemimpinan kharismatik dan model *one man show* dalam mengelola organisasi. Kemunculan figur-figur seperti KH. Zainuddin Al Amin dan Haji Sani menandakan keberhasilan LDII dalam regenerasi. Bahkan LDII Kota Tarakan tampak sudah siap memunculkan generasi berikut, seperti Zainal, KH. Ishaq, Hasman, Rudin, Komarudin dan figur-figur muda lain dari Sulawesi Selatan untuk menggantikan generasi kedua LDII Kota Tarakan.

Studi LDII Kota Tarakan juga menunjukkan aspek lain yakni pentingnya kebebasan beragama dalam pembangunan ekonomi di daerah (Johnson & Koyama 2019). Elite-elite lokal LDII sebagian besar adalah pelaku ekonomi di Kalimantan Utara. Tidak adanya regulasi dan tindakan pemerintah yang membatasi aktivitas LDII mendorong mobilitas ekonomi LDII berkembang dan berdampak kepada masyarakat umum di Kalimantan Utara. Studi tentang dampak dari kebebasan beragama tentang pembangunan ekonomi di daerah perlu diperluas sehingga kita bisa melihat mekanisme bagaimana elite-elite politik dan ekonomi-agamawan lokal berinteraksi menentukan kondisi kebebasan beragama dan dampaknya terhadap pembangunan.***

Daftar Rujukan

- Badan Pusat Statistik. 2000. *Kalimantan Timur Dalam Angka*. Jakarta: BPS.
- Davidson, Jamie. 2008. *From Rebellion to Riots: Collective Violence on Indonesian Borneo*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Johnson, Noel D dan Koyama, Mark. 2019. *Persecution and Toleration: The Long Road to Religious Freedom*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- M, Himi. 2013. *Pasang Surut Relasi Agama dan Negara*. Depok-Jawa Barat: Elsas.
- Wilson, Chris. 2013. "Ethnic outbidding' for patronage: the 2010 riots in Tarakan, Indonesia." *South East Asia Research* 21 (1), 105-129.

Bab 4

Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Surakarta, Jawa Tengah

Raditya Darningtyas & Agidia Oktavia

Pendahuluan

Dilihat dari keberadaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang lebih luas di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, LDII di Surakarta menarik dan penting didalami khusus karena alasan kekhasan Surakarta, Jawa Tengah. Kekhasan itu tampak dilihat dari segi konteksnya, tantangan dalam tata kelola kerukunan umat beragama, terutama karena komposisi penduduk kota itu. Luas wilayah Kota Surakarta relatif kecil, mungkin hanya seukuran kecamatan di kabupaten-kabupaten di Solo Raya. Tetapi jumlah penduduknya cukup besar dan majemuk dari segi agama dan kecil kemungkinan bagi mereka untuk tidak saling berjumpa dan berinteraksi dengan orang dari kelompok agama yang berbeda. Dalam konteks ini, LDII adalah bagian dari kelompok Muslim yang merupakan kelompok mayoritas agama (Islam) di Surakarta.

Selain mengenai sejarah dan demografi LDII di Surakarta, riset ini juga ingin mendalami kekhasan LDII di Surakarta dibanding LDII-LDII di tempat lain. Hal ini terutama akan dilihat dari segi dampaknya terhadap hubungan LDII dengan pemerintah daerah, organisasi-organisasi massa Islam lain setempat, dan organisasi-organisasi lain secara umum di Surakarta.

Secara keseluruhan, kami mengambil dua kesimpulan utama mengenai LDII di Surakarta. *Pertama*, upaya membangun jaringan dengan aktor pemerintah telah dilakukan sejak awal LDII berdiri guna

melindungi aktivitas warga LDII di Surakarta. Hal ini terlihat dari kecenderungan organisasi LDII untuk selalu tertib administrasi dan membangun hubungan dengan pejabat daerah setempat baik secara formal maupun hubungan personal. Hal ini juga yang selama ini berperan dalam menjaga keberadaan LDII di Surakarta.

Kedua, Kota Surakarta memiliki konteks khusus di mana kompetisi memperebutkan otoritas keagamaan di antara organisasi masyarakat Islam sangatlah ketat, khususnya di antara empat ormas Islam terbesar di sana, yaitu: Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, LDII, dan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA). Penerimaan terhadap LDII di Kota Surakarta mulai tampak bermasalah sejak munculnya nasihat (tausiyah) MUI yang mengkritik kurang maksimalnya penerapan paradigma baru LDII pada Mei 2021. Surat tausiyah MUI tersebut menjadi landasan bagi kelompok penolak LDII di Surakarta untuk memperkuat klaim bahwa LDII merupakan organisasi yang sesat. Hal ini mendorong LDII untuk mulai berjejaring dengan ormas-ormas Islam lainnya di Surakarta guna mencari mitra dalam membangun legitimasinya sebagai organisasi agama Islam yang sah.

Laporan ini didasarkan atas wawancara dengan 21 narasumber yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, pengurus DPD LDII, tokoh organisasi masyarakat Islam lainnya, kepolisian, tentara, serta beberapa mantan anggota LDII. Untuk memperoleh keterangan lebih banyak mengenai kiprah kelompok perempuan di LDII di Surakarta, kami juga sengaja mewawancarai anggota perempuan LDII dan staf pengajar perempuan di Pesantren LDII Budi Utomo, Surakarta.

Laporan ini diawali dengan keterangan umum terkait sejarah dan kondisi demografis LDII di Kota Surakarta. Laporan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kekhasan LDII lokal Surakarta dari segi substansi. Dalam rangka memahami kapasitas LDII Surakarta dalam berjejaring dengan pemangku kepentingan lokal, bagian selanjutnya akan mengulas mengenai hubungan LDII dengan jajaran pemerintah daerah serta hubungan LDII dengan organisasi masyarakat Islam lainnya di Surakarta. Untuk memperkaya dinamika pergerakan LDII di Surakarta, laporan ini juga dilengkapi dengan ulasan mengenai fenomena mantan anggota LDII atau yang disebut dengan istilah "LDII Hijrah" dan peran perempuan dalam LDII.

Sejarah dan Demografi LDII Kota Surakarta

Kota Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini terdiri

dari lima kecamatan dan dikelilingi oleh enam kabupaten: Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Kumpulan wilayah di atas dikenal dengan sebutan Solo Raya. Luas wilayah Kota Surakarta relatif kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten di sekitarnya, tapi menjadi kota terpadat di Jawa Tengah dengan jumlah populasi sebanyak 522.643 jiwa (BPS, 2021).

Penduduk kota ini cukup beragam dari segi agama. Sebagian besar penduduk kota ini beragama Islam (450.392), disusul Kristen (79.819), Katolik (40.491), Budha (1.329), Hindu (378), dan lainnya (151) (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2021). Kondisi kemajemukan dan dinamika antarkelompok baik inter maupun intraagama kerap mewarnai kondisi kerukunan di Surakarta.

Jumlah anggota LDII di Surakarta sulit dipastikan karena tidak ada kartu anggota khusus yang diperuntukan bagi warga LDII. Ketua DPD LDII Muhammad Zain sendiri mengatakan ada sekitar 25.000 warga Muslim Surakarta yang menjadi anggota LDII (wawancara, 11 April 2022). Sementara Kepala Kemenag Kota Surakarta Hidayat Masykur memperkirakan terdapat 20.000 anggota LDII di Surakarta (Wawancara, 11 April 2022). Estimasi jumlah tersebut menempatkan LDII sebagai salah satu dari empat ormas Islam terbesar di Kota Surakarta setelah NU, Muhammadiyah, dan MTA.

Perkembangan LDII di Surakarta dimulai tahun 1970-an melalui kelompok-kelompok pengajian yang dibentuk Lembaga Karyawan Islam (Lemkari), yang saat itu belum resmi menjadi organisasi LDII. Warga LDII Surakarta di masa ini biasa berkumpul secara rutin dalam acara pengajian di masjid Tiang Satu. Dengan makin bertambahnya jumlah warga yang bergabung, beberapa masjid lain pun dibangun.

LDII mulai berkembang di Surakarta sekitar tahun 1970 melalui kelompok-kelompok pengajian Lemkari tetapi belum resmi menjadi organisasi LDII. Kelompok pengajian ini awalnya berkumpul di Masjid Tiang Satu. Setelah jumlah warga bertambah, kami kemudian membangun masjid lain di Kijang Saren dan Tegal Sari. LDII Pusat berdiri pada 1972, setelah itu kami juga menjadi organisasi resmi LDII di daerah. Kemudian LDII berkembang ke Solo Raya. Ketua DPD pertama adalah Alm. Syamsul Bahri yang menjabat selama beberapa periode, kemudian dilanjutkan oleh saya. (Wawancara Muhammad Zain, 11 April 2022)

Hingga tahun 2022, terdapat 37 masjid dan 18 kelompok pengajian yang dikelola oleh LDII Kota Surakarta. Selain itu, LDII Surakarta mengelola tiga lembaga pendidikan yang terdiri dari: Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Insan Thoyibah, SMP Budi Utomo, dan SMA Budi Utomo. LDII Surakarta juga memiliki empat Yayasan, yakni: Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Roudhotul Jannah Surakarta, Yayasan Baitul Fil Jannah, Yayasan Budi Utomo, dan Yayasan Bina Insan Thoyibah.

Salah satu lembaga pendidikan utama yang dikelola LDII di Surakarta adalah Pondok Pesantren Budi Utomo yang didirikan oleh Kyai Thoyibun pada 1986. Kyai Thoyibun adalah ayah Ketua DPD LDII Kota Surakarta saat ini dan tokoh nasional LDII. Selain pendiri, Kyai Thoyibun juga saat ini menjabat sebagai Ketua Pondok Pesantren Budi Utomo. Dia merupakan tokoh agama terkemuka di Kota Surakarta dan dulunya sempat bergabung dengan organisasi Muhammadiyah Surakarta. Tentang pesantren yang dipimpinnya, dia mengatakan: “Awalnya berlokasi di Tegal Sari dengan dua guru dan tujuh santri. Kami kemudian pindah ke lokasi saat ini tahun 1996 dan saat itu juga sudah terdaftar di Kemenag. Saat ini total murid di pesantren berjumlah 1.000 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia” (wawancara Thoyibun, 14 April 2022).

Kekhasan LDII Lokal Surakarta

Kota Surakarta memiliki berbagai organisasi masyarakat Islam dengan beragam kecenderungan ideologi. Empat ormas Islam terbesar di kota ini (NU, Muhammadiyah, MTA dan LDII) memiliki ukuran dan jumlah massa yang relatif seimbang. Alhasil, “perebutan” otoritas keagamaan di tengah masyarakat Islam berlangsung ketat. Kedekatan dengan pemerintah akan berbanding lurus dengan posisi strategis dan privilese yang akan dimiliki. LDII Kota Surakarta sangat menyadari hal ini. LDII Kota Surakarta berupaya untuk menjaga relasi yang baik dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta.

Eksistensi massa LDII yang solid menjadi kekuatan tersendiri dalam relasinya dengan pemerintah. Apalagi LDII Kota Surakarta cukup tertib secara administrasi. Seperti diakui Yulianto Eko Prasetyo, Kesbangpol Surakarta, LDII adalah salah satu organisasi massa Islam yang sudah terdaftar di Kesbangpol, sementara beberapa organisasi lainnya belum terdaftar (wawancara, 9 April 2022). Lebih dari itu, menurut Sekretaris Kemenag Kota Surakarta, Zainur Ihsan Effendi, LDII Kota Surakarta

juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintah, misalnya dengan mengirimkan kontingen santri pondok pesantren dalam Pekan Olahraga Santri (wawancara, 10 April 2022).

Soliditas ini berpengaruh terhadap LDII di tingkat nasional. Muhammad Zain mengungkapkan, salah satu faktor utamanya adalah kemampuan LDII dalam mengelola komunikasi publik dengan baik yang menjadi contoh bagi LDII-LDII di daerah lainnya. Katanya lebih jauh:

Ada hal spesial dari LDII Surakarta yaitu menjadi salah satu tolok ukur nasional. Ketika Wapres JK (Jusuf Kalla) belum mendatangi DPP LDII, beliau sudah mendatangi terlebih dahulu LDII Surakarta. LDII Surakarta pernah mengadakan pengajian akbar yang dihadiri lebih dari 50 ribu warga hingga membuat Kota Solo itu macet ... acaranya di Lapangan Kota Barat dan parkirnya hingga Solo Square dan itu ingin menunjukkan bahwa kita itu ada. LDII Solo secara massa itu kita memiliki dan secara *bargaining* dari pemerintah pusat hingga PEMDA, kami bersyukur LDII Solo itu kompak dan solid dalam hal apa pun dan konsisten. Hal lainnya, LDII Solo sering dipuji karena bisa jadi *media daring* sebagai percontohan LDII dari daerah lain. Kegiatan 100 juta kalau tidak undang media akan percuma dampaknya dibanding kegiatan 5 juta tapi undang media. (Wawancara, 12 April 2022)

LDII Kota Surakarta mengimplementasikan paradigma baru melalui metode *green dakwah*. Maksudnya, melakukan dakwah dengan kata-kata yang menyejukkan dan menjadi potret baru bahwa LDII tidak eksklusif. Metode dakwah ini juga menjadi daya tarik bagi warga non-LDII untuk masuk ke LDII. Dalam pengakuan Muhammad Zain,

Saat ini untuk strategi dakwah kita memiliki *green dakwah* yang lebih *soft* kepada warga dan masyarakat dalam artian kata-katanya lemah lembut. Kemudian, ada juga dari sisi sosial, misalnya ketika ada anggota yang meninggal dunia, maka warganya akan datang semua dan memiliki solidaritas yang membuat warga non-LDII akhirnya masuk menjadi LDII. Di mana ketika meninggal itu yang menyalatkan dan menjadi pelayat itu banyak. Itu merupakan salah satu daya tarik LDII. (Wawancara, 12 April 2022)

Selain metode *green dakwah*, LDII Kota Surakarta secara konsisten mengimplementasikan budi pekerti luhur dalam membangun relasi dengan masyarakat. Bagaimanapun LDII Kota Surakarta tidak menafikan eksklusivitas LDII pada masa sebelumnya membuat LDII menjadi rentan mendapatkan persekusi dari masyarakat. Meskipun relasi LDII dengan pemerintah sangat baik namun jika dengan masyarakat tidak, hal ini akan rawan peristiwa kontraproduktif, gesekan dan pelarangan. Muhammad Zain menjabarkan,

Ada juga yang terkait dengan budi luhur, yaitu hubungan kita dengan masyarakat, karena selama ini kami organisasi sosial di Solo selalu mengingatkan warga LDII untuk meningkatkan budi luhur atau berbudi pekerti yang baik kepada masyarakat, perangkat desa, tetangganya – yang gunanya adalah ketika kita melakukan ibadah semuanya itu bisa berjalan lancar, berkomunikasi dengan warga sekitar juga lancar untuk menghindari gesekan yang tidak diinginkan. (Wawancara, 11 April 2022)

LDII Kota Surakarta memiliki sumber daya yang baik dan turut aktif dalam kegiatan sosial. Hal ini misalnya dilakukan dengan menyediakan mobil ambulans untuk digunakan secara cuma-cuma ke semua wilayah di Kota Surakarta, yang sangat membantu khususnya ketika Pandemi Covid-19 menyerang. Selain itu, seperti disaksikan Arif Anshori, mantan pengurus FKUB Kota Surakarta, para santri Pondok Pesantren Budi Utomo kerap mengadakan gotong royong membersihkan area di sekitar komplek perumahan di daerah Banjarsari dekat Pondok Pesantren (wawancara, 9 April 2022).

LDII Kota Surakarta memiliki beberapa faktor utama yang memperkuat eksistensinya. Di bawah ini adalah beberapa yang menonjol.

Pertama, konsistensi pelaksanaan pengajian dengan menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama. Kelompok pengajian LDII memiliki pengajian rutin yang rata-rata diadakan tiga kali seminggu. Materi pokok kajian LDII Surakarta mengikuti ajaran LDII Pusat, yaitu bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadits. Kami sempat mengikuti salat tarawih dan pengajian Ramadan di Masjid LDII Baitul Alaa pada 11 April 2022. Model pengajian dilakukan dengan langsung membaca Surah Al-Qur'an dan membahas artinya ayat per ayat. Saat itu tengah dilakukan tafsir surah An-Nahl dan ditekankan pentingnya untuk percaya pada kuasa Allah meskipun nalar manusia

tidak sampai: “Perbandingan ilmu Allah dengan ilmu manusia sangat jauh sekali. Ilmu Allah kalau ditulis dengan tinta dari banyak laut tidak akan cukup,” kata penceramah dalam acara itu.

Kedua, materi pengajian disesuaikan dengan menyesuaikan kebutuhan warga. Penyesuaian tema dilakukan di masing-masing kelompok agar tepat sasaran dengan kebutuhan anggota pengajian. Zain mengatakan:

Untuk tema pengajian di setiap kelompok biasanya disesuaikan dengan karakteristik anggotanya. Misalnya apabila ada anggota di sebuah kelompok adalah pemuda atau pemuda maka materi kajian terkait kepemudaan atau keputrian akan ditambahkan. Pengajian khusus untuk lansia, ibu-ibu dan anak-anak juga ada. Kami punya database anggota pengajian supaya materi kajiannya relevan dengan kebutuhan mereka.” (Wawancara, 11 April 2022)

Ketiga, solidaritas yang kuat di antara anggota LDII. Solidaritas anggota dijaga melalui pelaksanaan kegiatan rutin formal maupun memupuk kedekatan emosional secara informal. Misalnya, apabila seorang warga LDII tertimpa musibah, rekan-rekannya yang lain akan cepat bantu. Kalau ada yang meninggal akan dibantu biaya pemakamannya. Termasuk apabila ada warga LDII yang didiskriminasi: dipecah dari rumah sakit ormas Islam lain karena ketahuan anggota LDII.

Keempat, sumber daya yang terkelola dengan baik. Menurut pengakuan Zain, “Sumber pendanaan paling utama adalah sedekah dari anggota pengajian. Selain itu ada juga donatur dari warga LDII yang memiliki rezeki lebih” (wawancara, 11 April 2022). Sementara untuk Pesantren Budi Utomo, sumber dana utama adalah uang SPP santri, donasi, dan bantuan dari Kemenag. Pesantren juga menerima santri kurang mampu dan dapat belajar dengan beasiswa melalui subsidi silang.

Kelima, *entrepreneurship* dan kemandirian ekonomi. Menurut Zain,

Kami sebagai lembaga membantu mencari pekerjaan jika ada anggota yang mengalami diskriminasi di tempat kerjanya. Kami memiliki tim terkait kemandirian. Mas Arif ... adalah pengusaha yang menjual sepatu Specs dan merupakan bandar besar di Solo Raya, bahkan Pulau

Jawa. Dia merupakan warga LDII dan membantu warga LDII yang lain. Kami juga bekerja sama dengan BSI [Bank Syariah Indonesia] terkait pembiayaan KUR Kredit Usaha Rakyat agar warga LDII bisa mandiri. (Wawancara, 12 April 2022)

LDII merupakan salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Surakarta. Untuk itu, LDII cenderung lebih aktif dalam menghadapi upaya-upaya untuk menjatuhkan nama baik lembaganya. LDII pernah melaporkan tiga orang dengan tuduhan menyebarkan ujaran kebencian. Zain menceritakan:

Kemarin ada tiga [orang] yang kami laporkan melakukan ujaran kebencian dan itu selesai secara damai. Kasusnya membagikan berita hoaks terkait LDII. Walaupun di bawah itu (anggota lain) masih ingin memakai cara fisik (tetapi) karena ini negara hukum, maka kami inginnya dengan cara yang baik-baik. Karena ketika diselesaikan dengan cara fisik yang mendapatkan kejelekan adalah kita sendiri dan itu akan menjadi *playing victim* buat mereka. Walaupun yang memulai adalah mereka, tetapi ketika ada kekerasan fisik yang digunakan itu kita akan disalahkan. (Wawancara, 12 April 2022)

Mekanisme LDII Kota Surakarta dalam penyelesaian masalah menggunakan jalur hukum memperkuat eksistensinya, namun di sisi lain beberapa kalangan justru beranggapan sebaliknya. Hal ini dapat menjadi bumerang bagi upaya LDII menjalin relasi dengan organisasi masyarakat Islam ataupun warganon-LDII. Arif Anshori menyayangkan metode LDII Kota Surakarta yang langsung menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan dengan warga non-LDII. Padahal permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan metode mediasi di tingkat RT (Rukun Tetangga). Pelaporan atas warga yang menyebarkan fatwa MUI Lebak di grup RT dapat menimbulkan rasa antipati terhadap LDII daripada simpati. (Wawancara Arif Anshori, 9 April 2022)

Hubungan LDII dengan Pemda

Hubungan LDII dengan pemerintah daerah telah lama berlangsung dengan baik. LDII juga dikenal sebagai organisasi yang tertib administrasi sehingga setiap lembaga maupun acara publik yang ia kelola selalu diupayakan memiliki izin resmi dari badan pemerintahan.

Bahkan beberapa warga LDII sempat menduduki jabatan strategis di pemerintah, misalnya Suharso, yang adalah mantan Kepala Kesbangpol. Menurut pengakuan Yulianto Eko Prasetyo, Kesbangpol Surakarta sekarang:

Hubungan LDII dengan Kesbangpol tergolong baik. Mereka rajin kirim buletin ke kantor Kesbangpol. Organisasi mereka juga sudah terdaftar di pemerintah dan termasuk yang tertib administrasi. Pascaperistiwa di kantor MUI kemarin [peristiwa 6/11 di kantor MUI Surakarta, lebih jauh di bawah] LDII langsung mengirimkan *bundle* besar berisi klarifikasi mengenai ajaran-ajaran mereka yang sudah berparadigma baru. (Wawancara, 9 April 2022)

Selain menjalin hubungan formal, LDII juga gencar membangun hubungan personal dengan tokoh-tokoh strategis di pemerintahan termasuk dengan Kepala Kemenag Kota Surakarta, Hidayat Masykur. “Kita selalu menjalin hubungan baik dengan mereka (LDII). Kita juga kenal siapa anggotanya. Kalau ada undangan dari mereka, saya sangat jarang diwakilkan, karena saya ingin datang sendiri” (wawancara, 11 April 2022). Bahkan Kepala Kemenag ini pula yang berusaha agar ada warga LDII yang duduk sebagai pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta. Dalam pengakuannya:

Pelantikan pengurus FKUB itu telat sebulan karena dua bulan sebelumnya saya gerilya memberikan penjelasan pada mereka yang menolak LDII ... Anggota LDII ada sekitar 20.000 di Surakarta. Maka mereka harus mendapat tempat di FKUB. Kalau kita menafikan organisasi yang berbasis massa ini akan merepotkan di kemudian hari. Awalnya, mereka menolak [LDII masuk FKUB], tetapi saya jelaskan. Kalau masalah perbedaan akidah atau syariah, nanti kita bahas di belakang untuk kita dudukkan bersama. Kalau audiensi ke kami, LDII sudah melakukannya; tetapi audiensi ke orang banyak mereka tidak punya wadah. Kalau LDII tidak ditampung di FKUB, maka mereka akan makin kehilangan wadah. (Wawancara, 11 April 2022)

Upaya menjalin hubungan baik secara formal maupun personal juga terbukti membuahkan hasil bagi keberlangsungan aktivitas warga LDII di Surakarta. Di tengah stigma negatif yang kerap disematkan pada warga LDII seperti eksklusivitas jamaah, ajaran yang mengafirkan

orang lain, kesaksian dari tokoh penting di tubuh pemerintahan yang melindungi keberadaan LDII menjadi krusial. Dalam pengakuan Hidayat Masykur:

Kalau soal bukti, saya sendiri sudah membuktikannya. Dibandingkan dengan yang dulu, LDII yang sekarang sudah berubah. Di rumah saya dulu di Wonogiri, di sampingnya [ada] masjid LDII. Ketika saya salat di sana, masjidnya dipel ... Itu sekitar tahun 2002. Dengan paradigma baru, [praktik seperti] itu sekarang tidak [ada lagi]. Dulu saya malah diundang mengisi pengajian di masjid LDII di Wonogiri. Sejak itu, mereka mulai membaaur pada sekitar tahun 2012. Dulu pengajian LDII tertutup, tetapi sekarang sudah pakai *loud speaker*. (Wawancara, 11 April 2022)

Upaya membangun hubungan baik formal dan personal diakui menjadi agenda penting dalam organisasi LDII. Hal ini diakui oleh Ketua DPD LDII Surakarta Muhammad Zain. Upaya berjejaring dengan berbagai pihak sudah mulai dia lakukan sejak dia aktif berorganisasi ketika masih kuliah di Universitas Sebelas Maret. Dia kemudian dipilih menjadi Ketua DPD dengan tugas khusus untuk membangun komunikasi ke luar. Muhammad Zain merupakan putra Kyai Thoyibun. Zain memiliki jaringan yang kuat baik dengan pemerintah, aparat keamanan maupun rekan di organisasi masyarakat lainnya. Hubungan personalnya dengan Wali kota Surakarta juga sangat dekat sejak aktif di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), yang merupakan gabungan dari beragam organisasi lainnya.

Saya memiliki *privilege* dari bapak saya. Kebetulan bapak saya sering diminta berceramah di Polres, Polda, oleh anggota TNI dan lainnya. Memang sedari kecil saya sering diajak untuk mendampingi hingga saat ini. Dari situlah saya memanfaatkan hal tersebut. Misalnya, ketika bertemu dengan yang lainnya itu, saya akan memperkenalkan diri saya sebagai Putra Pak Thoyibun dan menyapa di kegiatan lainnya. Dari situlah saya menjadi terbiasa, dan alhamdulillah setiap Dandim, Kapolres yang baru itu selalu silaturahmi pertama kali ke Pondok Budi Utomo dan itu yang membuat saya mengenal beliau-beliau. (Wawancara Muhammad Zain, 12 April 2022)

Upaya berjejaring dengan pemerintah semakin gencar sejak

Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) LDII dilakukan pada tahun 2015. Pasca Muskernas LDII tahun 2015, terjadi perubahan kebijakan organisasi, di mana warga LDII diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota DPR dan DPRD. Hal ini dimanfaatkan LDII Surakarta hingga ketua DPD sebelumnya Alm. Syamsul Bahri menjadi anggota DPRD. Kesadaran mengenai pentingnya ikut berpolitik praktis guna melindungi hak dan kepentingan warga LDII juga dikonfirmasi oleh ketua DPD LDII, meskipun warga yang mencalonkan diri tidak secara resmi menggunakan nama legal organisasi:

Kita melihat situasi dan kondisi politik yang ada. Sudah saatnya LDII bukan hanya menjadi penonton saja, tetapi juga ikut aktif di dalam pemerintahan maupun politik praktis ... Untuk yang menjadi anggota dewan, itu juga tidak membawa nama LDII, tetapi kita menjembatani, misalnya beberapa partai politik itu meminta kita LDII untuk maju lewat partainya, kemudian kita membagikan informasi kepada yang lain bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri itu dipersiapkan dari sisi finansial, sisi kesiapan, sisi mayoritas warganya. Ketika itu sudah sesuai, maka semuanya itu akan diberikan rekomendasi oleh kita untuk kita atur agar satu daerah pilihan itu ada 2-3 orang warga LDII yang terlibat. (Wawancara Muhammad Zain, 11 April 2022)

Hubungan LDII dengan Ormas Keagamaan lain

Dibandingkan dengan relasi LDII dengan pemerintah, hubungan LDII dengan ormas keagamaan lain di Surakarta lebih kompleks dan bervariasi. Penolakan terkuat datang dari MUI Kota Surakarta dan beberapa tokoh Muhammadiyah yang menganggap LDII sesat dan belum menjalankan paradigma baru. Sampai saat ini LDII belum berhasil masuk sebagai pengurus MUI Kota Surakarta, padahal LDII telah berhasil masuk sebagai pengurus MUI di seluruh kabupaten di Solo Raya.

Kepala Kemenag juga mengaku terlibat dalam upaya mediasi MUI dan LDII khususnya pascaperistiwa “penggerudukan” kantor MUI oleh massa LDII bulan November 2021.

Kemarin kita sudah berusaha mediasi... saya sendiri sudah berulang kali berusaha memediasi. Kemarin kita pertemukan berkali-kali antara MUI dan LDII karena

MUI tidak mau mengakui LDII. Hingga akhirnya LDII sekarang masuk FKUB itu wujud keberhasilan mediasi yang pertama. (Wawancara Hidayat Masykur, 11 April 2022).

Selain mengimbuu warga LDII untuk menyambung silaturahmi dengan lingkungan tempat tinggal dan masyarakat secara luas, Muhammad Zain selaku Ketua DPD juga memiliki tugas khusus untuk membangun hubungan organisasi LDII dengan ormas keagamaan lainnya. Hal ini dia akui menjadi agenda khusus di masa kepemimpinannya untuk memastikan warga LDII mendapat legitimasi dan penerimaan sosial di kehidupan bermasyarakat.

Saya diminta oleh teman-teman pimpinan kecamatan dan para alim ulama [untuk menjadi ketua DPD]. Awalnya saya menolak, tetapi seiring waktu saya didatangi oleh para kiai dan alim ulama yang bilang, “LDII membutuhkan sosok yang bisa mendobrak komunikasi ke luar dan memiliki jaringan yang luas.” Saya diminta untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan saya pikir saya bisa melakukan itu. Tugas saya ada tiga: bagaimana supaya LDII masuk FKUB, bagaimana supaya LDII masuk MUI, bagaimana komunikasi LDII dengan ormas-ormas lain berjalan terbuka. (Wawancara, 11 April 2022)

Jaringan personal maupun organisasional yang dimiliki Muhammad Zain menjadi faktor kuat pendukung terjalannya hubungan yang baik dengan ormas lain, khususnya dengan NU. Zain kemudian juga mulai menggunakan jaringan personal ini untuk membantu urusan organisasi LDII. Keahlian berjejaring dan berorganisasi yang ia miliki diakui Zain sangat membantu perannya sebagai ketua DPD hingga ia medapat julukan “LDII moderat”.

Sejak kuliah saya sudah aktif berorganisasi ... di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kantor Dagang dan Industri (KADIN), komunitas otomotif, dan lainnya. Jadi saya aktif berteman. Dan mereka lihat saya sebagai LDII karena tahu saya anak Pak Thoyibun. Dari situ saya mulai memperkenalkan, bahwa LDII itu tidak seperti yang mereka dulu pikirkan ... Sampai teman-teman bilang saya ini LDII moderat. Awalnya dulu saya saja secara personal, kemudian gerbong besar ini saya cantolkan ke sana supaya jangan saya saja yang aktif berjejaring ke luar.

(Wawancara, 12 April 2022)

Selama beberapa tahun terakhir, terdapat tiga peristiwa utama yang dapat menggambarkan dinamika hubungan LDII dengan organisasi masyarakat Islam lainnya di Surakarta, yaitu: (a) masuknya LDII ke dalam FKUB Kota Surakarta untuk pertama kalinya; (b) pelaporan pencemaran nama baik oleh LDII Surakarta; (c) kedatangan Massa LDII ke Kantor MUI Surakarta pada 6 November 2021.

Masuknya LDII ke dalam FKUB Surakarta

Sejak FKUB didirikan di Surakarta, Muhammad Zain selaku perwakilan LDII berhasil masuk sebagai anggota FKUB untuk pertama kalinya di tahun 2022. Sebelumnya, LDII tidak bisa masuk karena anggota FKUB harus mendapat persetujuan dari MUI. Sejak kepemimpinan wali kota saat ini, proses pemilihan anggota FKUB tidak lagi harus mendapat persetujuan dari MUI. Ketua FKUB sebelumnya, Subari, juga merupakan Ketua MUI yang secara terang-terangan menolak ajaran LDII sehingga kesempatan LDII masuk ke FKUB waktu itu sangat kecil. Ketika Subari tidak lagi menjadi ketua FKUB kesempatan mulai terbuka. Terkait hal ini, Alqaf Huda, Wakil Ketua FKUB, bercerita: “Oleh Wali kota, Pak Subari diundang dan disuruh memilih mau jabatan Ketua FKUB atau Ketua MUI, karena dia tidak boleh rangkap jabatan. Karena alasan ini, beliau melepas jabatan Ketua FKUB” (wawancara, 12 April 2022).

Upaya untuk meminta audiensi dengan ormas keagamaan lain untuk menggalang dukungan memasukkan LDII ke FKUB juga sudah dilakukan sejak tahun 2021 oleh LDII. Salah satunya adalah permohonan audiensi dengan NU Surakarta. Meski di dalam tubuh NU sendiri masih belum seluruhnya menerima LDII, Mashuri selaku Ketua PCNU Surakarta dan Ketua FKUB saat ini meyakinkan anggota yang lain untuk memberi LDII kesempatan setelah LDII mengirimkan undangan untuk audiensi dengan NU. Menurut Mashuri,

Kami baru merespons surat permintaan audiensi itu setahun setelah dikirimkan. Setelah mengumpulkan data lapangan, saya memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi LDII untuk membuktikan dirinya bisa konsisten menjalankan paradigma baru. Kalau nanti terbukti belum bisa, bukan tidak mungkin keanggotaannya tidak berlanjut di kepengurusan selanjutnya. (Wawancara Mashuri, 13 April 2022)

Upaya untuk mendapat dukungan dari ormas NU menjadi pilihan yang strategis bagi LDII Surakarta mengingat kebanyakan penolakan terhadap LDII datang dari tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kompetisi antara organisasi keagamaan Islam di Surakarta cukup ketat baik dari segi perebutan sumber daya maupun otoritas keagamaan. Ukuran ormas yang relatif seimbang antara NU, Muhammadiyah, MTA, dan LDII membuat dinamika perebutan pengaruh di antaranya sangat dinamis.

Zain melihat momentum dan peluang politik di mana ia dekat dengan Wali kota Surakarta dan adanya kompetisi antara NU dan Muhammadiyah yang sangat kuat di Surakarta. Dia mulai menjalin komunikasi dan memutuskan untuk meminta audiensi dengan NU. Katanya, “Ada persaingan antara NU dan Muhammadiyah di Surakarta. Mas Wali kota berharap LDII bisa menjadi penengah, makanya kita diharapkan masuk ke FKUB” (wawancara Muhammad Zain, 12 April 2022).

Ketika pemilihan ketua FKUB dilakukan, Ketua PCNU Mashuri terpilih menjadi ketua. LDII sejak awal sudah menjalin kedekatan dengan Mashuri dan turut memberikan suara untuk Mashuri ketika pemilihan ketua FKUB. Kata Zain, “Saya sudah bilang ke Mas Mashuri, pokoknya aku *nderek* [ikut] sampeyan *yo Mas*” (wawancara Muhammad Zain, 12 April 2022). Aliansi dengan NU dan kedekatan dengan Wali kota kemudian berdampak pada terbukanya kesempatan bagi LDII untuk menduduki kursi anggota FKUB Kota Surakarta.

Pelaporan Pencemaran Nama Baik oleh LDII Surakarta

Pengurus LDII Surakarta pernah melaporkan salah satu warga kompleks Budi Utomo terkait UU ITE. Kasus ini bermula ketika salah satu warga (panggil saja “Rudi”, bukan nama sebenarnya) mengirimkan Fatwa MUI Kota Lebak mengenai LDII ke WhatsApp Group (WAG) warga RT dari aplikasi BaBe (Baca Berita) pada 16 Desember 2021. Rudi mengirimkan link berita dan fatwa tersebut tanpa menuliskan komentar apa pun. Meskipun tidak ada respons dalam group atas kiriman tersebut, Rudi tetap dilaporkan ke Polsek oleh Humas LDII pada 19 Desember 2021. Rudi mendapat panggilan dari Polsek atas laporan LDII Kota Surakarta pada 23 Desember 2021 (wawancara Rudi, 10 April 2022).

Rudi, seorang pengusaha frozen food, sangat terkejut dengan proses pemanggilan yang cepat tersebut. Dia kemudian menemui Pak

Thoyibun selaku Pimpinan Pesantren Budi Utomo untuk meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami LDII Kota Surakarta atas fatwa MUI Lebak yang dia kirimkan ke WAG. Pak Thoyibun merespons dengan pertanyaan, “*Sampeyan ki ngopo ra seneng karo LDII?*” (“Kamu kenapa tidak suka dengan LDII?”). Rudi kemudian menyampaikan bahwa dirinya bukan tidak menyukai LDII, melainkan butuh klarifikasi atas fatwa MUI Lebak tersebut. Apalagi pada November 2021, ramai berita terkait LDII hijrah dan mobilisasi massa LDII ke kantor MUI Kota Surakarta.

Proses hukum tetap berlanjut pasca-*sowan* ke Pak Thoyibun. Pak Thoyibun juga menyampaikan, “*Nek tak cegah, sampeyan sudah digeruduk oleh anak-anak*” (“Jika tidak dicegah, kamu sudah digeruduk oleh anak-anak”). Alhasil, Pak Rudi menelepon adiknya meminta bantuan dalam menghadapi proses hukum. Adiknya meminta bantuan kepada pemilik firma hukum Sambulaga (wawancara dengan Rudi, 10 April 2022).

Pemilik firma hukum di atas kemudian melakukan pertemuan dengan Pak Thoyibun di Restoran Diamond. Pasca pertemuan tersebut, LDII Kota Surakarta mencabut laporan. Demikianlah masalah ini diselesaikan.

Peristiwa 6/11: Kedatangan Massa LDII ke Kantor MUI Surakarta

Peristiwa ini berawal dari keluarnya satu Surat Keputusan MUI Pusat, yang menyatakan bahwa pengurus MUI Pusat sudah berkomunikasi dengan pengurus LDII Pusat terkait tekad seluruh jajaran LDII untuk menerapkan “paradigma baru” dan bahwa kedua belah pihak juga bersepakat untuk terus meningkatkan komitmen ke arah penyempurnaan pelaksanaannya. Hal ini tidak hanya berlaku di pusat melainkan di seluruh daerah. Dalam hal ini, LDII Kota Surakarta juga menganut paradigma baru, namun apakah paradigma baru sudah dijalankan atau belum masih berada dalam peninjauan MUI Kota Surakarta.

Terkait hal di atas, LDII Kota Surakarta terbelah menjadi dua: pertama, LDII Kota Surakarta; dan kedua, LDII Eks Kerasidenan Surakarta atau lebih dikenal dengan LDII Hijrah. LDII hijrah meyakini bahwa tidak ada perubahan dalam LDII Kota Surakarta, di mana mereka masih menganut sistem keamiran dan paradigma ajaran Islam Jamaah.

Pada Oktober 2021, atas arahan MUI Pusat, MUI Kota Surakarta

berinisiatif menggelar rapat koordinasi yang melibatkan MUI se-Solo Raya pada hari Sabtu, 6 November 2021. Salah satu agendanya adalah mendengarkan secara lengkap laporan warga LDII Hijrah bernama Adi Kurdi, Ahmad Shodikin Fauzi, dan Ichwan Hadi.

Sayangnya, surat undangan rapat koordinasi di atas viral di media sosial sehingga mengundang kemarahan warga LDII. Alhasil, sejumlah massa LDII mendatangi kantor MUI Kota Surakarta pada 6 November 2021. Muhammad Zain (Ketua DPD LDII Kota Surakarta) mengaku bahwa massa tersebut adalah warga LDII, namun ia mengaku tidak memobilisasi massa tersebut dan turut meminta massa untuk tidak melakukan tindakan kekerasan. Acara kemudian ditunda hingga waktu yang belum bisa dipastikan.¹

Aksi warga LDII yang digelar sekitar pukul 07:00 WIB terpaksa dibubarkan polisi lantaran jumlah massanya cukup banyak. “Pemberitahuan ke Polsek pesertanya hanya 40-70 orang. Kenyataannya ada ribuan peserta yang hadir,” ungkap Kapolsek Pasar Kliwon AKP Achmad Riedwan Prevoost. Sekitar 70 personel dari Polsek, Polresta Sabara, Brimob dibantu anggota Korem dan Kodim ikut mengamankan aksi massa tersebut.² Muhammad Zain mengatakan bahwa dia mendapat telepon dari Polres agar anggota LDII mundur. “Peristiwa ini bisa disebut membawa berkah terselubung di mana orang-orang jadi tahu eksistensi LDII. Bahwa kami ini ada sehingga tidak boleh [sembarangan diperlakukan],” ungkapnya (wawancara, 29 Maret 2021).

Sesudah peristiwa tersebut, kelompok yang menamakan dirinya Aliansi Santri Nusantara mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada MUI Surakarta terkait pengundangan LDII Hijrah. Namun salah satu anggota tim kuasa hukum MUI Surakarta memutuskan untuk tidak menggubris surat tersebut. “Saya salah satu bagian dari tim hukumnya. Kami memutuskan tidak mau merespons surat itu supaya tidak perlu memberi mereka legitimasi” (wawancara Alqof Hudaya, 12 April 2022).

Muhammad Zain optimis bahwa relasi antara LDII dengan MUI

¹ “LDII Ungkap Alasan Ribuan Anggotanya Datangi Kantor MUI Solo,” *Kumparan*, 6 November 2021, <https://kumparan.com/bengawannews/ldii-ungkap-alasan-ribuan-anggotanya-datangi-kantor-mui-solo-1wroSjx5J1L/2> (diakses 20 Juni 2022).

² “Ribuan Massa LDII Menggeruduk Kantor MUI Solo, Polisi dan TNI Turun Tangan,” *JPPN.com*, 6 November 2021, <https://www.jpnn.com/news/ribuan-massa-ldii-menggeruduk-kantor-mui-solo-polisi-dan-tni-turun-tangan> (diakses 20 Juni 2022).

Kota Surakarta berjalan baik dan tidak lama lagi LDII juga akan menjadi bagian dari MUI Kota Surakarta. Meskipun saat ini masih ada beberapa hambatan dari aspek penerimaan. Namun dia optimis karena relasinya dengan tokoh-tokoh di MUI baik. “Hubungan saya secara personal dengan Pak Subari [ketua MUI] baik sekali... kemarin waktu istrinya meninggal juga saya datang berduka...tapi entah kenapa secara organisasional beliau sangat menolak LDII” (wawancara Muhammad Zain, 12 April 2022).

LDII Hijrah

Sebutan “LDII Hijrah” pertama kali muncul di Surakarta pada surat undangan MUI untuk menghadiri rapat koordinasi tanggal 6 November 2021, seperti disinggung di atas. Sebutan ini diperuntukkan bagi beberapa mantan anggota LDII, yang sudah menyatakan keluar karena menganggap LDII masih mengamalkan ajaran Islam Warga yang tidak sesuai dengan paradigma baru. Dalam rangka merespons Surat Tausiyah MUI pusat tentang paradigma baru LDII, MUI Surakarta bermaksud melakukan audiensi dengan mantan anggota LDII sebagai narasumber, Namun rencana ini gagal terlaksana akibat dibatalkan karena kedatangan massa LDII yang menolak acara tersebut.

Titik perselisihan utama terletak pada saling tuduh antara mantan anggota LDII Surakarta atau “LDII Hijrah” dan LDII bahwa masing-masing pihak yang paling menjalankan paradigma baru. Mantan anggota LDII mengklaim bahwa LDII sebenarnya masih menjalankan ajaran Islam Warga yang lama seperti *tafiri* dan sistem *keamiran* (wawancara dengan tokoh LDII Hijrah, Adi Kurdi, 23 April 2022).

Mantan anggota LDII di Surakarta juga berjejaring dengan mantan anggota LDII dari daerah lainnya. Gerakan mantan anggota LDII tersebut antara lain memiliki tujuan ingin memperbaiki ajaran LDII yang belum menjalankan paradigma baru dengan sungguh-sungguh. “Namun apabila tidak bisa memperbaiki, ya bukan tidak mungkin kami ingin membubarkannya [LDII]” (wawancara mantan anggota LDII, Agus Mukhlisin, 23 April 2022). Mereka ingin memperbaiki LDII yang dianggap masih menyimpang dengan bergerilya berjejaring dengan mantan anggota lainnya di seluruh provinsi di Indonesia. Beberapa tokoh LDII Hijrah seperti Yunadi juga mengaku menjadi informan MUI Pusat dalam mengkaji soal apa yang disebutnya sebagai “kesesatan LDII” (wawancara mantan anggota LDII, Yunadi, 19 April 2022).

Menurut salah satu pegiat langkah di atas, gerakan “hijrah” dari LDII sebenarnya sudah ada dari masa ke masa. Namun secara masif baru belakangan terjadi, dengan maraknya penggunaan media sosial dan ikut hijrahnya tiga orang pengajar utama LDII yaitu Ustaz Abdulloh Mas’ud, Ustaz Kholil Bustomi, dan Ustaz Abdul Aziz Ridwan pada akhir 2018 (wawancara mantan anggota LDII, Sigit, 19 April 2022). Dia juga mengklaim keterlibatan tujuh anggota LDII ke dalam Warga Ansharut Daulah (JAD), organisasi teroris yang berkiblat kepada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan sekarang menjadi narapidana terorisme (napiter).

Namun klaim ini masih harus ditelusuri lebih jauh kebenarannya – dan sejauh ini kami tidak berhasil menemukannya. Tanggapan resmi LDII menyebutkan bahwa mereka berusaha untuk menerapkan apa yang dikenal sebagai “paradigma baru”, tetapi orang lain mungkin punya penilaian mereka sendiri, yang tidak terlepas dari beragam kepentingan. Mengenai peristiwa 6 September di atas, Muhammad Zain menambahkan bahwa kedatangan massa LDII berdasarkan rasa keingintahuan mengenai siapa sebenarnya LDII Hijrah dan mengapa mereka menggunakan nama LDII. Sesudah dia telusuri, dia berkesimpulan sebagai berikut:

Orang-orang LDII Hijrah ini ... mohon maaf, dari pengamatan kami ... mereka tidak mau menyanyikan lagu Indonesia raya saat ada acara Agustusan dan [pada] upacara bendera mereka tidak pernah datang. Mereka merasa kecewa karena sejak awal LDII tunduk kepada NKRI, bahkan digaung-gaungkan setiap bulannya. Mereka tidak hormat terhadap bendera dan Pancasila. Mereka tidak banyak dan [jumlahnya] hanya hitungan jari. (Wawancara Muhammad Zain, 29 Maret 2021)

Perempuan LDII

Sejauh mana perempuan LDII Kota Surakarta dapat merespons tantangan zaman? Tidak dipungkiri bahwa LDII Surakarta dikelola dengan sangat baik. Namun kiprah perempuan LDII menghadapi tantangan dalam kaitannya dengan partisipasi di ranah publik. Hal ini khususnya terkait kewajiban keberadaan mahram, perizinan dari mahram, dan sebagainya dalam aktivitas perempuan di ruang publik. Sayangnya hal ini belum menjadi perhatian sepenuhnya pimpinan LDII yang mayoritasnya adalah laki-laki.

Staf pengajar perempuan atau disebut *mubalighah* di Pesantren Budi Utomo menunjukkan masih minimnya peran maupun kesempatan perempuan dalam mengakses beasiswa Pendidikan. Keterhambatan ini dikarenakan ada syarat khusus bagi perempuan. “Ada program beasiswa ke Jerman, tetapi kami hanya buka untuk santri laki-laki karena kalau perempuan akan repot apabila harus pergi ke luar negeri sendirian tanpa mahramnya” (Wawancara Anis, pengajar Pesantren Budi Utomo,)

LDII Kota Surakarta belum memiliki organisasi khusus untuk mengakomodir peran dan aktualisasi diri bagi perempuan. Hal ini juga diamini oleh DPD LDII Surakarta, jika LDII dari pusat hingga daerah belum memiliki organisasi perempuan. Saat ini, LDII Kota Surakarta memiliki bidang keputrian pada tingkat Majelis Taklim PC dan Badan Otonom Pemuda. Tentu yang menjadi konsen adalah sejauh mana hal tersebut dapat mengakomodir peran dan kebutuhan perempuan secara egaliter. Menurut Muhammad Zain,

Kalau di LDII belum ada [organisasi perempuan LDII], tetapi di majelis taklim tingkat PC itu ada “keputrian”. Di LDII itu masuk di dalam Ormas kita dalam bidang keputrian atau kewanitaan. Karena kalau Fatayat NU itu adalah sayap organisasi dan LDII itu belum memiliki sayap organisasi, tetapi kita belum mengetahui di masa mendatang akan seperti apa, karena walaupun “keputrian” bukan sebagai sayap organisasi, tetapi kita sudah membentuk Badan Otonom Pemuda di Kota Solo, karena kita melihat untuk memfasilitasi generasi penerus yang ingin berorganisasi yang nantinya pengurus LDII itu bisa diambil dari mereka ke depannya. (Wawancara, 12 April 2022)

Keberadaan perempuan dalam LDII tentu tidak dapat dilepaskan dalam agensinya. Salah satu potret perempuan LDII adalah mereka yang memiliki pasangan non-LDII. Hal ini tentu dapat dilihat dari sejauh mana lembaga merespons hal ini. Pada sisi lain, jika lembaga tidak memperlakukan hal ini tentu mitos eksklusivitas dalam LDII dapat dipatahkan. Dalam penelitian kami, kami menemui salah satu warga LDII (sebut saja Ibu Arum, bukan nama sebenarnya) dengan keadaan berbeda aliran dengan suaminya yang lebih memilih berada dalam naungan nahdliyin.

Sejauh ini, dirinya tidak mendapatkan tantangan berarti selain

berada dalam pengajian terpisah dengan suaminya. Meski kemudian pilihan anak-anak menjadi tantangan, sejauh mana mereka menerima perbedaan *khilafiyah*. Pada sisi lain meskipun LDII di Surakarta sudah diterima dengan baik namun *rumor* yang berkembang sudah mengakar. Maka sejauh mana paradigma baru diterapkan LDII Kota Surakarta hingga ke tingkat terbawah?

Ibu Arum menyadari bahwa tidak sepenuhnya suami menerima pilihannya. Mereka mengambil titik tengah untuk tidak membahas permasalahan agama dalam rumah tangga dengan saling menghormati pilihan masing-masing. Ia terbiasa berada dalam masjid berbeda dengan suaminya. Sementara anak-anak mengikutinya karena selama menikah dirinya berbagi peran dengan sang suami untuk fokus mengurus rumah tangga. (Wawancara dengan Arum, 10 April 2022)

Metode pengajian LDII sangat sesuai dengan kebutuhannya untuk mengetahui Al-Qur'an dan Hadits secara langsung. Hal ini membuatnya lebih nyaman dan merasa semakin dekat dengan Allah Swt. Ia tidak banyak menyampaikan bagaimana lembaga memandang pernikahan beda pengajian. Namun pernikahan dengan satu pengajian (aliran) adalah lebih bagus dan sebaiknya diupayakan (Wawancara dengan Arum, 10 April 2022).

Penutup dan Kesimpulan

Laporan tentang LDII di Surakarta ini adalah bagian dari laporan penelitian yang lebih luas mengenai LDII secara keseluruhan di Indonesia. LDII di Surakarta dianggap perlu didalami khusus karena alasan kekhasan Surakarta yaitu dari segi konteks, tantangan dalam tata kelola kerukunan umat beragama, dan komposisi penduduk di Surakarta. LDII adalah bagian dari kelompok Muslim yang merupakan kelompok mayoritas agama di Surakarta. Selain LDII, terdapat tiga organisasi Islam besar lainnya yaitu NU, Muhammadiyah dan MTA. Dinamika hubungan di antara keempat organisasi Islam tersebut baik dalam bentuk kolaborasi maupun kompetisi menjadi faktor penting untuk memahami tantangan tata kelola kerukunan di Surakarta.

Secara keseluruhan, kami mengambil dua kesimpulan utama mengenai LDII di Surakarta:

Pertama, upaya membangun jaringan dengan aktor pemerintah telah dilakukan sejak awal LDII berdiri guna melindungi aktivitas warga LDII di Surakarta. Hubungan dengan lembaga pemerintah juga

terus dijaga karena LDII sadar penuh bahwa aktivitas organisasi dapat berjalan lancar apabila mendapat legitimasi dari badan pemerintahan. Hal ini terlihat dari kecenderungan organisasi LDII untuk selalu tertib administrasi dan membangun hubungan dengan pejabat daerah setempat baik secara formal maupun hubungan personal. Ketika peristiwa khusus seperti kedatangan massa LDII pada 6 oktober 2021 terjadi, koordinasi dengan lembaga pemerintahan terkait seperti Kesbangpol dan aparat kepolisian dapat dengan cepat dilakukan. Hubungan yang baik dengan lembaga pemerintahan ini yang selama ini berperan dalam menjaga keberadaan LDII di Surakarta.

Kedua, Kota Surakarta memiliki konteks khusus di mana kompetisi memperebutkan otoritas keagamaan antarorganisasi masyarakat Islam sangatlah ketat, khususnya di antara 4 ormas Islam terbesar di sana: NU, Muhammadiyah, LDII, Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA). Penerimaan terhadap LDII di Kota Surakarta dianggap mulai bermasalah sejak munculnya Tausiyah MUI yang mengkritik kurang maksimalnya penerapan paradigma baru LDII. Surat Tausiyah MUI tersebut menjadi landasan bagi kelompok penolak LDII di Surakarta untuk memperkuat klaim bahwa LDII merupakan organisasi yang sesat. Hal ini mendorong LDII untuk mulai berjejaring dengan ormas Islam lainnya di Surakarta guna mencari mitra dalam membangun legitimasinya sebagai organisasi agama Islam yang sah.

Upaya membangun hubungan dengan organisasi Islam lainnya terwujud dalam agenda LDII untuk bergabung dalam FKUB dan MUI Kota Surakarta. Untuk agenda yang pertama, pada 2022, LDII berhasil masuk menjadi anggota FKUB setelah berupaya berjejaring dengan ormas Islam lainnya khususnya dengan NU. Kemampuan LDII Surakarta dalam membaca peluang dan momentum untuk menggunakan hubungan baik LDII dengan Kemenag dan wali kota setempat juga menjadi faktor pendukung masuknya LDII ke dalam FKUB. Namun, LDII Surakarta masih memiliki tantangan untuk bisa masuk dalam MUI Kota Surakarta meskipun MUI lainnya di wilayah Solo Raya sudah menerima perwakilan LDII sebagai anggotanya. Penolakan dari aktor tertentu dan tuduhan sesat masih menjadi faktor penghambat masuknya LDII ke dalam MUI.***

Narasumber Wawancara

Arum, warga LDII, 11 April 2022.

Anis, pengajar Pesantren Budi Utomo, 14 April 2022.

Arif Anshori, mantan pengurus FKUB Kota Surakarta, 9 April 2022.

Alqaf Hudaya, Wakil Ketua FKUB Kota Surakarta, 12 April 2022.

Hidayat Masykur, Kepala Kemenag Surakarta, 11 April 2022.

Mashuri, Ketua PCNU dan FKUB Kota Surakarta, 13 April 2022.

Muhammad Zain, Ketua DPD LDII, 11 dan 12 April 2022.

Rudi, warga non-LDII, 10 April 2022.

Sigit, mantan anggota LDII, 19 April 2022.

Thoyibun, Kepala Pesantren Budi Utomo, 14 April 2022.

Yulianto Eko Prasetyo, Kesbangpol Surakarta, 9 April 2022.

Yunadi, mantan anggota LDII, 19 April 2022.

Zainur Ihsan Effendy, Sekretaris Kemenag Surakarta, 10 April 2022.

Bab 5

LDII di Banda Aceh: Berdakwah di Daerah Istimewa Serambi Mekkah

Siti Nurhayati

Pendahuluan

Laporan tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Aceh ini adalah bagian dari laporan riset yang lebih luas mengenai LDII di Indonesia. Dilihat dari keberadaan LDII yang lebih luas di atas, LDII di Aceh dianggap perlu didalami khusus karena alasan kekhasan Kota Banda Aceh yaitu dari segi konteks, tantangan dalam tata kelola kerukunan umat beragama, dan komposisi penduduk di Aceh. Inilah satu wilayah Indonesia yang sering dikenal dengan julukan “Serambi Mekkah”.

LDII di Aceh adalah salah satu contoh di mana LDII tengah memperjuangkan kepentingannya agar memperoleh pengakuan dari masyarakat dan pemerintah serta memiliki wakil di lembaga-lembaga sosial dan bentukan pemerintah, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banda Aceh. Pada 2004, MPU Aceh mengeluarkan fatwa bahwa LDII adalah kelanjutan Islam Warga dan Darul Hadis, dan karenanya menyimpang dari ajaran Islam. Keputusan ini menyebar ke seluruh Aceh. Warga dan pemerintah menghentikan kegiatan LDII di beberapa daerah di Aceh.

LDII di Banda Aceh berhasil keluar dari kemelut berupa tantangan tersebut. Laporan ini mencatat dua faktor utama penyebabnya: internal dan eksternal. LDII Aceh membuka diri kepada tokoh-tokoh untuk berinteraksi dan berdiskusi secara terbuka. Mereka juga tidak menutup kemungkinan kolaborasi dengan pemerintah. Kedua faktor eksternal, yakni pengakuan MUI pusat atas klarifikasi LDII bahwa

mereka bukan kelanjutan Islam Warga. Kewajiban menerapkan *green dakwah* juga cukup efektif. Faktor eksternal lainnya adalah bencana tsunami yang memungkinkan masyarakat Aceh terbuka pada aneka ragam keagamaan.

Demografi dan Kekhasan Kota Banda Aceh

Demografi dan konteks sosial politik Banda Aceh, Ibu Kota Provinsi Aceh, tidak memungkinkan LDII Kota Banda Aceh untuk tumbuh dan berkembang secara terbuka. Kota dengan luas wilayah 61 KM ini memiliki sembilan kecamatan dan 90 *gampong*, sebutan bagi pembagian wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan. Penduduk Kota Banda Aceh saat ini 255.029 jiwa di mana jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seimbang.

Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kota Banda Aceh adalah daerah tertinggi di antara kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, yakni 85,71. Angka ini bahkan jauh melebihi IPM Provinsi Aceh 72,18. Ini artinya, harapan hidup, angka melek huruf, lama sekolah, dan pendapatan per kapita di Kota Banda Aceh paling maju di antara wilayah lainnya di provinsi Aceh. Tingkat IPM Kota Banda Aceh juga meningkat dari waktu ke waktu. Sementara IPM Kota Banda Aceh tahun 2017 sebesar 83,95, pada 2021 meningkat menjadi 85,71. Ini artinya, kualitas hidup penduduk yang tinggal di Banda Aceh saat ini lebih baik dibanding lima tahun lalu.

Penduduk Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam, 98 persen. Dua persen sisanya menganut agama lain: Buddha 1,03 persen, Protestan 0,64 persen, Katolik 0,18 persen, Hindu 0,01 persen. Data ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk berdasarkan agama asimetris. Majelis-majelis agama berkumpul dalam wadah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banda Aceh. FKUB cukup aktif mengadakan pertemuan dan atau melaksanakan kegiatan pemeliharaan kerukunan antarumat beragama di Banda Aceh.

Data kesenjangan jumlah penduduk antaragama juga tercermin pada jumlah rumah ibadat di Kota Banda Aceh. Masjid ada 105, Musala ada 127 (dua jenis rumah ibadat umat Islam), satu gereja Protestan, satu gereja Katolik, satu Pura dan empat buah Vihara. Semua rumah ibadat, kecuali masjid, telah berdiri pada zaman Orde Baru. Tidak ada satu pun rumah ibadat nonmasjid yang berdiri setelah Reformasi.

Majelis Agama Islam Kota Banda Aceh bukan Majelis Ulama

Indonesia (MUI) sebagaimana di kota dan kabupaten lain di Indonesia, melainkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). MPU pertama kali terbentuk pada 1965 di bawah pimpinan Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, ulama kharismatik yang mengaku terafiliasi dengan Daud Beureueh dan Negara Islam. Pada 1968-2001, MPU berubah menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Aceh Darussalam, sesuatu yang menjadi keharusan pada setiap kota, kabupaten, dan provinsi untuk membentuk MUI. Ketentuan ini tertuang dalam keputusan Gubernur Aceh pada 1968.

Pada 1999, setahun setelah rezim Orde Baru tumbang, Indonesia menerbitkan UU Keistimewaan Provinsi Aceh. Keputusan ini adalah di antara hasil negosiasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia. Di antara keistimewaan Aceh pada UU tersebut adalah peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah (pasal 3). Ulama berperan memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami (pasal 9). UU ini mengamanatkan kepada pemerintah Provinsi Aceh untuk membentuk badan otonomi yang beranggotakan para ulama. Menindaklanjuti amanat tersebut, Provinsi Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) tahun 2000. Sembilan tahun berselang, 2009, Pemerintah Provinsi Aceh memerinci struktur dan fungsi MPU provinsi: (a) “menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan; serta (b) memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antarumat beragama lainnya” (pasal 5).

Transfer pengetahuan di Aceh, dan juga Banda Aceh, berlangsung melalui *dayah*, sebutan untuk pesantren. Hampir seluruh *dayah* selalu memasukkan aspek-aspek sufisme di dalamnya. Jaringan *dayah* tersebut menjadi jaringan tradisionalisme di Aceh yang hingga saat ini bertahan kuat. Belakangan, *dayah* mengambil banyak bentuk. Sudah bermunculan *dayah* modern yang sistem pendidikan dan model pengajarannya sudah mengikuti perkembangan di Jawa. Meski demikian, *dayah*-*dayah* tersebut berhaluan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Hampir tidak mungkin *dayah* di Aceh, juga Banda Aceh, beraliran wahabi, aliran Islam yang mengajak ke kemurnian Islam dengan meninggalkan sufisme. Jaringan ulama *dayah*, atau jaringan alumni *dayah* yang besar, akan mendominasi kepemimpinan di MPU, baik

tingkat provinsi maupun kota.

Keistimewaan lain Provinsi Aceh adalah adanya *qanun*, regulasi daerah yang berkaitan dengan keagamaan, khususnya umat Islam. Qanun merupakan hasil dari kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang telah bergerak sejak 1976. Pemerintah Indonesia memberi status keistimewaan kepada provinsi Aceh dengan memberi kewenangan untuk, di antaranya, memiliki partai lokal dan ketentuan hukum lokal, berdasarkan hukum Islam bagi penduduk Muslim. Sejak ditetapkan, provinsi Aceh telah mengeluarkan 16 qanun. Qanun ini mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam, baitul maal, adat, lembaga adat, kedudukan MPU, pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat, pembinaan akidah, jaminan produk halal, dan lembaga keuangan syariat.

Pada qanun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan akidah, pemerintah menyusun 13 kriteria paham atau aliran sesat yang langsung terkait dengan keberadaan LDII di Banda Aceh. Kesemuanya adalah: (1) Mengingkari salah satu dari Rukun Iman yang enam; (2) Mengingkari salah satu dari Rukun Islam yang lima; (3) Meyakini atau mengikuti Akidah yang tidak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah; (4) Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an; (5) Mengingkari kemurnian dan atau kebenaran Al-Qur'an; (6) Melakukan penafsiran Al-Qur'an tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir; (7) Mengingkari kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam; (8) Melakukan penafsiran terhadap Hadis tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu Hadis; (9) Menghina dan/atau melecehkan para Nabi dan Rasul Allah; (10) Mengingkari Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi dan Rasul terakhir; (11) Menghina dan/atau melecehkan para keluarga dan sahabat Nabi Muhammad saw.; (12) Mengubah, menambah dan/atau mengurangi pokok-pokok ibadat yang telah ditetapkan oleh syariat; dan/atau (13) Mengafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i yang sah.

MPU merujuk kriteria di atas untuk menilai pengaduan dari masyarakat tentang kelompok atau tokoh yang dianggap menyimpang. Contohnya, dengan merujuk kepada kriteria di atas, pada 2019 MPU Kota Banda Aceh menghentikan kelompok pengajian yang dipimpin Abi Muhammad Yahya bin Sulaiman. Pasalnya, kelompok ini dianggap menyimpang dan melakukan pendangkalan akidah. Kriteria pada qanun di atas menjadi alat ukur MPU melarang kelompok pengajian ini mengadakan pertemuan lagi. Polisi pun mengamankan lima orang

anggota kelompok tersebut untuk menghindari amukan massa.¹

Sebelum lahirnya Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan akidah, MPU Aceh mengeluarkan keputusan pada 2004 bahwa LDII dan kegiatan LDII bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. MPU beralasan LDII merupakan kelanjutan dari organisasi Islam Jama'ah yang sebelumnya bernama Lemkari, dan sebelum itu lagi bernama Darul Hadits. Organisasi tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan syariat Islam oleh MUI Pusat dan dilarang oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Keputusan di atas tidak lantas menjadi dasar pemerintah di seluruh Aceh mengambil tindakan. Sementara Aceh Barat resmi menghentikan aktivitas organisasi LDII pada 2011, LDII Kota Banda Aceh menjalankan kegiatan keagamaan sebagaimana biasanya hingga laporan ini ditulis. Bagaimana LDII berdiri dan berkembang di Banda Aceh, dan bagaimana mereka bertahan atau keluar dari kemelut akan dibahas pada bagian berikutnya.

Sejarah dan Demografi LDII Kota Banda Aceh

LDII masuk ke Aceh pada 1973. Pengikut LDII saat itu berjumlah 20 orang. Idris Hasyim, Nasrul, Ali Usman, Abd. Syukur, dan Haji M. Zaman di antara tokoh LDII pada periode awal itu. Saat itu, LDII masih bernama Lemkari. Tidak ada bangunan khusus, baik masjid maupun meunasah untuk pengajian. Mereka membahas masalah-masalah agama dari rumah ke rumah. Dakwah para tokoh awal di LDII menarik perhatian banyak orang masuk LDII. Salah satunya, Burhan, Pembina dan Penasihat Pondok Al-Mukmin, bergabung dengan LDII pada 1977. Ia menceritakan,

Saat itu, Mubaligh LDII datang dari rumah ke rumah. Ciri-cirinya sangat ketara. Setiap ketemu, perempuan mengenakan jilbab dan laki-laki pakai celana cingkrang. Saya sempat *mondok* di Wali Barokah, Kediri. Lalu saya menjadi Mubaligh. Saya tidak mengalami penolakan dan diskriminasi mungkin karena saya pebisnis yang bergaul dengan siapa saja. Hanya mereka yang sudah serius, kami

¹ Nasrullah, "MPU Banda Aceh Vonis Kelompok Abi Muhammad Menyimpang," *Republika.co.id*, 08 Agustus 2019, <https://www.republika.co.id/berita/pvxeyv320/mpu-banda-aceh-vonis-kelompok-abi-muhammad-menyimpang> (diakses 12 Juni 2022).

baru kasih tahu siapa dan organisasi apa yang kami ikuti, yakni LDII. (Wawancara Burhan, 19 April 2022)

LDII Kota Banda mulai dengan membuat musala terbuat dari papan dan semipermanen pada 1990. Selain untuk ibadah, mereka mulai membuka pengajian. Saat itu, mereka sempat dianggap aneh dari warga sekitar. Sempat terjadi ketegangan.

Kami merasa pertolongan Allah datang melalui Kepala Sekolah Polisi Negara, Pak Banadi, ke pengajian kami. Dia memang ditugaskan untuk mengawasi kami di sini dan sering membawa mobil dinas di depan musala. Hampir pada setiap pengajian, ia datang ke sini. Masyarakat tampaknya menyadari, kalau kami sesat pasti sudah ditangkap polisi. Kenyataannya tidak. Kami sempat berdiskusi dengan warga yang menolak, mereka ada yang menangis karena prasangka yang salah dan melihat langsung bahwa banyak anak-anak yang mengaji dengan tekun. (Wawancara Burhan, 19 April 2022)

Musibah Tsunami dan Gempa Aceh terjadi pada 26 Desember 2004 yang meluluhlantakkan Aceh. Peristiwa ini mendatangkan trauma yang luar biasa yang dirasakan masyarakat Aceh, tak terkecuali warga LDII. Ketika peristiwa tsunami terjadi, masjid al-Mukmin tidak terlalu terdampak. Masjid ini menjadi posko sementara. Warga LDII kemudian mengungsi ke Medan. DPP LDII sangat membantu warga LDII dan warga sekitar.

Bahkan sukarelawan dari LDII juga banyak turun untuk evakuasi korban bencana, membangun posko. Selesai masa panik, rehab rekon, bantuan sosial jaduk juga memberikan satu kepala Rp. 150.000 per bulan untuk satu orang hingga 5 bulan. Selain itu, bantuan rumah juga diberikan kepada warga LDII. Ada cerita menarik ketika peristiwa tsunami, ditemukan ijazah lulus pondok dari Pesantren Kediri tidak tahu siapa yang punyai, yaitu mubaligh yang pernah tugas di Aceh yang kini dipajang di Museum. (Wawancara Marzuki, 19 April 2022)

Peristiwa tersebut membuat masyarakat Aceh menjadi lebih terbuka terhadap keragaman yang ada, termasuk kepada LDII. Ketika peristiwa tsunami terjadi LDII juga berkontribusi memberikan bantuan kepada warga lainnya. Pada masa itu, semua lembaga dalam dan luar negeri datang ke Aceh. Aneka bantuan datang ke Aceh dari semua

agama, termasuk Kristen, Hindu, Buddha. Bahkan, Buddha Tzu Chi membangun rumah aman. Aceh mulai terbuka dengan orang luar termasuk paham-paham, keyakinan, menjadi perbandingan. Mereka menyadari bahwa Islam bukan hanya pahamnya syafiiyah (sebutan untuk pengikut Imam As-Syafii). Sempat muncul isu kristenisasi dari bantuan-bantuan tersebut. Isu tersebut memicu kecurigaan terhadap aneka bantuan lain, termasuk dari paham keagamaan Islam lainnya.

Saat ini, pengurus LDII Banda Aceh sekitar 50-an orang. Anggota LDII Kota Banda Aceh 1.200 orang, Lhokseumawe 1.100, wilayah tengah 1000 orang, dan wilayah barat selatan 600 orang. Data ini paling terlihat ketika qurban dan zakat. LDII membagi antara anggota dan simpatisan. Selalu saja ada simpatisan baru. “Dari warga pengajian 250 orang, mereka yang mengaji bolak balik sekitar 200-an orang, dan simpatisan tidak bisa dikalkulasikan,” ujar Marzuki. Masjid LDII Kota Banda Aceh ada dua buah, al-Mukmin dan al-Huda, dan beberapa musala. Setidaknya ada empat kali pengajian besar setiap pekan di dua masjid tersebut.

LDII Kota Banda Aceh bertahan walaupun MPU Aceh mengeluarkan pernyataan bahwa LDII menyimpang pada 2004. LDII di Kota Sabang, Aceh Barat, dan Langsa dihentikan paksa beraktivitas setelah fatwa MPU tersebut. Meski demikian, penghentian kegiatan tidak terjadi di Banda Aceh. “Kami sempat didatangi perwakilan dayah tradisional. Kami klarifikasi bahwa LDII kini telah menggunakan paradigma baru. Kami berbeda dari Darul Hadis dan Islam Jamaah. Alhamdulillah, tidak ada penyerangan maupun pemaksaan untuk berhenti,” kisah Burhan (wawancara, 19 April 2022).

Pada 2015, ribuan massa memadati pelataran masjid Baiturrahim, Kota Banda Aceh. Mereka melakukan konvoi untuk menolak pengaruh Wahabi yang dianggap menerapkan syariat Islam secara parsial. Massa ini adalah gabungan dari Front Pembela Islam (FPI), Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Rabithah Taliban, dan Perhimpunan Besar Inshafuddin. Selain menolak wahabi, mereka juga menuntut agar Qanun Jinayat segera disahkan. Dalam salah satu orasi, tokoh menyinggung mengenai banyaknya aliran dan paham yang menyimpang dari *ahlussunnah walwarga*. Aksi ini tentu mengkhawatirkan bagi LDII karena fatwa MPU 2004 belum dicabut. “Beruntung, kami kenal dengan koordinator aksi. Kami serang berdiskusi dengan mereka dalam banyak kesempatan. Saat itu, kami aman. Tidak ada yang mengarah ke LDII,” ujar Marzuki (wawancara,

17 April 2022).

Pada 2017, LDII Kota Banda membentuk Yayasan al-Mukmin. Yayasan ini menjadi naungan bagi dayah yang mereka dirikan. Di dayah ini, mereka mengajarkan tafsir Al-Qur'an, hadis, ilmu tata bahasa arab, fiqih, akidah, dan akhlak. Santri yang menetap di dayah ini 15 orang, berasal dari luar kota, seperti Bireuen, Aceh Besar, Sigli, Semeluh, Aceh Barat Daya, Takengon, Nagan Raya, Langsa, dan Aceh Tengah. Usia santri antara 14-19 tahun. Sekolah formal mereka ada yang SMP dan SMK. Mereka umumnya bercita-cita menjadi mubaligh, guru dan berguna bagi semuanya. Kelompok pengajian terdiri dari kelas A, usia 2-7 tahun; kelas B, 8-12 tahun; kelas C, usia 12-17 tahun, serta kelompok muda-mudi usia 18 tahun hingga usia menikah. Semua pembiayaan ditanggung (gratis) dan bahkan santri diberikan uang saku, setiap bulan 150 ribu, dan menjelang lebaran juga memperoleh tunjangan hari raya.

Materi yang diajarkan di pondok ini mengikuti kurikulum pondok di pusat. Evaluasi terhadap guru juga dilakukan secara berkala. Sebelumnya, kegiatan pembelajaran dimulai, pimpinan dayah sudah memberikan arahan terlebih dahulu. Syaratnya untuk masuk menjadi santri pondok tidak boleh merokok, tidak boleh membawa telepon genggam, tidak boleh bergaul secara berlebihan antara perempuan dan laki, tidak boleh berpakaian ketat, tidak boleh berantem, tidak boleh mencuri, dan mendapatkan izin dari orang tua. Santri yang melanggar dibina dengan batas tertentu. Contohnya ketika ada santri yang pacaran, berantem, mencuri, atau meminum minuman keras. "Kami membina mereka. Kami tidak memberi hukuman berlebihan. Jika tidak bisa menuruti arahan, dia akan dikembalikan," ujar Asmul Amin, Pengajar Quran Hadis dayah al-Mukmin (wawancara, 20 April 2022).

Dayah al-Mukmin ini di LDII disebut sebagai pondok mini. Di dayah ini, santri belajar ilmu-ilmu yang nanti di pondok besar akan ajarkan. Untuk masuk ke pondok besar seperti Wali Barokah, calon santri harus mengikuti tes. Kalau tidak lulus, anak itu harus kembali ke pondok mini. Burhan menjelaskan kegiatan dayah ini sehari-hari,

Santri dari Banda Aceh tidak menginap. Kelas terbagi menjadi pagi (09:00-11:30), siang (14:00-15:30) dan sore (16:00-17:00). Kelas dibagi berdasarkan kemampuan santri. Levelnya terdiri dari dasar, menengah dan persiapan ke Wali Barokah, Kediri. Kami membatasi

setiap santri hanya boleh dua tahun. Tahun berikutnya, mereka sudah harus tes untuk masuk Wali Barokah di Kediri. Keluar dari Kediri, mereka akan mendapat ijazah mubaligh dan mubalighah. Tes yang diberikan bukan hanya akademik, tapi juga akhlak dan amal sesuai dengan bidang-bidangnya. Misalnya, ada bagian yang mengurus masjid, menara, dapur, keamanan atau yang lainnya. Di Kediri, test tafsir al-Qur'an, tafsir hadis, adab muthalib. Yang lulus akan ditempatkan di berbagai tempat di Indonesia. (Wawancara Burhan, 19 April 2022)

Sampai di sini, kita melihat bahwa LDII mengalami pasang surut. Masuk ke Aceh tidak mudah. Datang dengan ajaran baru tidak selalu mudah. Setelah mulai berani menampakkan diri, tantangan bermunculan. Mulai dari sikap MPU, gejolak politik pada masa transisi, dan bencana alam tsunami mengiringi jatuh bangun LDII di Banda Aceh, dan Aceh secara keseluruhan.

Tantangan LDII Lokal di Banda Aceh

LDII Aceh, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berada dalam konteks sosial politik yang khas, yakni kedudukan MPU dalam kebijakan negara dan penerapan syariat Islam melalui qanun. MPU sebagai representasi umat Islam merupakan lembaga independen yang dapat memberi pertimbangan kepada pemerintah dalam mengambil keputusan atau membuat kebijakan publik. Pertimbangan MPU pasti merujuk pada dan berkaitan dengan isu-isu keagamaan. Konteks struktur politik lainnya adalah penerapan syariat Islam sebagaimana diatur dalam qanun. Qanun dijalankan oleh Dinas Syariah Islam (DSI), yang di dalamnya membawahi wilayahul hisbah, atau polisi syariah.

Kedua konteks ini merupakan ancaman di satu sisi, dan peluang di sisi lain. MPU Aceh telah mengeluarkan keputusan bahwa LDII merupakan kelanjutan dari Darul Hadis dan Islam Jamaah, yang telah dinyatakan terlarang di Indonesia, yang karenanya aliran menyimpang. Keputusan ini diperkuat oleh Qanun tahun 2015 tentang kriteria paham dan aliran sesat yang dapat memojokkan LDII di Provinsi Aceh, termasuk Banda Aceh. Sebagaimana menimpa aliran keagamaan lainnya yang dinyatakan sesat, LDII bisa menjadi korban pelabelan sesat dan menyesatkan kapan saja.

Kenyataannya, LDII Aceh dapat menjalankan organisasi dan melaksanakan kegiatan keagamaan dengan leluasa. Hal ini karena

beberapa alasan. *Pertama*, MPU Aceh, dan juga Kota Banda Aceh, menerima juga surat klarifikasi LDII bahwa mereka bukan kelanjutan Darul Hadis maupun Islam Jamaah. Mereka lahir sebagai lembaga untuk membersihkan unsur-unsur tidak benar dari Islam Jamaah.

Kedua, terjadinya komunikasi yang berkelanjutan. DPW LDII Aceh beberapa kali berkunjung dan menemui MPU Aceh untuk mendiskusikan hal ini. Pada 2015, MPU Aceh berkunjung ke pesantren Wali Barokah, tempat di mana LDII lahir, tumbuh, dan berkembang. Selain Wali Barokah, MPU Aceh juga diajak berkeliling ke Pondok Pesantren Gadingmangu, Jombang, dan Minhaajurrosyidiin, Pondok Gede, Bekasi. Komunikasi tersebut mengklarifikasi sejumlah kesalahpahaman mengenai ajaran LDII.

Ketiga, LDII pada dasarnya mendukung penerapan Syariah Islam. LDII mengajarkan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis secara ketat. Pengurus LDII Aceh terlibat dalam penyusunan beberapa Qanun. Di sisi lain, LDII juga meyakini atas segala keputusan pemerintah sebagai hal yang harus ditaati, yang kemudian dikenal sebagai *amrun jami'* atau urusan publik yang sudah diputuskan.

Selain ancaman, qanun dan MPU juga adalah kesempatan bagi LDII untuk berpartisipasi positif, salah satunya terkait kandungan Qanun tahun 2008 tentang adat istiadat. Pada Qanun tersebut, pemerintah Aceh mengatur 18 tindak pidana ringan yang harus diselesaikan dengan menggunakan mekanisme adat di level *gampong* (desa), termasuk perselisihan antarwarga. Para pengurus maupun warga LDII di tingkat desa, atau PAC selalu aktif di kegiatan-kegiatan komunitas, termasuk ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Selain itu, mereka sangat terbuka bagi tokoh setempat untuk berkunjung dan dikunjungi sehingga muncul kepercayaan di antara mereka. Keterlibatan mereka di komunitas menjadi modal sosial untuk politik pengakuan yang mereka butuhkan dari komunitas.

Selain itu, berjalannya MPU sendiri menyediakan peluang bagi LDII untuk terlibat. Salah satu tugas dan fungsi MPU adalah melakukan kajian sebelum mengambil keputusan apa pun, termasuk penentuan kelompok atau individu menyimpang atau tidak. Ketua MPU Kota Banda Aceh, Damanhuri Basyir, mengaku sering mengunjungi LDII. "Saya kadang-kadang datang dalam rangka mengklarifikasi pemahaman keagamaan yang sering kata orang menyimpang. Saya juga sering diminta pengajian di masjid LDII. Itu artinya mereka terbuka, kan? Aliran ini tidak menyimpang," ujarnya (wawancara, 20

April 2022).

Konteks sosial politik tersebut belum memungkinkan LDII Aceh mendeklarasikan organisasinya secara terbuka. LDII Aceh lebih banyak berinteraksi secara terbuka dengan warga setempat di tingkat *gampong* atau desa. Untuk menyelenggarakan kegiatan di tingkat kota secara terbuka belum memungkinkan.

Beberapa tokoh LDII menduduki posisi penting di tingkat Kota atau Provinsi. Tetapi, mereka menahan diri untuk menyatakan bahwa mereka LDII sampai kesempatan terbuka untuk mengungkapkan. Sebagian masyarakat Aceh tidak mengerti LDII, apalagi LDII paradigma baru. Bagi mereka yang mengetahui sedikit mengenai LDII dari keputusan MPU bisa menjadi bola liar bila tanpa penjelasan lebih mendalam tentang bagaimana ajaran LDII. Marzuki, Ketua DPW LDII Aceh, mengungkapkan,

Sekarang saatnya mengungkap jati diri saya. Saya sudah menyampaikan jati diri saya sebagai LDII. Saya sudah tidak malu-malu dan tidak menutup diri lagi. Namun, pengurus yang lain masih malu-malu dan berhati-hati. Saya sebagai ketua sudah saatnya dan karenanya semua sudah tahu saya ini ketua LDII. *Gak* mungkin saya menyembunyikan identitas saya lagi, di media saya sering tampil berkomentar dan di medsos. (Wawancara Marzuki, 22 April 2022)

DPP LDII mewajibkan semua mubaligh, pengurus, dan pengikut LDII untuk melaksanakan apa yang mereka sebut sebagai *green dakwah*. *Green dakwah* ini maksudnya menyampaikan gagasan dan pikiran LDII yang ramah terhadap lingkungan di mana berada. Di antaranya, setiap dakwah LDII harus mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak menjelekkkan orang lain, dan tidak mengafirkan orang lain. Marzuki, Ketua DPD LDII Kota Banda Aceh, mengungkapkan tantangan pelaksanaan *green dakwah*. Menurutnya,

Namun, tantangan yang kami hadapi di Aceh adalah bagaimana mengaplikasikannya. Sebagai contoh, di wilayah Pidie, umumnya orang di sana berbicara dengan bahasa agak kasar. Kita harus menyesuaikan diri dengan cermat. Tidak selalu mudah. Baru-baru ini, kami melakukan konsultasi dengan MPU Banda Aceh. Beliau mengerti bagaimana kondisi ulama dan kondisi keanehannya. (Wawancara Marzuki, 22 April 2022).

Hubungan LDII dengan Pemerintahan Daerah

LDII Aceh bukanlah organisasi yang mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah, tetapi juga belum mendapat pelayanan maksimal sebagaimana ormas keagamaan lainnya. Seperti telah diuraikan di atas, LDII Aceh tidak terhambat menjalankan kegiatan keagamaan walaupun MPU Aceh tentang LDII belum dicabut. Mereka dapat mendirikan masjid, menjalankan dayah, mengadakan pengajian, dan menyelenggarakan ibadah-ibadat berwarga tanpa rintangan dari manapun, termasuk pemerintah. Namun, mereka belum mendapat pelayanan sebagaimana ormas-ormas lain seperti memiliki wakil di MPU atau FKUB.

Marzuki, Ketua LDII Aceh, adalah pegawai negeri sipil di pemerintahan Kota Banda Aceh pada Dinas Syariat Islam (DSI). Pada awalnya, tidak banyak yang tahu dia seorang LDII. Seiring waktu, orang-orang di sekitarnya mengetahui bahwa dia anggota LDII. Terlebih setelah dia menjabat sebagai Ketua DPD LDII Aceh, lebih banyak orang tahu perannya di LDII. “Sebagai ketua LDII, saya kan harus membangun silaturahmi dengan sebanyak-banyaknya orang. Kepada mereka, saya perkenalkan diri sebagai Ketua DPD LDII Aceh, ujar Marzuki (wawancara Marzuki, 22 April 2022). Namun, hingga saat ini, tidak ada satu pun pihak yang mempersoalkan kedudukannya sebagai komandan *wilayatul hisbah* Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota pun tidak mempermasalahkan statusnya itu. Kisah Marzuki memperlihatkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh mengakui keberadaan LDII.

Contoh lainnya adalah Yessy Fandiba. Dia adalah seorang dokter hewan, yang saat ini bekerja di dinas pertanian Kota Banda Aceh. Dia seorang anggota aparatur sipil negara (ASN) dan kini menduduki jabatan strategis di dinas tersebut. Dia telah melalui jenjang jabatan dari bawah hingga di posisi saat ini. Orang-orang di lingkungannya bekerja mengetahui bahwa dia seorang LDII. “Saya tidak pernah *tuh* mengalami diskriminasi,” ujarnya (wawancara, 20 April 2022). Pengalaman Yessy memperlihatkan bahwa aktor-aktor pemerintah Kota Banda Aceh mengakui keberadaan LDII. ASN yang berasal dari LDII mendapat kesempatan berkarier yang sama dengan ASN lainnya.

Pengakuan terhadap LDII Kota Aceh dapat dilihat juga dari kolaborasi dengan unsur kepolisian. Polda Banda Aceh bekerja sama dengan LDII Kota Aceh menyelenggarakan vaksinasi terhadap warga LDII ketika Pandemi Covid-19 berlangsung. Vaksinasi bersama Polda

Banda Aceh dilakukan dua kali, 15 Januari 2022 dan April 2022. Vaksinasi kedua dilaksanakan pada bulan puasa sehingga warga berkumpul di Masjid al-Mukmin setelah melaksanakan salat tarawih. Kerjasama lainnya dengan Polda banda Aceh adalah penanaman pohon hutan kota mangrove dan pemeliharanya. Polda mengajak LDII terlibat dalam penanaman pohon tersebut sebagai perwakilan dari masyarakat. Kerjasama dan kolaborasi ini bermakna ganda. Pertama, pemerintah yang diwakili kepolisian mengakui eksistensi LDII sebagai organisasi kemasyarakatan yang ada di Banda Aceh. Kedua, masyarakat non-LDII tidak memperlakukan LDII setelah melihat kedekatan hubungan mereka dengan Polda Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga pada tingkat tertentu telah melayani hak LDII berorganisasi. LDII Kota Banda Aceh telah membentuk yayasan yang menaungi dayah dan Masjid al-Mukmin. Pengurusan status yayasan untuk Yayasan al-Mukmin adalah cermin dari pelayanan pemerintah terhadap kebutuhan LDII untuk mendirikan lembaga pendidikan. Dinas terkait di pemerintah Kota Banda Aceh tahu bahwa Yayasan al-Mukmin adalah bagian dari LDII Kota Banda Aceh. Walaupun demikian, mereka tetap melayani pengajuan yayasan tersebut. Hal ini menambah fakta bahwa pemerintah Kota Banda Aceh mengakui keberadaan LDII, sekaligus memberi pelayanan sebagaimana warga negara lainnya.

Pelayanan tersebut masih terbatas. LDII Aceh sampai saat ini belum memiliki wakil di FKUB sebagaimana di kota lain di Aceh, seperti di Aceh Tengah. Hal ini wajar karena sampai saat ini, LDII telah menjalin hubungan dengan MPU Kota Banda Aceh tetapi terbatas pada ketuanya saja. LDII belum dianggap menjadi bagian dari aliran Islam yang sesuai dengan ajaran arus utama di Aceh, yakni ahlussunnah wal jamaah. Mengingat bukan bagian dari MPU, wajar bila MPU tidak merekomendasikan pengurus LDII di FKUB.

Pengakuan dan pelayanan terbatas kepada LDII Aceh merupakan buah dari beberapa faktor. *Pertama*, keputusan MUI nasional menerima klarifikasi LDII, tentang beda antara LDII dengan Islam Jamaah. Keputusan ini menjadi rujukan MPU untuk dapat hidup berdampingan, walau serbaterbatas.

Kedua, MPU Kota Banda Aceh mendapat ruang mengklarifikasi kegiatan LDII. Ruang terbatas itu dilihat sebagai kesempatan. Ketika ketua MPU datang untuk mengkaji LDII, pengurus LDII menjelaskan doktrin LDII secara sederhana.

Ketiga, orang LDII berprestasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga mereka memiliki daya tawar untuk tidak diganggu. Jika tidak, pemerintah rugi kehilangan dedikasi mereka dalam bekerja dan memajukan pemerintah.

Hubungan LDII dengan Ormas Keagamaan

Hubungan LDII Banda Aceh dengan ormas keagamaan lainnya bersifat personal, belum kelembagaan. Ketua DPD LDII Aceh mengenal dengan baik Ketua MPU Kota Banda Aceh. Pada momen tertentu, seperti bulan puasa, LDII mengundang Ketua MPU menjadi penceramah setelah ibadat tarawih. Sebagai komandan Wilayahul Hisbah, Marzuki beberapa kali diundang MPU untuk mendiskusikan implementasi Syariat Islam. Namun, hubungan mereka tidak terlembagakan antara lembaga melainkan hubungan individual.

Dari segi teologi dan hukum, LDII adalah bagian dari gerakan pemurnian dalam Islam pada umumnya, Mereka menyarankan umat Islam untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadis atau Sunnah dan mengampanyekan agar umat Islam memurnikan ajaran dari praktik-praktik *takhayul*, *bid'ah*, *khurafat*.

Ini agak sensitif di Aceh, karena hal itu dapat menyinggung praktik tarekat atau tasawuf Islam di Aceh yang banyak melakukan ibadat-ibadat seperti ziarah atau tahlil. Namun, hubungan LDII dengan ormas-ormas Islam lainnya di Aceh berlangsung baik-baik saja. Hal ini terutama karena LDII meletakkan penilaian terhadap praktik keagamaan lainnya sebagai konsumsi internal. Ketika di ruang publik, mereka tidak akan memberi penilaian sebagai wujud dari *green dakwah*.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, organisasi pengawal tradisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah di Aceh adalah MPU. MPU memiliki kedudukan khusus di pemerintahan NAD, yakni dapat memberi masukan kepada pemerintah diminta atau tidak masalah sosial keagamaan. Bila MPU telah menyatakan kelompok tertentu sebagai sesat, pemerintah biasanya tidak akan memberi izin organisasi kelompok tersebut di wilayah Aceh. Salah satu contoh kasusnya menimpa Ustaz Firanda, tokoh salafi di Jakarta. Warga dan pemerintah Kota Banda Aceh menolak dan mengusir Firanda setelah berceramah yang isinya kurang-lebih menyimpulkan bahwa ayah dan ibu Nabi Muhammad tidak akan masuk surga karena mereka belum beriman

kepada Allah dan Nabi Muhammad.²

Selain MPU, masyarakat di provinsi Aceh relatif aktif terlibat dalam penanganan masalah-masalah keagamaan, termasuk melaporkan suatu kelompok yang dinilai sesat. Masyarakat dapat mengadakan kepada MPU kelompok yang diidentifikasi sesat. MPU kabupaten/kota lakukan penelitian. Bila terbukti sesuai kriteria sesat, mereka buat laporan ditunjukkan kepada MPU provinsi. Tim MPU provinsi klarifikasi. Bila kembali terbukti, MPU merekomendasikan kepada pemerintah untuk kelompok tersebut. Sejauh ini, LDII bukan kelompok yang dianggap sesat oleh MPU. Meski demikian, LDII belum menjadi lembaga Islam yang diundang dalam kegiatan-kegiatan MPU karena dianggap kecil dan tidak signifikan.

Marzuki menilai bahwa hubungan dengan ormas keagamaan harus sudah lebih terbuka. Menurutnya,

Setiap organisasi terus berevolusi mengubah diri untuk melihat dari keadaan zaman. Sekarang, zaman dengan keterbukaan, kita harus menyampaikan keterbukaan kita dengan pemerintah, MPU, lembaga dan masyarakat. Keterbukaan kita dalam pengajian, program dan kegiatan tidak ada yang disembunyikan. Semua terekspos dan ter-*publish* di masyarakat. Kalau ada istilah *bitonah*, kita tidak pakai dalam kegiatan LDII. Jika ada yang dijaga, itu karena untuk konsumsi internal saja, bukan ditutupi. (Wawancara Marzuki, 17 April 2022).

Hubungan LDII dengan non-LDII lebih erat di tingkat komunitas. Masjid dan dayah al-Mukmin terletak di Gampong Lamgugop, Syiah Kuala, Banda Aceh. Sebagai anggota warga, pengikut LDII adalah di antara warga teladan. Mereka selalu kompak dan bahkan membantu bila ada kematian di warga. Mereka selalu datang untuk melayat, dan bahkan hadir dalam kegiatan tahlilan, di rumah keluarga yang meninggal dunia. LDII juga pasti akan menyisihkan daging kurban untuk tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. LDII juga adalah warga yang paling depan ketika Gampong Lamgugob mengadakan santunan bagi anak yatim piatu berupa daging sapi yang saat itu tengah mahal. LDII juga membuka diri kepada tokoh agama setempat.

Ustaz Syauqi, Mantan kepala desa (keuchik) Lamgugob, area

² “Ustaz Firanda ditolak di Aceh karena ‘lebih cenderung ke Wahabi’ dan untuk mencegah ‘kekacauan masyarakat’”, BBC News, 14 Juni 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48617536> (diakses 20 Juni 2022).

di mana masjid LDII berdiri, di Kota Banda Aceh, yang juga ustaz, mengaku sering mengisi pengajian di masjid LDII. Ia juga berpendapat bahwa LDII tidak seperti disangkakan banyak pihak, seperti bekas tempat duduk Muslim non-LDII dipel setelah meninggalkan masjid. Pada 1990-an, LDII awal-awal masuk ke Gampong Lamgugob, sempat ditolak warga. Bahkan saat itu, pemuka bersiap untuk menyerang tempat berkumpul warga LDII itu. Pemuka Islam menahan pemuda menyerang. Mereka adakan pertemuan dengan tokoh LDII yang juga tokoh setempat sebelum masuk LDII. Komunikasi bertahun-tahun membuat LDII dikenal sebagai organisasi Islam yang mendapat tempat di Lamgugob.

LDII dikenal sangat aktif dalam kegiatan kampung. Contoh, bila ada kematian. Warga LDII aktif membantu prosesi pemakaman. Mereka juga hadir tahlilan yang diadakan pengurus Gampong Lamgugob, yang biasanya diadakan tiga hari berturut-turut. LDII juga misalnya aktif terlibat dalam kegiatan sosial seperti Mandang (membeli daging sapi menjelang ramadan, bersama anak yatim. Bila tiba idul adha, LDII menyembelih hewan kurban sendiri dan membagikan ke hampir semua dusun di Lamgugob.

Penerimaan ini tidak lain dari keingintahuan masyarakat Aceh pasca fatwa MPU Aceh tentang LDII. Keingintahuan mereka semakin besar sehingga mereka bertanya kepada pengurus dan warga LDII. Warga dan pengurus LDII memanfaatkan keingintahuan warga dengan menjelaskan apa dan bagaimana ajaran LDII yang berparadigma baru. Orang tidak ada yang menyatakan lagi LDII sesat. Misalnya saja dulu perempuan yang bukan muhrim tidak melakukan sentuhan dalam bersalaman dianggap tabu. Tapi, saat ini dianggap biasa saja. Mungkin hal ini terjadi karena dalil-dalil mengenai bersentuhan yang bukan muhrim itu berdosa.

Hubungan di atas bahkan menyentuh dimensi pemberdayaan ekonomi. Menurut Marzuki,

Kami berencana melakukan pengembangan kerjasama dalam sisi perekonomian dengan kewirausahaan. Misalnya, Setiap PC membuat BSI link bekerja sama dengan usaha bersama. Rencananya, BSI link bisa mempermudah dalam akses transaksi utama di daerah pelosok. PC yang mau membuka rekening dipermudah. Selain itu, tidak ada biaya potongan dan bisa menarik semua uangnya dengan saldo minimal. Hal lainnya, membuat Qris untuk

sedekah warga. Jadi kalau mau bersedekah *gak* perlu uang tunai. Mau sedekah berapa pun bisa diterima dengan baik. (Wawancara Marzuki, 17 April 2022)

Perempuan LDII

Perempuan Aceh cukup berdaya, tetapi kurang terbedayakan. Tidak ada organisasi khusus yang dibentuk untuk wadah yang digunakan sebagai pemberdayaan perempuan. Namun, perempuan pasti masuk dalam salah satu bagian di DPW Aceh untuk mengurus bidang perempuan. Program yang dilakukan adalah penguatan perempuan dalam membina keluarga, seperti bagaimana cara menutup aurat yang benar, mengajarkan pemahaman agama menghormati orangtua, mendidik anak, serta bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pengajian dengan berbagai kategori pengajian cabai rawit, pengajian praremaja, pengajian remaja, dan pengajian ibu-ibu yang dilakukan seminggu sekali. Selain itu, berbagai kegiatan untuk mendorong perempuan lebih berdaya dengan memberikan berbagai pelatihan untuk membantu perekonomian keluarga dengan kreativitas yang dimiliki, misalnya membuat makanan atau menjahit.

Untuk kehidupan yang lebih sejahtera, perempuan mempunyai keterampilan dengan keahlian menjahit bisa menambah income keluarga. Membentuk ketahanan keluarga yang berawal dari rumah. Ibu adalah kunci utamanya. Kehidupan selanjutnya akan dipimpin oleh generasi sekarang yang di didik (Wawancara Yessy Fandiba, 20 April 2022).

Sumber daya perempuan LDII memiliki kapasitas yang mumpuni di berbagai profesi, seperti pengusaha, dokter, akademisi dan tenaga pendidik. Pada bulan oktober 2021, LDII Pidie Aceh menggelar sosialisasi pencegahan covid 19 bersama dr. Noura sebagai salah satu pembicaranya. Selain itu, dr. Noura juga melakukan pemeriksaan untuk lansia dalam salah satu program LDII Aceh. Dalam kiprahnya, perempuan LDII diharapkan bisa memiliki peran aktif baik dalam kehidupan keluarganya dan kehidupan masyarakat. Selain memperkuat organisasi yang berada didalamnya dengan melihat sumber daya yang dimiliki, perempuan LDII juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak luar. Untuk itu, anggota perempuan LDII juga berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan lingkungan RT seperti arisan, PKK. Hal

ini menjadi sangat penting, sebagai komunikasi yang bisa dilakukan untuk melakukan *tabayyun* terhadap stigma negatif LDII.

Sayangnya, kemampuan perempuan LDII yang berlatar belakang profesional belum termanfaatkan untuk melakukan diplomasi dengan pihak luar. Juru bicara LDII umumnya laki-laki. Padahal, hubungan luar organisasi kadang membutuhkan kreativitas yang mungkin tidak terpikirkan oleh kaum laki-laki. Di sisi lain, kedatangan perempuan biasanya juga tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan menawarkan pertemanan.

Kesimpulan

LDII Kota Banda Aceh adalah contoh LDII yang berhasil keluar dari kemelut. MPU Aceh telah mengeluarkan fatwa tentang LDII dengan nada pejoratif. LDII dinilai kelanjutan Islam Jamaah dan Darul Hadis dan taqiyah (menutupi) ajaran inti yang menyimpang dari garis Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Fatwa tersebut keluar pada 2004. Seperti di beberapa daerah, meski tidak sampai diusir atau dihentikan, pandangan masyarakat terhadap LDII ikut pejoratif. Ketika demonstrasi besar-besaran menolak Wahabi pada 2015, LDII bersiap bila akhirnya merembet ke mereka. Faktanya, peserta aksi sama sekali tidak menyinggung LDII.

Fatwa tersebut memiliki dua sisi. Di satu sisi, menyudutkan LDII, di sisi lainnya membuka ruang komunikasi. Fatwa tersebut menarik perhatian warga dan menambah keingintahuan mengenai LDII. Kesempatan ini tidak mereka sia-siakan. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengklarifikasi sejumlah kesalahpahaman. Selain klarifikasi, LDII menjadi banyak kesempatan mengundang tokoh-tokoh seperti pemuka agama di tingkat gampong atau ketua MPU mengisi pengajian di masjid LDII. Hal ini membuka ruang percakapan lebih intens sehingga sejumlah kekhawatiran mengenai LDII terkikis dengan sendirinya.

Selain pendekatan bersifat lokal, dua situasi nasional berikut turut memengaruhi LDII Aceh bertahan. Pertama, keberhasilan meyakinkan MUI pusat tentang LDII. Keputusan MUI pusat menerima LDII menjadi pertimbangan MPU tidak mengganggu LDII. Kedua, konsep *green dakwah* LDII diterapkan di Banda Aceh. Tidak ada pernyataan mubaligh, mubalaghah, ketua DPD, pengurus harian yang menyatakan praktik ajaran non-LDII sebagai kafir atau tidak saja. Pun mereka punya penilaian tertentu, mereka akan letakkan itu sebagai keputusan

internal. *Green dakwah* dengan sendirinya mengajak hidup bersama, bukan sekadar mengajak pihak lain berdebat.

Meski telah berhasil keluar dari kemelut, LDII Aceh memiliki beberapa tantangan. *Pertama*, bagaimana hubungan interpersonal dengan tokoh-tokoh di Banda Aceh terlembagakan. Keuntungan pelembagaan hubungan antara tokoh LDII dan non-LDII adalah jika tokoh telah tiada, generasi berikutnya bisa melanjutkan hubungan tersebut. Kedua, juru bicara umumnya laki-laki. Padahal warga di luar sana yang ingin tahu atau memberi stigma kepada LDII juga adalah berjenis kelamin perempuan. Kepada mereka, butuh pendekatan khusus dari sesama kaum perempuan. Lebih dari itu, perempuan LDII Kota Banda Aceh memiliki modal sosial yang memadai untuk bicara dengan bahkan tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki. DPD LDII Aceh tidak cukup memanfaatkan keberadaan sumber daya manusia perempuan untuk green dakwah tentang paradigma baru LDII.

Langkah berikutnya adalah (1) menyukseskan program-program paradigma baru dari pusat ke daerah, (2) berbenah diri dan memperkuat sumber daya, (3) silaturahmi, (4) berbuat baik terkoneksi dengan semua pihak, seperti MPU dan tokoh masyarakat, dan (5) menurunkan stigma yang dulu lama melekat kepada LDII. Audiensi terus menerus dengan berbagai pihak dengan mendukung program pemerintah, diundang dari Munas disampaikan kepada Kesbangpol, humas pemda.***

Daftar Narasumber Wawancara

Abd. Syukur, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banda Aceh, 22 April 2022.

Agam Safriadi Sekretaris DPW LDII Provinsi Aceh, 17 April 2022.

Bachtiar, Kepala Kesbangpol Banda Aceh, 19 April 2022.

Burhan, Pembina LDII dan Penasehat Dayah Al Mukmin, 19 April 2022.

Bustaman, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh Bidang Aqidah, 18 April 2022.

Damanhuri, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, 21 April 2022.

Dicky Agung Setiawan, Wakil Ketua DPW LDII Provinsi Aceh, 17 April 2022.

Ihdi Makarim, dosen UIN Ar Raniry, 20 April 2022.

Marlan, DPD LDII Aceh Tengah, 20 April 2022.

Marzuki, Ketua DPW LDII Provinsi Aceh, 17 April 2022.

Musliadi Tamin, Ketua Pemuda Muhammadiyah Banda Aceh, 21 April 2022.

M. Zaini, Bendahara DPW LDII Aceh, 17 April 2022.

Noura, anggota perempuan LDII, 20 April 2022.

Putri Sakinah, santriwati Pondok Pesantren Al Mukmin, 20 April 2022.

Yessy Fandiba, anggota perempuan LDII, 20 April 2022.

Bab 6

LDII di Provinsi Bali: Minoritas di tengah Kelompok Minoritas

Ihsan Ali-Fauzi & Imelda Putri

Pendahuluan

Laporan tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Provinsi Bali ini adalah bagian dari laporan penelitian yang lebih luas mengenai LDII secara keseluruhan di Indonesia. LDII di Provinsi Bali dianggap perlu didalami secara khusus karena alasan kekhasan Bali dan komposisi penduduknya di tengah-tengah Nusantara. Di sini, LDII adalah satu bagian dari kelompok Muslim yang merupakan kelompok minoritas agama di tengah kelompok mayoritas umat Hindu. Dengan demikian, selain mengenai sejarah dan demografi LDII di Bali, penelitian ini juga ingin mendalami kekhasan LDII di Bali dibanding LDII-LDII di tempat lain. Hal ini terutama akan dilihat dari segi dampaknya terhadap hubungan LDII dengan pemerintah daerah, organisasi-organisasi massa Islam lain setempat, dan organisasi-organisasi lain secara umum di Provinsi Bali.

Selain atas studi literatur dan liputan media massa, laporan ini didasarkan atas wawancara khusus dengan 20 narasumber, baik secara tatap muka atau daring (*on line*). Mereka terdiri dari para pengurus LDII di Bali (baik di tingkat wilayah, daerah, atau pun cabang), wakil-wakil pemerintah daerah di kantor Kementerian Agama (Kemenag) atau Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh-tokoh organisasi masyarakat Islam lainnya seperti MUI, serta seorang intel kepolisian. Untuk memperoleh keterangan lebih banyak mengenai kiprah kelompok perempuan di LDII Bali, kami juga sengaja mewawancarai pengurus perempuan di DPW LDII Provinsi Bali dan DPD LDII Kabupaten Tabanan.

Sejarah dan Demografi LDII Bali

Pulau Bali adalah salah satu tujuan pariwisata paling terkenal bukan saja di Indonesia, melainkan juga di seluruh dunia, berkat keindahan alamnya dan keunikan berbagai hasil seni-budayanya. Kini sekitar 80% perekonomian Bali bergantung kepada industri pariwisata atau yang terkait dengannya. Selain itu, Bali juga dikenal sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu di tengah penduduk Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Inilah alasan mengapa Bali bukan saja memperoleh julukan sebagai “Pulau Dewata” (karena keindahan pulauanya), melainkan juga julukan “Pulau Seribu Pura” (karena dominasi Hindunya).

Fakta-fakta di atas memengaruhi keberadaan LDII di Provinsi Bali setidaknya dari dua segi. *Pertama*, karena industri pariwisata di Bali makin tumbuh pesat sejak dekade 1970-an, banyak pendatang baru masuk ke Bali, termasuk mereka yang beragama Islam. Hal ini turut mengubah komposisi penduduk Bali dari segi agama dan etnis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali tahun 2020, penduduk Bali berjumlah 4.317.404 jiwa, yang sebagian besarnya beretnis Bali. Sisanya sebagian besar adalah penduduk beretnis Jawa, Sunda, Sasak dan Melayu, yang rata-rata memeluk agama Islam. Dari segi agama, data Kementerian Agama tahun 2020 mencatat bahwa 86,91% penduduk Provinsi Bali menganut agama Hindu. Penduduk lainnya memeluk agama Islam (10,05%), Kristen Protestan (1,56%), Katolik (0,79%), Budha (0,68%), Konghucu (0,01%), dan Kepercayaan (kurang dari 0,01%). Para pengikut LDII di Bali adalah bagian dari kelompok minoritas Muslim di atas, yang secara keseluruhan jumlahnya sekitar 433.899 jiwa (sekitar 10,05%).

Kedua, karena industri pariwisata sangat menderita akibat terjadinya Bom Bali pada 2002 dan 2005, hubungan umat Hindu yang mayoritas di Bali dengan umat Islam yang minoritas juga sangat terganggu. Jika sebelumnya berlangsung baik atau bahkan sangat baik, hubungan di antara dua kelompok umat beragama itu menjadi tegang sesudah dua peristiwa Bom Bali di atas. Hal ini diakibatkan oleh asosiasi aksi pengemboman, yang dilakukan segelintir teroris yang mengatasnamakan Islam, dengan Islam sebagai agama secara keseluruhan. Walaupun hubungan itu belakangan makin membaik, namun sisa-sisanya tidak bisa dihilangkan sama sekali dan masih terasa hingga sekarang.

Fakta historis dan demografis di atas sangat menentukan kiprah

LDII di Bali. Ringkasnya, berbeda daripada umumnya cabang-cabang LDII di tempat lain di mana LDII adalah kelompok minoritas di tengah kelompok mayoritas Muslim lainnya seperti Nahdhatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah, LDII di Bali adalah bagian dari kaum Muslim yang sama-sama minoritas di tengah mayoritas penduduk Hindu.

Di Provinsi Bali, LDII sudah berdiri sejak 1979, atau delapan tahun sejak organisasi ini didirikan di tingkat pusat dengan nama LEMKARI. Dalam musyawarah wilayah Provinsi Bali pertama yang berlangsung tahun itu (1979), Poernomo terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Bali untuk periode 1979-1984. Sesudah itu, DPW Bali dipimpin Sunarya untuk periode 1989-1994 dan dilanjutkan dengan Setyo Pranoto yang menjabat sebagai Ketua DPW Bali selama tiga periode (1994-1999, 1999-2004, dan 2004-2009). Kini DPW LDII Bali diketuai Oleh Solihat Karso, yang sudah menjabat sebagai ketua selama tiga periode terakhir (2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024).

Tidak ada data pasti yang dapat menunjukkan seberapa besar dukungan kaum Muslim di Bali terhadap LDII, karena LDII sendiri tidak mengeluarkan kartu anggota, seperti juga organisasi-organisasi Islam lainnya semacam NU atau Muhammadiyah. Namun para pengurus DPW LDII Bali memprediksi bahwa jumlahnya sekitar 10% kaum Muslim di Bali.

Di keseluruhan Bali, selain di tingkat provinsi, kepengurusan LDII sendiri telah terbentuk di 7 (tujuh) kabupaten/kota, yang dikelola Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yaitu di: (1) Kota Denpasar, (2) Kabupaten Badung, (3) Kabupaten Tabanan, (4) Kabupaten Gianyar, (5) Kabupaten Buleleng, (6) Kabupaten Jembrana, dan (7) Kabupaten Karangasem. Di ketujuh kota/kabupaten ini, kepengurusan LDII kemudian terbentuk lagi di tingkat cabang (kecamatan) dan anak cabang (kelurahan), sama seperti yang ditemukan di tempat-tempat lain di Indonesia.

Warga LDII Bali pada umumnya adalah pendatang dari Jawa atau keturunan generasi pertama dari para pendatang itu. Selain itu, mereka rata-rata bekerja di sektor swasta, misalnya sebagai pekerja dalam sektor pariwisata, dosen, atau pedagang seperti penjual bakso, meskipun beberapa anggota LDII juga bekerja sebagai pegawai BUMN atau pegawai negeri. Kecenderungan umum ini tercermin misalnya dari biografi ringkas empat pengurus wilayah dan daerah LDII di Bali berikut ini. Pertama adalah Oleh Solihat Karso, Ketua DPW LDII Bali, yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat, dan sehari-hari

bekerja sebagai dosen di Intitut Seni Indonesia (ISI) Kota Denpasar. Kedua adalah Moh. Kafilari Rohimanto, Wakil Ketua DPW Bali, yang sehari-harinya bekerja sebagai pengusaha dan berasal dari Bangkalan, Madura. Contoh ketiga adalah Maulana Sandijaya, Ketua DPD LDII Kabupaten Tabanan, yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah, dan sehari-harinya bekerja sebagai wartawan harian *Radar Bali*. Akhirnya, contoh keempat adalah Rudi Hansen, Ketua DPC LDII Kecamatan Pupuan, Tabanan, yang pindah mencari rezeki ke Bali dari Tangerang, Banten, dan sehari-hari bekerja sebagai penjual bakso.

Para pengurus LDII Bali rata-rata tidak berasal dari mereka yang dididik secara formal dalam bidang agama dan berprofesi sebagai guru agama, ustaz atau kyai. Mereka pada umumnya berasal dari kalangan profesional, pegawai swasta atau pedagang, yang menyisihkan sebagian waktunya untuk mengurus organisasi. Selain itu, mereka rata-rata tidak terlibat dalam politik kepartaian atau berprofesi sebagai politisi. Salah satu pengecualian misalnya adalah Hardilan, yang kini menjabat sebagai Ketua DPD LDII Kabupaten Badung, yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Badung periode 2012-2015. Dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014, dia sempat mengajukan diri sebagai salah seorang kontestan mewakili partainya, meskipun tidak berhasil. Menurutnya, dia memilih terjun ke dunia politik kepartaian dalam rangka memperjuangkan Islam sebagai amal saleh melalui daerah pemilihan Badung, dan organisasi LDII mendukung warganya yang mau terlibat dalam politik kepartaian (wawancara Hardilan, 14 April 2022).

Ada yang cukup khas dari para pengurus dan anggota LDII Kecamatan Pupuan, Tabanan, yaitu bahwa mereka rata-rata adalah penjual bakso, termasuk ketuanya, Rudi Hansen, yang sudah disebutkan di atas. Hampir semua mereka tinggal berkelompok dalam satu kompleks di mana terletak juga satu-satunya masjid LDII di Bali, yakni Masjid Manshurin. Mereka biasa bergaul dengan masyarakat setempat, antara lain dengan melakukan kegiatan bersih-bersih desa bersama sebulan sekali. Menurut Rudi, mereka rata-rata pendatang dan mencari rezeki dengan menjual bakso: "Kita saling belajar dulu sampai bisa, sebelum masing-masing kami memulai usaha sendiri," tambahnya (wawancara Rudi Hansen, 13 April 2022).

Berbeda misalnya dari rata-rata cabang LDII di Pulau Jawa, LDII di Bali tidak banyak memiliki rumah ibadat dalam bentuk masjid atau

musala. Ruang pertemuan mereka biasanya adalah sebuah ruang serbaguna, yang digunakan antara lain untuk salat berjamaah dan mengadakan pengajian, termasuk ketika mereka kedatangan tamu dari luar. Satu-satunya masjid LDII di Provinsi Bali adalah di Kecamatan Pupuan, Tabanan, seperti disebutkan di atas. LDII Provinsi Bali juga belum memiliki pesantren khusus untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Menurut para pengurus, jika ada warga LDII yang ingin belajar khusus dan membutuhkan waktu untuk pendalaman lebih jauh terkait agama, mereka biasanya menyiapkan ruang dan kelas untuk para peserta “nyantri” di sekretariat LDII Bali. Lebih dari itu, jika ada warga LDII yang benar-benar ingin mendalami agama, orangtua mereka akan mengirimkan mereka ke berbagai pesantren di Jawa, karena mutu pendidikan dan pengajarannya diyakini lebih tinggi.

Kekhasan LDII Bali: Ajaran, Praktik dan Tantangan

Dari segi ajaran dan praktik sehari-hari pengelolaan organisasi, LDII Bali tidak berbeda dari LDII-LDII di tempat lainnya. Dalam semua segi ini, LDII Bali mengikuti ketetapan atau keputusan LDII di tingkat pusat. Dalam dokumen yang kami peroleh dari pengurus DPW LDII Bali dan berjudul “Sejarah LDII Bali”, hampir tidak ada bagian khusus yang mendeskripsikan LDII Bali, kecuali kronologi kapan musyawarah di tingkat wilayah dan daerah di Bali berlangsung dan nama-nama pengurus LDII yang terpilih. Sementara itu, keterangan mengenai sejarah, visi dan misi, tujuan dan sasaran organisasi LDII Bali sama saja dengan keterangan yang kita temukan pada LDII-LDII lainnya.

Dokumen di atas antara lain menyatakan bahwa LDII Pusat berdiri pada 1 Juli 1972, “dengan nama LEMKARI atas saran Bapak Amir Murtono sebagai Ketua Sekber GOLKAR,” dan “diberi tugas untuk membantu pemerintah dalam membina masyarakat Islam Indonesia, agar bisa memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang benar dan mempunyai akhlakul karimah.” Dokumen itu juga menyebutkan bahwa tugas LDII adalah membina mesyarakat “agar warganegara Indonesia termasuk warga LDII bisa mengamalkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”¹

Jejak-jejak LDII tingkat nasional juga kami temukan dalam praktik sehari-hari pengelolaan organisasi LDII Bali. Ketika mengunjungi

¹ “Sejarah LDII Bali,” dokumen tidak diterbitkan, diperoleh dari pengurus DPW LDII Provinsi Bali.

Sekretariat LDII Bali di Kota Denpasar, misalnya, kami antara lain menemukan bahwa buku-buku pengajian LDII cetakan pusat tersedia di toko kecil di kantor sekretariat. Sementara itu, di masa Pandemi, persisnya pada 15 Agustus 2021, kegiatan nasional LDII Pusat dan dikelola dari Kediri secara luring (*offline*) diikuti juga oleh LDII Bali secara daring (*online*). Ketika mengikuti kegiatan ini, yang dilakukan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus dan mengambil tema “Peran Ormas Islam dalam Membumikan Pancasila,” LDII Bali juga mengajak unsur-unsur Kemenag dan MUI Bali untuk turut hadir.²

Seperti juga biasa ditemukan di LDII-LDII lainnya, kegiatan paling rutin LDII di Bali adalah pengajian, yang dilakukan biasanya di ruang serbaguna di berbagai kantor LDII dari tingkat pusat hingga cabang. Peserta pengajian ini adalah anggota LDII yang dikelompokkan menurut usia atau kepentingan khusus mereka. Khusus untuk orang dewasa, pengajian rutin berlangsung satu minggu dua kali pada malam hari setiap Senin dan Rabu. Untuk anak-anak usia para murid SD, yang biasa disebut kelas “cabai rawit”, pengajian berlangsung sore hari pada setiap hari sejak Senin hingga Kamis. Sementara itu, untuk muda-mudi setingkat murid SMP-SMA, pengajian dilangsungkan pada malam hari setiap Kamis dan Jumat. Akhirnya, khusus untuk mereka yang sudah cukup usia tetapi belum menikah, atau mereka yang berusia kurang-lebih 25 tahun atau mahasiswa, disebut “Kelompok Unik” (Usia Nikah), pengajian khusus akan dijadwalkan jika ada yang perlu pembinaan terkait nikah/pasangan.

Di Bali, pengajian “Kelompok Unik” ini perlu diberi penekanan khusus, karena para pengurus LDII Bali memandangnya sebagai upaya pencegahan remaja atau muda-mudi LDII agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Maulana Sandijaya, Ketua DPD LDII Tabanan mengatakan:

Beberapa kali muncul berita orok atau bayi dibuang oleh orangtuanya karena hasil hubungan di luar nikah. Kami tidak ingin hal itu menimpa anak-anak kami. Karena itu, kami mengadakan pengajian “unik” (usia nikah) yang diikuti oleh remaja maupun muda-mudi LDII untuk menekankan pentingnya menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama. (Wawancara Sandijaya, 29 Juni

² Kegiatan ini antara lain dilipun koran lokal *Bali Express*. Lihat, “Ikuti Webinar, Ketua LDII Bali Ingatkan Pentingnya Persatuan,” *Bali Express*, 16 Agustus 2021, <https://today.line.me/id/v2/article/zRgkNW> (diakses 9 Juni 2022).

2022)

Ketika kami menelusuri lebih jauh apakah hal di atas juga adalah cara atau “strategi” para pengurus LDII untuk memagari anggota mereka dari “pencurian” kelompok lain di luar LDII, Sandijaya tegas menolaknya. Sambil tertawa ringan dia balik bertanya, “Bukankah jodoh adanya di tangan Tuhan saja?”

Terlepas dari kekhasan tantangan kehamilan di luar nikah di Bali di atas, materi-materi yang diberikan dalam pengajian mengikuti apa yang ditetapkan LDII Pusat. Misalnya, pengajian menggunakan buku paket tertentu, seperti *Buku Paket Qur’an dan Hadits*, yang diterbitkan LDII Pusat dan mencerminkan doktrin-doktrin pokok LDII untuk mencari jawaban atas permasalahan mereka kepada sumber asli Islam. Para pengurus LDII mengklaim bahwa inilah cara terbaik kaum Muslim dewasa ini dalam mencari jawaban atas banyak pertanyaan yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan langsung merujuk kepada al-Qur’an dan Hadis, dua sumber utama ajaran Islam.

Meskipun buku-buku paket di atas menyajikan pilihan-pilihan ayat al-Qur’an atau Hadis tertentu, penekanan pengajian selalu diberikan kepada pembentukan *akhlaq al-karimah* pada masing-masing peserta pengajian, atau yang sering disebut jemaat LDII sebagai “berbudi luhur”. Ada tujuh nilai yang biasa disebutkan warga LDII sebagai kandungan budi luhur ini, yakni: rukun (sikap dalam hati untuk tidak iri atau dengki kepada sesama), kompak (perbuatan atau tindakan untuk selalu menjaga kebersamaan), kerja sama yang baik, amanah, jujur, hemat, dan hormat kepada orang lain. Nilai-nilai ini selalu disampaikan dalam setiap sesi pengajian. Dengan kata lain, meskipun ada tema atau pilihan ayat al-Qur’an dan Hadis tertentu dari LDII Pusat atau LDII Wilayah, yang dikirim secara periodik, cabang-cabang LDII dapat melakukan improvisasi dengan menyesuaikan materi-materi yang disarankan dengan kearifan lokal setempat.

Selain itu, materi-materi pengajian kadang juga disesuaikan dengan waktu dan konteks tertentu, misalnya menjelang Ramadan atau Idul Adha, atau menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Sambil mengangkat pengalaman LDII Tabanan yang dipimpinnya, Sandijaya menceritakan:

Ketika mendekati Idul Adha, misalnya, kami mengambil tema yang terkait dengan peningkatan semangat berkorban, dengan mengaji Surah al-Kautsar, yang

membicarakan soal ini. Di lain waktu, menjelang perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, pengajian kami arahkan untuk misalnya mempelajari tema kerukunan dan kebangsaan, dengan mendalami Surah al-Kafirun, yang berisi ayat yang berbunyi “*lakum dinukum wa liya din*” [bagimu agamamu, bagi kami agama kami]. Pembahasannya nanti ke arah bahwa Pancasila sudah final, NKRI tidak bisa diubah, dan sistem khilafah tidak cocok diterapkan di sini. (Wawancara Sandijaya, 29 Juni 2022)

Dalam sesi-sesi pengajian di atas, yang menjadi guru adalah kader-kader senior LDII dan muridnya adalah kader-kader yang lebih junior. Jadi guru di sini tidak mesti seorang ustaz atau ulama terkenal atau kyai besar, tetapi bisa saja seseorang yang hanya lebih tinggi pengetahuan agamanya atau lebih fasih bacaan al-Qur’annya dari murid-murid yang diajarkannya. Jika para jemaat LDII di satu tempat membutuhkan materi-materi pengajian yang lebih tinggi atau sulit, maka para pengurus akan berusaha mendatangkan guru-guru dari luar yang bisa membawakan tema-tema itu, baik dari kalangan LDII sendiri di tingkat wilayah atau pusat atau dari kalangan luar.

Terkait kebiasaan di atas, di antara aspek pengajian yang sangat diandalkan para pengurus LDII adalah apa yang mereka sebut “*manqul*”. Meskipun secara harfiah kata ini berarti “riwayat”, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah penyampaian satu ajaran secara langsung dan tatap-muka antara guru dan murid, atau perpindahan atau penyampaian satu ajaran kepada murid oleh seorang guru yang diyakini memiliki silsilah atau *sanad* yang sampai ke Rasulullah Muhammad. Ini dilakukan untuk menghindari praktik belajar agama, misalnya mengenai satu ayat al-Qur’an, dari guru yang tidak jelas identitasnya atau guru “gadungan” misalnya dari Youtube atau media sosial lainnya. Dalam pengajian seperti ini, seorang murid bisa bertanya langsung kepada gurunya hingga puas, yang juga menjadi keistimewaan model pengajian ini.

Selain mengajarkan isi atau ajaran-ajaran tertentu dari sumber utama al-Qur’an dan Hadis, sesi pengajian LDII juga digunakan untuk mengajarkan para siswa bagaimana membaca al-Qur’an dengan benar atau fasih. Seperti pada sesi-sesi pengajian lainnya, guru-guru yang mengajar pada sesi belajar meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an dengan fasih ini adalah para senior di antara jemaat LDII

dan dilaksanakan tanpa memungut biaya. Para pengurus LDII Bali mengklaim bahwa mereka pada umumnya bisa membaca al-Qur'an dengan fasih dan benar, sehingga mereka bisa memimpin salat dengan penuh keyakinan.

Dalam dimensi yang lain, acara pengajian rutin di atas sebenarnya menjadi kesempatan di mana para pengurus dan jemaat LDII dapat saling bersilaturahmi dan memperkokoh solidaritas internal di antara mereka. Bagi para pengurus, pengajian menjadi arena di mana mereka dapat mengetahui siapa yang hadir atau tidak hadir dan apa alasannya. Pengajian juga menjadi kesempatan di mana para anggota dan saling tolong-menolong, termasuk untuk urusan bisnis atau pekerjaan. Seperti disebutkan di atas, para jemaah LDII di Pupuan, Tabanan, saling tolong-menolong untuk mengembangkan usaha perdagangan bakso. Di DPC LDII Tabanan sendiri ada pasang suami istri yang berdagang nasi kuning, yang kemudian berkembang pesat dan menampung banyak pegawai yang berasal dari sesama jemaat LDII Tabanan.

Di luar kegiatan rutin yang sifatnya internal di atas, LDII Bali mengadakan berbagai kegiatan yang secara umum bertujuan membangun silaturahmi atau memperkokoh jembatan di antara mereka dengan kelompok-kelompok masyarakat lain, baik Muslim maupun bukan, dan dengan unsur-unsur pemerintah. Hal ini akan kami paparkan lebih jauh pada bagian lain laporan ini.

Bagaimana LDII mendanai kegiatan-kegiatan di atas? Sumber pendanaan berbagai kegiatan LDII di Bali berasal dari urunan anggota, sebagai sedekah atau amal jariyah, yang biasanya dikumpulkan pada saat pengajian, yang kadang berlangsung lebih dari sekali dalam seminggu. Sumber-sumber pendanaan lainnya adalah berbagai sumbangan, yang sifatnya tetap atau tidak tetap, dan tidak mengikat, seperti hasil wasiat, hibah atau *athiah* (pemberian) dari orang per orang, masyarakat, atau lembaga tertentu. Selain dari sumber-sumber di atas, kegiatan LDII di Bali juga dibiayai dana-dana yang diperoleh dari usaha-usaha lain yang halal dan sah. Dalam berbagai kesempatan, pengurus LDII di berbagai tingkatan di Bali menyatakan bahwa LDII tidak mendapat dukungan dana dari pemerintah.

Ketika ditanya mengenai berbagai rumor atau sakwasangka bahwa LDII membenarkan praktik *takfiri* (mengafirkan orang atau kelompok lain) atau *taqiyah* (sengaja berbohong untuk menyembunyikan satu kenyataan atau kebenaran tertentu), para pengurus LDII rata-rata

membantah. “Kami bersifat terbuka, termasuk dalam kebiasaan kami menjalankan kegiatan seperti pengajian. Jika mereka [kalangan luar] tidak mau terlibat dalam kegiatan yang kami adakan, tentu hal itu bebas-bebas saja dan kami tidak bisa memaksa,” kata Olih Solihat Karso (wawancara, 10 April 2022).

Karena posisi LDII, juga ormas-ormas Islam lainnya, adalah kelompok minoritas agama di Bali, kekhawatiran sebagai kelompok minoritas cukup terasa di Bali. Dalam percakapan kami dengan para pengurus wilayah, mereka seperti sama-sama menyampaikan kesan, “Sebaiknya kita tahu diri karena kita berada di Bali dan kita kelompok minoritas.” Inilah tantangan khusus LDII di Bali, yang juga dialami kaum Muslim lainnya.

Ada dua peristiwa penting yang membuat tantangan di atas begitu terasa. Peristiwa *pertama* adalah kemarahan umat Hindu Bali terhadap A.M. Saefuddin, politisi Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) yang sedang menjabat Menteri Pangan dan Hortikultura saat itu, yang dianggap menghina agama Hindu dan umatnya di Bali. Pada 15 Oktober 1999, beberapa media di Jakarta melaporkan bahwa dia mengaku dapat mengungguli Megawati dalam pemilihan umum Presiden RI karena Megawati pernah sembahyang ke pura, sedangkan dirinya salat di masjid: “Dia kan agamanya Hindu. Saya Islam. Relakah rakyat Indonesia presidennya beragama Hindu,” katanya seperti dikutip *Republika*. Akibat pernyataannya itu, pada 16 Oktober, sejumlah umat Hindu yang tergabung dalam Aksi Umat Menggugat (AUM) menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Bali dan Polda Bali. Santoso Adhisuryo, Wakil Ketua DPRD Bali yang juga seorang Muslim, memahami kemarahan umat Hindu ini. Dia menyatakan tidak senang dengan pernyataan A.M. Saefuddin tersebut: “Ini sebenarnya bukan karena Islamnya, tetapi karena oknumnya,” katanya seperti dikutip *Bali Post*. Kemarahan di atas terus membesar sepanjang bulan Oktober tahun itu dan juga melebar ke beberapa wilayah lain di Indonesia.

Peristiwa *kedua* adalah terjadinya Bom Bali I dan II. Bom Bali I terjadi pada 12 Oktober 2002 dan merupakan rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi di daerah Kuta, Bali, dan memakan jatuhnya 203 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Peristiwa ini diakui sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Sementara itu, Bom Bali II adalah serangkaian pengeboman yang terjadi pada 1 Oktober 2005 di daerah Kuta dan Jimbaran, Bali, dan memakan jatuhnya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka. Dua peristiwa pengeboman ini memberi dampak yang sangat buruk

terhadap pariwisata di Bali, karena kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke tempat wisata tersebut.

Karena alasan-alasan di atas, khususnya Bom Bali I, hubungan antara umat Hindu dan kaum Muslim Bali sempat tegang. Salah satu laporan media massa pada Desember 2004 menyebutkan bahwa di antara pengaruh ketegangan tersebut adalah adanya larangan bagi kaum Muslim untuk membangun masjid di daerah Kuta, tempat terjadinya pengeboman. Meskipun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah memediasi kasus itu, proses pembangunan masjid masih berjalan alot: “Tampaknya masih ada kelompok-kelompok yang tidak dapat menerima sepenuhnya kehadiran Muslim di sana,” kata seorang komisioner Komnas HAM kala itu.³

Dalam kehidupan sehari-hari, kaum Muslim Bali juga sangat merasakan ketegangan di atas. Mereka tidak boleh atau tidak berani masuk ke kampung-kampung tertentu, misalnya, atau mengenakan songkok seperti biasa mereka lakukan. Terjadi praktik *sweeping* di tempat-tempat tertentu, di mana keberadaan mereka mulai didata dan dikenai iuran karena dianggap sebagai pendatang khusus. Dalam penuturan Sigit Sunaryanto, seorang pengurus MUI Provinsi Bali, peristiwa di atas bahkan telah mengubah bagaimana kaum Muslim disebut oleh kelompok tertentu masyarakat setempat di Bali:

Dulu kami [kaum Muslim Bali] disebut “*Nyame Slam*” atau “Saudara [beragama] Islam.” Akibat peristiwa di atas [Bom Bali], sebutan buat kami berubah menjadi “*Nak Islam*” atau “Orang Islam” (tanpa penyebutan “saudara”). Bahkan saat itu berkembang juga istilah yang lebih kasar, yaitu “*Nak dauh tukad*” atau “orang-orang dari sebelah laut [Jawa]” atau “*Nak dangin tukad*” atau “orang-orang dari sebelah timur sungai [Lombok].” (Wawancara Sunaryanto, 12 April 2022)

Hubungan LDII Bali dengan Pemda

Meskipun ada berbagai tantangan yang membuat tegang hubungan antara kaum Muslim dan umat Hindu di Bali seperti disebutkan di atas, hubungan antara LDII Bali dengan pemerintah setempat

³ Kutipan dalam teks diambil dari “Bom Bali 2004 Sisakan Ketegangan Hindu-Muslim,” *Republika.co.id*, Rabu 9 Desember 2004, <https://www.republika.co.id/berita/nz3nay299/bom-bali-2004-sisakan-ketegangan-hindumuslim> (diakses 10 Juni 2022).

pada umumnya berlangsung baik-baik saja, karena sebagian dari jajaran Pemda Bali juga beragama Islam. Dengan berlalunya waktu, ketegangan di atas juga perlahan-lahan menyusut, walaupun sisa-sisanya akan terus terasa. Kesimpulan ini kami peroleh bukan saja dari para narasumber LDII sendiri, melainkan juga mereka yang berasal dari kalangan pemerintah, seperti Kemenag, kepolisian, atau FKUB.

Indikasi hubungan baik di atas adalah tidak adanya laporan yang masuk ke pemerintah daerah, misalnya kantor Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama setempat, mengenai hal-hal negatif atau perlu dikhawatirkan terkait keberadaan LDII di Bali. Seperti dikatakan Prawoto, Kepala Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Denpasar, Bali, “Tidak ada riak yang masuk ke [kantor] kami mengenai LDII, karena semuanya aman-aman saja” (wawancara, 14 April 2022). Karena alasan ini, Bimas Islam Kemenag setempat tidak menganaktirikan LDII atau mengistimewakannya, melainkan memperlakukan mereka secara biasa-biasa saja. Kemenag setempat, misalnya, tidak memiliki penyuluh yang ditugaskan khusus untuk mendekati atau “membimbing” warga LDII.

Kesan yang sama kami peroleh dari percakapan dengan Roichan, Wakil Sekretaris FKUB Provinsi Bali. Namun, tambahnya, warga LDII sejauh ini belum ada yang menjadi pengurus FKUB, karena salah satu persyaratan untuk dipilih sebagai pengurus FKUB adalah surat rekomendasi dari majelis-majelis agama setempat, dan LDII dianggap belum saatnya untuk mewakili kaum Muslim.⁴ Sugeng Sugianto, seorang intel polisi yang sehari-hari bekerja di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar dan berhubungan dengan warga LDII, juga memberi kesan serupa. Dalam kata-katanya, “Sebagai daerah pariwisata, saat ini hampir semua aman terkendali, tidak ada riak-riak yang terjadi. Semuanya bisa dikondisikan demi sektor pariwisata, yang berangsur pulih setelah pandemi” (wawancara, 13 April 2022).

Hubungan baik di atas pasti disebabkan oleh banyak faktor, tetapi salah satunya yang penting adalah langkah-langkah warga LDII sendiri yang dengan sengaja membangun jembatan dengan berbagai unsur pemerintahan. Dalam beberapa kesempatan seperti upaya mobilisasi penduduk untuk divaksinasi dalam rangka mencegah penyebaran Pandemi Covid-19 baru-baru ini, LDII Provinsi Bali bahkan memainkan

⁴ Wawancara Roichan, 13 April 2022. Keterangan yang sama kami peroleh dari Moh. Kafilari Rohimanto, Wakil Ketua LDII Provinsi Bali, yang menyebutkan alasan serupa (wawancara 14 April 2022).

peran cukup menonjol dalam bermitra dengan pemerintah. Pada Maret 2022, misalnya, pengurus LDII Bali bekerja sama dengan Badan Intelijen Daerah (Binda) Bali berhasil melakukan vaksinasi *booster* terhadap sekitar 1.000 orang di Gedung LDII di Denpasar. Kegiatan ini, yang ditinjau langsung Deputi IV BIN, Dr. I Gde Made Kartikajaya, tidak hanya diikuti warga LDII, tapi juga masyarakat umum.⁵ Ini bukan pertama kali LDII Bali bekerja sama dengan Binda Bali dalam mengumpulkan massa. Sebelumnya, ketika menggelar kegiatan vaksinasi massal dosis pertama dan kedua di provinsi itu, Binda Bali juga bekerja sama dengan pengurus LDII wilayah.⁶

Kerjasama juga dilakukan para pengurus LDII di tingkat daerah. LDII Tabanan, misalnya, biasa menghadirkan tokoh-tokoh setempat untuk memberikan *tausiah* (nasihat keagamaan). Ketika mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada 5 Desember 2021, mereka mengundang pihak MUI, FKUB, dan Kesbangpol. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Umum MUI Tabanan H. Hartono antara lain mengajak LDII dan semua umat Islam untuk berlomba-lomba menjadi rahmat bagi semua makhluk dan alam. Dia juga mengaku sering berdiskusi dengan para pengurus LDII. Menurutnya, LDII tidak ada masalah karena dalam praktiknya mengambil *ibrah* (pelajaran) dari al-Qur'an dan Hadis nabi. "Saya kira Muhammadiyah, NU, dan MUI tidak ada yang menolak. Semua sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Kalaupun ada perbedaan, soal furuiyah, itu wajar," tutur Hartono seperti dilaporkan sebuah media.⁷ Sementara itu, pada acara yang sama, wakil Kesbangpol berharap agar hasil Rakerda LDII "bisa memantapkan sinergisitas LDII dengan pemerintah, juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Tabanan."⁸ Untuk menyebut contoh lain, masih

⁵ "Maret 2022 BIN Bali Targetkan 270 Ribu Vaksin Covid-19 di Bali, Kini Telah Mencapai 73 Persen," *Tribun-Bali.com*, 23 Maret 2022, <https://bali.tribunnews.com/2022/03/23/maret-2022-bin-bali-targetkan-270-ribu-vaksin-covid-19-di-bali-kini-telah-mencapai-73-persen> (diakses 10 Juni 2022).

⁶ "Vaksinasi 1.000 Orang Lebih, Kepala Binda Bali Apresiasi LDII," *Bali Express*, 23 Maret 2022, <https://baliexpress.jawapos.com/advertorial/23/03/2022/vaksinasi-1-000-orang-lebih-kepala-binda-bali-apresiasi-ldii/> (diakses 9 Juni 2022).

⁷ "MUI Ajak LDII Tabanan Berlomba Menuju Rahmatan Lil Alamin," *DaerahTerkini.Com*, 6 Desember 2021, <https://daerahterkini.com/2021/12/06/mui-ajak-ldii-tabanan-berlomba-menuju-rahmatan-lil-alamin/> (diakses 10 Juni 2022).

⁸ "Perkuat Moderasi Beragama, Para Tokoh Apresiasi Rakerda LDII Tabanan," *SuaraDewata.com*, 6 Desember 2021, <https://www.suaradewata.com/read/202112060001/perkuat-moderasi-beragama-para-tokoh-apresiasi-rakerda-ldii->

dari Tabanan, pada 17 April 2022 baru-baru ini dan bertepatan dengan puasa di bulan Ramadan, para pengurus LDII setempat mengundang Ketua MUI Tabanan untuk mengisi pengajian Ramadan, yang digelar usai salat tarawih. Dalam ceramahnya, dia mengajak warga LDII berlomba-lomba meningkatkan ibadah: “Bahkan, satu kebaikan di bulan puasa pahalanya bisa dilipatkan seribu kali,” katanya.⁹

Lebih dari sekadar mengundang unsur-unsur pemerintahan misalnya untuk berceramah, para pengurus PC LDII Kecamatan Pupuan, yang juga terletak di Tabanan, bahkan meminta bantuan kepada pemerintah (Kemenag) untuk mengukur ulang arah kiblat Masjid Manshurin yang mereka kelola agar posisinya benar-benar akurat. Permintaan ini dipenuhi Kemenag Provinsi Bali pada 12 Januari 2021 dan selanjutnya tim Kemenag memberi stiker tanda bahwa pengurus masjid bersangkutan sudah melakukan pengukuran ulang arah kiblat. “Dengan adanya pengukuran ulang arah kiblat ini, kami salat menjadi lebih sempurna. Sekali lagi, kami warga LDII menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Kemenag Bali,” kata pengurus LDII setempat.¹⁰

Selain mengundang unsur-unsur pemerintah dalam satu kegiatan atau bekerja sama dengan mereka, para pengurus LDII juga rajin menghadiri apa saja undangan pemerintah. Bagi pengurus LDII, hal ini seperti sudah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut satu sumber di jajaran pemimpin agama di Bali, bahkan kehadiran wakil LDII di acara-acara seperti ini tampak sangat menonjol karena jumlah wakilnya cukup banyak (lebih dari satu orang) dan mereka kadang datang dengan pakaian seragam. Dia menambahkan:

Kalau ada [kegiatan] foto-foto, misalnya, mereka tampil nomor satu. Tampaknya membuat kesan di media itu penting sekali buat LDII. Warga LDII memanfaatkan aksi-aksi berfoto bersama setiap kali ada kegiatan, bersama

tabanan.html (diakses 9 Juni 2022). Kegiatan ini mengangkat tema “Meneguhkan Moderasi Beragama, Untuk Melangkah Bersama Menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani.”

⁹ “Ketua I MUI Tabanan Ajak Warga LDII Tingkatkan Ibadah Ramadan,” *Lines.Id*, 19 April 2022, <https://www.lines.id/news/daerah/l-19185/ketua-i-mui-tabanan-ajak-warga-ldii-tingkatkan-ibadah-ramadan/> (diakses 10 Juni 2022).

¹⁰ “Pengurus LDII Pupuan Apresiasi Pengukuran Kiblat oleh Kanwil Kemenag Bali,” *Blog LDII Bali*, 12 Januari 2022, <https://ldii-bali.org/blog/detail/1195/pengurus-ldii-pupuan-apresiasi-pengukuran-kiblat-oleh-kanwil-kemenag-bali> (diakses 11 Juni 2022).

pemerintah atau ormas-ormas lain, sebagai cara untuk mereka muat di buletin atau majalah LDII, dan mungkin dapat mengindikasikan penerimaan orang terhadap LDII. Kesan lain yang kadang muncul adalah bahwa para wakil LDII itu *overacting*.¹¹

Terlepas dari berbagai perkembangan baik di atas, beberapa citra buruk dan stigma mengenai LDII masih tetap bertahan di kalangan masyarakat Muslim Bali, misalnya bahwa LDII adalah organisasi tertutup atau eksklusif. Kesan ini kami peroleh misalnya dari Mashruhan, anggota Majelis Tarjih Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PW) Bali, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Ukhuwah MUI Provinsi Bali dan sekaligus Kasi Bimas Islam Kemenag Gianyar, Bali. Dalam penilaiannya, warga LDII belum sepenuh hati menerapkan paradigma baru, misalnya dengan ikut pengajian umum atau melakukan Salat Jumat sambil berbaur dengan masyarakat umum. Dia bahkan pernah mendengar satu cerita kawannya, yang isinya kurang menggembirakan dari warga LDII. Cerita itu menyebutkan bahwa ketika kawan Muslim tadi ingin menyembahyangkan mayat tetangganya yang kebetulan seorang anggota LDII, kawan itu tidak diizinkan masuk ke ruangan tempat mayat tadi disemayamkan dengan alasan bahwa mayat itu sudah disembahyangkan. Kawan tadi mengurungkan niatnya, tetapi terus bertanya-tanya, seperti dikutip Mashruhan: “Mengapa saya dilarang menyembahyangkannya? Bukankah menyembahyangkan jenazah boleh dilakukan oleh siapa saja dan dalam waktu yang berbeda? Apakah ajaran LDII melarang orang lain di luar LDII untuk menyembahyangkan mayat anggotanya?” (Wawancara Mashruhan, 14 April 2022)

Menurut Prawoto, Kasi Bimas Islam Kemenag Denpasar yang sudah disebut di atas, ada banyak faktor yang menyebabkan sulitnya menghilangkan sama sekali citra buruk dan stigma mengenai LDII di atas:

Sulit sekali menghilangkan semua stigma di atas karena masyarakat umum tidak selalu mudah memperoleh informasi baru seperti yang saya [sebagai Kepala Bimas

¹¹ Kutipan diambil dari seorang narasumber yang tidak mau namanya disebutkan di sini. Terkait kesan ini, seorang pengurus LDII menyatakan bahwa hal ini karena memang ada target dari DPP LDII untuk melaporkan kegiatan-kegiatan sejenis untuk keperluan monitor dan evaluasi. Pada gilirannya, hal ini terkait juga dengan keharusan bahwa setiap DPD dan DPW LDII menghadiri berbagai undangan agar mereka bisa lebih dekat dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh pemerintahan.

Islam] terima. Selain itu, stigma di atas sudah ada lama dalam benak banyak orang, yang pada umumnya di Bali ini adalah pendatang. Stigma itu sudah lama dibawa dari kampung.... Di Jawa, misalnya, ketika saya masih kecil di Solo, Jawa Tengah, saya sudah mendengar kabar mengenai eksklusivitas LDII itu.... Stigma itu terbawa sampai ke Bali. (Wawancara Prawoto, 14 April 2022)

Masih menurut Prawoto, stigma di atas mungkin saja pelan-pelan menghilang jika para pengurus atau anggota ormas-ormas Islam lebih sering berkomunikasi atau bekerja bersama-sama. Hal itu bisa dilakukan misalnya dengan para pengurus dan anggota LDII benar-benar menjalankan “paradigma baru”, yang belakangan menjadi moto LDII, dengan mengundang para tokoh Muslim lainnya seperti dari NU atau Muhammadiyah. Sayangnya, dalam pengakuan Prawoto, para pengurus LDII jarang mengundang tokoh-tokoh seperti ini dan lebih sering mengundang unsur-unsur dari pemerintah atau MUI. Tetapi Prawoto juga mengakui, “Bisa juga mereka sudah mengundang, tetapi saya tidak diberi tahu, karena memang bukan kewajiban mereka untuk memberi tahu saya. Kita juga sering sibuk dengan urusan masing-masing.”

Kesan bahwa LDII Bali selama ini lebih rajin bekerja sama atau bermitra dengan pemerintah daripada dengan sesama ormas Islam juga diberikan oleh Sigit Sunaryanto, mantan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi Bali (2000-2010) dan kini salah seorang Ketuanya (2010-sekarang). Dia juga punya kesan bahwa LDII bersikap “pilih-pilih” dan “strategis” dalam hubungannya dengan pihak-pihak lain: “Sebagai Sekum MUI, saya dulu menerima paha kambing setiap Hari Raya Idul Adha. Sesudah tidak lagi menjabat, kualitas jatah buat saya menurun. Pengalaman mantan Sekum MUI lainnya juga demikian,” katanya sambil berseloroh (wawancara Sunaryanto, 14 April 2022). Tetapi dia juga segera menambahkan bahwa hal ini mungkin saja diakibatkan oleh kesibukan semua kalangan pemimpin agama atau ormas dan perbedaan skala prioritas yang diberikan masing-masing ormas.

Prawoto juga memberikan kritik dan saran perbaikan dari aras lain. Menurutnya, stigma dan kesan buruk mengenai LDII akan menjadi lebih mudah diatasi jika para pengurus dan anggota LDII bersedia bersikap lebih terbuka. Katanya lebih jauh:

Sekarang, sebut saja misalnya, mereka punya masjid atau musalanya khusus, dengan penanda khusus misalnya

“Masjid LDII.” Saya tidak mau masuk ke situ karena khawatir bahwa saya memang tidak dikehendaki masuk ke masjid itu. [Bukankah] yang merasakan terbuka atau tidak itu ‘kan orang lain, bukan kita sendiri. Selain itu, ketika menjalankan Salat Jumat, misalnya, khotbahnya disampaikan dalam bahasa Arab. Ini baik-baik saja, tetapi apakah sasarannya akan mengena kepada jemaat?” (Wawancara Prawoto, 14 April 2022)

Hubungan LDII dengan Ormas-ormas Islam lain

Hubungan LDII dengan ormas-ormas Islam lain di Bali pada umumnya berlangsung baik-baik saja, meskipun stigma mengenai LDII dan kecurigaan terhadapnya sebagai organisasi tertutup masih tetap bertahan, terutama di kalangan masyarakat awam, seperti sudah disinggung di atas. Sejauh ini tidak ada laporan mengenai ketegangan atau konflik terbuka yang terjadi misalnya di antara para pengikut NU atau Muhammadiyah dengan warga LDII, seperti pernah kita dengar terjadi di tempat-tempat lain. Kesimpulan ini sangat tampak dalam kesan dan sikap MUI Provinsi Bali terhadap LDII di Bali, yang akan kami paparkan dalam dua butir di bawah ini.

Pertama, sebagai organisasi yang memayungi semua organisasi Islam di Bali, MUI Bali secara umum mengikuti arah kebijakan MUI Pusat dalam sikap dan tindakannya terkait LDII di Bali (wawancara Sigit Sunaryanto, 14 April 2022). Ketika kami berkunjung ke sekretariat MUI Provinsi Bali di Denpasar, kebijakan MUI Pusat itu ditunjukkan kepada kami dalam bentuk Surat Keputusan No. Kep-1023/DP-MUI/V/2021, sebuah dokumen yang juga diunggah dalam website MUI Pusat.¹² Dokumen itu secara umum menyatakan bahwa pengurus MUI Pusat sudah berkomunikasi dengan pengurus LDII Pusat terkait tekad seluruh jajaran LDII untuk menerapkan apa yang mereka sebut sebagai “paradigma baru” dan bahwa kedua belah pihak juga bersepakat untuk terus meningkatkan komitmen ke arah penyempurnaan pelaksanaannya. Bunyi lengkap surat keputusan itu, yang dikeluarkan pada 27 Mei 2021 dan ditandatangani Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat MUI (Miftakhul Akhyar) dan Sekretaris

¹² Lihat, “Taushiyah DP MUI Terhadap Pelaksanaan Paradigma Baru LDII,” MUI digital, 27 Mei 2021, <https://mui.or.id/berita/30264/taushiyah-dp-mui-terhadap-pelaksanaan-paradigma-baru-ldii/> (diakses 23 Juni 2022). Versi foto surat keputusan di atas juga disertakan dalam tautan tersebut. Penulisan “Paradigma Baru” (dengan huruf awal kapital) dalam kutipan ini mengikuti penulisan aslinya dalam surat keputusan bersangkutan.

Jenderalanya (Amirsyah Tambunan) adalah sebagai berikut:

Dewan Pimpinan MUI menyampaikan *tausiyah* berkenaan dengan komitmen DPP LDII dalam menjalankan Paradigma Baru secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen yang disampaikan pada pertemuan dengan Tim Penanganan *ar-Ruju' Ila al-Haqq* [kembali kepada kebenaran] pada tanggal 20 April 2021 di Kantor MUI Pusat.

DPP LDII telah menandatangani dua Surat Pernyataan di hadapan DP MUI sebagai komitmen melaksanakan Paradigma Baru. Maka kami memberikan *tausiyah* kepada Imam/Amir Jamaah, Pengurus LDII di semua tingkatan dan semua Jamaah LDII:

1. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian Tim Peneliti Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan bahwa DPP LDII belum melaksanakan Paradigma Baru secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen. Adapun point-point Paradigma Baru sebagai berikut:
 - a. LDII bukan sebagai penerus Islam Jamaah
 - b. LDII tidak mengikuti sistem keamiran
 - c. LDII tidak menganggap Umat Islam di luar LDII sebagai kafir atau najis
 - d. Masjid LDII terbuka untuk umum
 - e. LDII tidak menolak pengajar dari luar LDII
 - f. Jamaah LDII tidak menolak diimami oleh Imam dari luar LDII
 - g. LDII bersedia bersama Ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana ditetapkan oleh MUI.
2. DPP LDII berkomitmen melaksanakan dan menaati Paradigma Baru dan isi dua Surat Pernyataan:
 - a. DPP LDII menyatakan Abdul Azis Sulthonul Auliya dan penerusnya bukan sebagai Imam/Amir Jamaah, karena dia sudah bukan bagian dari LDII maka tidak wajib bagi jamaah LDII

berbait kepadanya.

- b. DPP LDII mengakui belum menjalankan Paradigma Baru secara baik dan sungguh-sungguh.
- c. DPP LDII bersedia menjalankan Paradigma Baru secara Jujur, sungguh-sungguh, murni, konsekuen dan konsisten.
- d. DPP LDII bersedia dibina Majelis Ulama Indonesia bersama-sama Ormas Islam lainnya sungguh-sungguh dan menyeluruh dalam menjalankan Paradigma Baru.
- e. DPP LDII bersedia menerima konsekuensi apa pun apabila terbukti di kemudian hari tidak melaksanakan Paradigma Baru secara jujur dan sungguh-sungguh.

Demikian tausiyah Dewan Pimpinan MUI terkait pelaksanaan Paradigma Baru oleh DPP LDII beserta jamaahnya, diharapkan dapat menjadi perhatian semua pihak dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketika membahas relevansi surat keputusan di atas dengan konteks warga LDII di Bali, Sigit Sunaryanto, salah satu Ketua DPW MUI Bali yang sudah disebut di atas, menyatakan bahwa beberapa butirnya masih relevan dan beberapa lainnya tidak. Dia berkesimpulan bahwa sekalipun paradigma baru LDII masih harus diperkuat komitmen pelaksanaannya, hubungan warga LDII dengan kaum Muslim lain di Bali sudah jauh lebih baik dibanding di tempat-tempat lain. Menurutnya,

Warga LDII di Bali sudah sangat aktif dan partisipatif, terbuka.... Mereka terlibat dalam banyak kegiatan kami, misalnya dalam program "Umat Islam Binaan". Ketika kami menyelenggarakan musyawarah daerah, MUI melibatkan LDII tidak hanya sebagai peserta tetapi juga sebagai panitia....

Situasinya sudah berbeda jauh dari misalnya pada tahun-tahun sebelum 2010, ketika saya masih Sekretaris Umum MUI. Dulu ada penolakan terhadap warga non-LDII ... tidak boleh salat atau ibadah di masjid LDII, misalnya. Dulu LDII dianggap masih sangat eksklusif: tidak

mau menjawab salam oleh warga non-LDII; jika non-LDII salat, bekas salatnya dibersihkan.... Saya pernah mendengar terjadinya penolakan terhadap jenazah LDII yang disalatkan oleh non-LDII. (Wawancara Sunaryanto, 14 Mai 2022)

Karena alasan-alasan di atas, *kedua*, ketika menjalankan surat keputusan MUI Pusat di atas, MUI Wilayah Bali tidak mengambil tindakan keras dengan misalnya mendiskreditkan atau meminggirkan, apalagi melarang, LDII di wilayah itu, tetapi tetap mendampingi mereka. Lebih dari itu, MUI di berbagai tingkatan di Bali bahkan menjadikan beberapa anggota LDII sebagai pengurusnya dalam posisi-posisi tertentu. Misalnya, Ketua DPW LDII Bali, Olih Solihat Karso, menduduki jabatan sebagai salah satu Anggota Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Bali. Di MUI Kota Denpasar, lima orang pengurus LDII juga terlibat sebagai anggota pengurus MUI, yakni: Moh. Kafilari Rohimanto (Anggota Dewan Pertimbangan), Agus Purmadi (Sekretaris), Yulian Setiawan (Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Pariwisata dan Pengembangan Masyarakat), Moch. Ali Sriyanto (Bidang Penelitian, Pengkajian dan Informatika), dan Sobirin (Bidang Ukhuwah Islamiyah dan Hubungan Antar Umat Beragama). Dua pengurus LDII Kabupaten Badung juga menjabat sebagai pengurus MUI setempat, yakni Hardilan (Sekretaris Komisi Ukhuwah dan Kerukunan Umat Kabupaten Badung) dan Bambang Risnanda (Komisi Teknologi Informasi). Selain itu, di jajaran pengurus MUI Kabupaten Gianyar, dua warga LDII juga terlibat, yaitu: Bagus Wiyono (Dewan Penasehat) dan Andi Herwanto (Komisi Ekonomi). Akhirnya, ada dua pengurus LDII yang juga masuk dalam kepengurusan MUI Kabupaten Tabanan, yaitu: Sunoto (Komisi Ukhuwah Islamiyah) dan Mariyono (Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama).¹³

Dengan mengambil kebijakan seperti di atas, kata Sigit lebih jauh, pengurus MUI Bali dapat mengawasi dan “mengontrol” keberadaan LDII di Bali, sambil terus mendorong agar mereka meningkatkan komitmen mereka kepada paradigma baru yang mereka sendiri tekadkan. Selain itu, kerjasama dan silaturahmi di antara pimpinan ormas-ormas di dalam MUI juga dimaksudkan agar menjadi contoh yang harus diteladani oleh mereka yang berada di bawah. Dalam pandangan Sigit:

¹³ Daftar ini disusun berdasarkan keterangan pangurus LDII dan berbagai dokumen yang memperkuatnya, yang juga tersedia di website masing-masing MUI.

Yang paling mengkhawatirkan adalah jika isu-isu atau anggapan bahwa warga LDII itu memandang kelompok-kelompok lain itu najis sehingga bekas shalatnya harus dicuci, lebih buruk dari mereka atau bukan Muslim yang *kaffah*, atau yang lainnya itu menimbulkan gesekan di bawah dan mengakibatkan gesekan. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Apalagi jika ada kelompok kepentingan yang memprovokasi.... Kalau di tingkat pimpinan, hal itu mungkin lebih mudah diatasi. Jadi kita harus memberi contoh di tingkat pimpinan. (Wawancara Sigit Sunaryanto, 14 Mei 2022)

Langkah-langkah di atas dipuji Prawoto, Kepala Bimas Islam Kemenag Denpasar yang sudah disebut di atas:

Sebenarnya, baik juga kalau mereka [anggota LDII] ada di dalam kepengurusan organisasi payung semacam MUI dalam tingkatan apa pun. Dalam posisi seperti itu, mereka akan lebih mudah untuk diatur dan diajak bicara. Tetapi memang paradigma barunya harus selesai dulu, terutama anggapan bahwa yang berada di luar mereka bukan Muslim sejati, yang sering membuat warga non-LDII sakit hati. (Wawancara Prawoto, 14 Mei 2022).

Selain menjadikan beberapa anggota LDII sebagai pengurus MUI di berbagai tingkatan, para pengurus MUI juga turut mengajak anggota LDII untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang diadakan MUI. Contohnya, ketika MUI Provinsi Bali menyelenggarakan musyawarah daerah pada Desember 2020, beberapa pengurus LDII diajak sebagai panitia pelaksana. Hal ini sempat menimbulkan perdebatan di kalangan internal MUI, karena sebagian pengurus masih curiga terhadap maksud kurang tulus sebagian anggota LDII dalam keterlibatan ini. Terlepas dari itu, keputusan akhir jajaran pimpinan MUI Bali adalah tetap melibatkan mereka. Dalam ungkapan Sigit yang lebih lengkap:

Dalam kegiatan kepanitiaan bersama MUI, misalnya, kawan-kawan LDII sering menawarkan diri untuk terlibat sebagai seksi transportasi. Tugasnya secara umum adalah untuk memberikan bantuan dalam penyediaan transportasi. Kesan beberapa kawan kami di MUI Bali, kawan-kawan LDII itu sengaja memilih seksi itu karena fungsinya strategis.... Untuk mengantar atau menjemput orang-orang MUI Pusat, misalnya, adalah sesuatu yang

strategis bagi kawan-kawan LDII, karena mereka bisa menjadikannya sebagai jalan untuk mendekati MUI dan bernegosiasi. Ini yang membuat sebagian pengurus MUI keberatan. Tetapi akhirnya [masalah ini] bisa kami sepakati, apalagi kawan-kawan LDII memang profesional dan bekerja dengan baik. Lagi pula, kami yakin bahwa pengurus MUI Pusat tidak akan mudah menegosiasikan masalah-masalah yang sangat prinsipil. (Wawancara Sigit Sunaryanto, 14 Mai 2022)

Mengapa warga LDII di Bali tetap diperlakukan dengan baik oleh kelompok-kelompok Muslim lainnya? Mengacu kepada pengalamannya yang cukup panjang sebagai pengurus MUI Bali, Sigit Sunaryanto mengajukan beberapa kemungkinan faktor yang dapat menjelaskan hal ini. *Pertama*, secara umum para pengurus ormas-ormas Islam lain di Bali tidak terlalu khawatir dengan keberadaan LDII, karena jumlah warga LDII pun tidak terlalu besar. Sementara itu, tambah Sigit, “upaya-upaya LDII untuk rekrutmen anggota baru atau ekspansinya juga tidak terlalu terasa, jika pun ada.”

Faktor *kedua* adalah fakta lain bahwa warga LDII tidak memperlihatkan sikap atau tindakan yang eksklusif atau tertutup. “Kami diundang dalam beberapa acara penting mereka dan wakil kami datang, dan kami juga mengundang mereka dalam acara-acara tertentu dan mereka selalu datang,” tambah Sigit (wawancara, 12 Mei 2022). Walaupun kami sudah cukup banyak memaparkan dan mengulas soal saling-undang dan silaturahmi ini pada bagian terdahulu laporan ini, di sini tetap menarik untuk mencatat misalnya pengalaman keterlibatan Agus Purnadi, Wakil Ketua DPW LDII Provinsi Bali, dalam berbagai organisasi Islam “payung” di Bali. Selain pengurus LDII, dia juga adalah Wakil Sekretaris MUI Kota Denpasar, Wakil Sekretaris IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Provinsi Bali, Anggota Departemen Ristek dan Lingkungan Hidup ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Provinsi Bali, dan Anggota Bidang Agrobisnis ISMI (Ikatan Saudagar Muslim Indonesia) Provinsi Bali. Meskipun daftar keterlibatan seseorang dalam berbagai organisasi ini bukan jaminan keterlibatan nyatanya dalam berbagai organisasi itu, hal ini sedikitnya tetap mencerminkan kesediaannya untuk bergaul dan bekerja sama dengan orang-orang lain.

Selain kedua faktor di atas, kami ingin menawarkan satu faktor penjelas lainnya. Faktor yang *ketiga* ini adalah fakta bahwa meskipun

dapat dipastikan ada berbagai perbedaan pandangan di antara ormas-ormas Islam di Bali, perbedaan pandangan itu bukan merupakan kepentingan yang harus diperjuangkan habis-habisan atau matimatian oleh masing-masing kelompok dan dalam cara yang dapat merusak hubungan di antara mereka sebagai sesama Muslim di Bali. Hal ini diperkokoh oleh kenyataan bahwa tidak ada satu organisasi Islam pun yang posisinya dominan di Bali, seperti kita temukan pada wilayah-wilayah tertentu di Jawa. Dengan kata lain, para pimpinan ormas Islam di Bali sudah menyadari bahwa perbedaan pandangan, termasuk misalnya dalam soal mazhab keislaman yang dianut satu kelompok, adalah sesuatu yang sangat lumrah ditemukan, yang terjadi secara alamiah, dan harus diterima dengan penuh lapang dada.

Penjelasan di atas diperkuat pula oleh fakta bahwa mereka semua, ormas-ormas Islam di Bali, adalah sama-sama kelompok minoritas agama di tengah mayoritas umat Hindu, yang mungkin juga sibuk oleh urusan masing-masing dan tidak mau mengganggu atau “usil” dengan urusan kelompok lainnya. Apalagi jika kita masukkan ke dalam faktor penjelasan ini kenyataan lain bahwa hubungan warga LDII dengan pemerintah setempat juga sangat baik, seperti sudah disebut di atas.

Dalam konteks yang terakhir di atas, mereka semua bahkan memiliki kepentingan yang sama sebagai kelompok minoritas Muslim. Inilah yang sama-sama mereka rasakan ketika hubungan di antara umat Hindu dan kaum Muslim di Bali menegang, yang pernah mereka rasakan menyusul meledaknya kasus yang bermula dari pernyataan H.M. Saefuddin pada penghujung 1990-an, yang sayangnya diperparah oleh peristiwa Bom Bali I dan II pada 2002 dan 2005, seperti sudah disebutkan di atas. Belakangan ini, tantangan di atas bertambah dengan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali, yang pelaksanaannya dikhawatirkan dapat membawa dampak buruk kepada masyarakat Muslim.

Menarik bahwa dalam menjawab berbagai tantangan di atas, kaum Muslim Bali seperti ditunjukkan oleh MUI Provinsi Bali mengajak serta para pengurus LDII untuk memikirkan jalan keluar terbaik untuk mencegah hal-hal buruk di atas dan memperkuat semangat kebersamaan warga Muslim dan warga Hindu di Bali sebagai sesama orang Indonesia. Dalam rangka ini, misalnya, MUI Provinsi Bali ikut membentuk Forum Pemerhati Sejarah Islam (FPSI) Bali, yang antara lain bertugas mengumpulkan bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa umat Islam sudah lama berada di Pulau Dewata, bahkan

sebelum republik ini sendiri berdiri (wawancara Sigit Sunaryanto, 12 April 2022).

Dalam forum di atas, Olih Solihat Karso, Ketua DPW LDII Bali, terlibat sangat aktif, termasuk menyiapkan logo dan lambangnya, sesuai dengan keahliannya sebagai dosen seni rupa (wawancara, 5 Juli 2022). Baginya, pembahasan mengenai tantangan baru di atas harus dilakukan hati-hati, agar hasilnya tidak kontraproduktif dan malah mempertegang lebih jauh hubungan umat Hindu dan umat Islam di Bali. Berkat pengalamannya yang panjang sebagai “anak Sunda yang betah tinggal di Bali”, dia percaya bahwa masyarakat Bali pada dasarnya sangat bersahabat, sesuai “*menyama braya*”, konsep ideal hidup bermasyarakat di Bali yang menjunjung tinggi keragaman dan kerukunan, yang menghargai perbedaan dan menempatkan orang lain sebagai keluarga sendiri.

Sikap Olih di atas juga tercermin dalam hubungan baik yang dibangun di antara LDII dengan organisasi keagamaan Hindu setempat, misalnya Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Provinsi Bali. Hal ini misalnya diakui Nyoman Kenak, Ketua Pengurus Harian PHDI Provinsi Bali, yang sudah lama menjalin hubungan baik dengan umat Islam Bali. “Kalau mengirim kami hadiah pada Hari Raya Kurban, misalnya, mereka pasti sadar untuk tidak mengirim kami daging sapi, karena ini hewan yang kami anggap suci,” katanya (wawancara, 12 April 2022). Ini memang praktik yang biasa dilakukan pengurus LDII, untuk menjaga hubungan baik, yang di kalangan LDII dikenal dengan istilah “*ngejot*” (wawancara Olih Solihat Karso, 15 April 2022).

Kiprah Perempuan di LDII Bali

Kami ingin mengakhiri laporan ini dengan paparan khusus mengenai peran kelompok perempuan di LDII Bali, karena jumlah mereka mestinya cukup besar. Sayangnya, dalam penilaian kami, tidak ada porsi perhatian khusus yang diberikan LDII Provinsi Bali kepada kelompok perempuan. Salah satu indikasinya, hampir semua pengurus LDII di tingkat provinsi berjenis kelamin laki-laki, kecuali pengurus satu biro yang dinamakan “Biro Pemberdayaan Wanita dan Kesejahteraan keluarga”. Nama pengurusnya sekarang adalah Nurhayati, yang sehari-hari bekerja sebagai guru di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik LDII di Denpasar.

Tugas biro khusus di atas adalah menyelenggarakan kegiatan seperti seminar tentang kesehatan perempuan, kandungan, parenting,

kesehatan ibu dan bayi, atau tema-tema sejenis, yang hanya terkait dengan kehidupan perempuan atau keluarga. Misalnya, pada 27 juni 2021 lalu dan bekerja sama dengan Departemen Kesehatan Denpasar, pengurus biro ini mengadakan webinar dengan tema “Mengasuh Diri kita Di Masa Pandemi COVID-19, yang dikhususkan bagi ibu-ibu dan dilaksanakan secara daring. Acara ini cukup berhasil karena diikuti oleh kurang-lebih 500 peserta dari Bali dan luar Bali. Sesudah dibuka oleh Dewan Penasehat DPW LDII Bali, acara dilanjutkan dengan dua narasumber perempuan: Nana Maznah Prasetyo, seorang terapis keluarga dari Jakarta, dan Dewi Ilma Antawati, dosen Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surabaya.¹⁴

Dalam struktur kepengurusan DPD LDII Tabanan, perempuan juga hanya menduduki “pos” khusus perempuan di atas, yang dijalankan seorang ibu dan anak asuh yang sudah dianggap anaknya sendiri. Sang ibu bernama Retno Wulansari, yang sehari-hari bekerja sebagai bidan. Selain mengajar di pengajian warga LDII, ibu ini juga dikenal sebagai bidan yang ringan tangan: dia suka membantu perempuan yang hendak melahirkan secara gratis karena yang bersangkutan miskin dan tidak bisa pergi ke rumah sakit. Dia juga bersedia membantu perempuan yang melahirkan di luar ikatan perkawinan, karena menurutnya mereka semua harus ditolong: “Siapa yang menanam kebaikan, dia akan menuai kebaikan pula,” katanya. Dia merasa gembira menjadi warga LDII karena, sebagai anak yang dilahirkan dari keluarga abangan, organisasi dakwah inilah yang memperkanalkannya kepada ajaran-ajaran agama. “Waktu saya masih kecil dan kepingin berpuasa, LDII ikut membantu saya karena keluarga adalah keluarga abangan,” kenangnyanya (wawancara, 12 April 2022).

Pengurus perempuan yang kedua adalah Desi Puspitasari, anak angkat Retno dan sejak kecil sudah dianggapnya sebagai anak sendiri dan dibimbingnya sebagai muallaf. Selain mengajar di pengajian warga LDII di Tabanan, dia juga sempat mengajar di sekolah umum setempat karena dia lulusan jurusan pendidikan matematika di Universitas Saraswati, Tabanan. Sebelum masuk universitas, dia dikirim ibu asuhnya Retno ke Jawa untuk “nyantri” di Pondok Pesantren Gading Mangu Perak, Jombang, Jawa Timur, di bawah pengelolaan Yayasan Budi Utomo. Pesantren ini adalah salah satu pusat pendidikan agama Islam terbesar di Indonesia yang dimiliki warga LDII. Menurut

¹⁴ “Mengasuh diri Ibu dimasa Pandemi, LDII Bali Menyelenggarakan Webinar,” *Blog LDII Bali*, 3 Juli 2021, <https://ldii-bali.org/blog/detail/899/mengasuh-diri-ibu-dimasa-pandemi-ldii-bali-menyelenggarakan-webinar> (diakses 9 Juni 2022).

penuturan Desi:

Hari-hari saya penuh dengan belajar, baik pelajaran agama maupun umum. Pondok pesantren ini ditunjang dengan sekolah umum tingkat SMP, SMU dan SMK di bawah pengelolaan Yayasan Budi Utomo. Program yang dijalankan sekolah tersebut begini: pagi sekolah formal, siangnya sekolah madrasah atau diniyah. Paginya pelajaran umum. (wawancara Desi Puspitasari, 12 April 2022)

Menurut banyak pengurus LDII, mengirimkan anak perempuan ke Jawa untuk menempuh pendidikan menengah memang umum dilakukan keluarga LDII di Bali. Ini karena bersekolah di Jawa bisa mendapat pendidikan formal sekaligus *nyantri* atau *mondok* di pondok pesantren. Sementara itu, sekolah-sekolah negeri di Bali pada umumnya belum mengizinkan siswi berjilbab. “Kami mewajibkan anak-anak perempuan kami yang sudah akil balig berjilbab,” kata Maulana Sandijaya, Ketua DPD LDII Tabanan.

Kesimpulan dan Penutup

Laporan tentang LDII di Bali ini adalah bagian dari laporan penelitian yang lebih luas mengenai LDII secara keseluruhan di Indonesia. LDII di Bali dianggap perlu didalami khusus karena alasan kekhasan Bali dan komposisi penduduknya yang mayoritas Hindu, yang menjadikan LDII Bali hanya satu bagian dari kelompok Muslim yang sama-sama merupakan kelompok minoritas agama di Pulau Dewata.

Karena alasan di atas, selain mengenai sejarah dan demografi LDII di Bali, penelitian ini juga mendalami kekhasan LDII di Bali dibanding LDII-LDII di tempat lain. Hal ini terutama dilihat dari segi dampaknya terhadap hubungan LDII dengan pemerintah daerah, organisasi-organisasi massa Islam lain setempat, dan organisasi-organisasi lain secara umum di Bali.

Dari penelitian ini kami ingin mengambil empat kesimpulan utama sebagai berikut. Semuanya terkait dengan perkembangan internal LDII sendiri, hubungan LDII dengan pemerintah setempat, hubungan LDII dengan organisasi-organisasi lain, dan kiprah kaum perempuan di tengah LDII di Bali.

Pertama, sebagai organisasi dakwah, LDII di Bali berkembang cukup baik: para pengurusnya tampak kompak, cabang-cabangnya

berkembang makin banyak, pengelolaan organisasinya makin terampil, kemitraan dan kerjasamanya dengan pihak-pihak lain makin kuat dan luas. Kegiatan inti LDII di Bali adalah pengajian rutin, yang sekaligus menjadi kesempatan di mana mereka melakukan konsolidasi organisasi, saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, dan memperoleh pemasukan rutin.

Dalam hubungannya dengan pihak luar, warga LDII terutama ingin menampilkan apa yang mereka sebut sebagai “paradigma baru”: terbuka kepada pihak-pihak lain dan tidak menghakimi mereka; mendahulukan ajaran mereka tentang budi luhur; setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan rajin terlibat di dalam, bahkan mengambil inisiatif awal, untuk terus membangun jembatan silaturahmi. Sejauh ini kami tidak bisa memastikan apakah para pengurus LDII belakangan ini lebih konsisten menerapkan paradigma baru atau tidak, karena kami tidak punya cukup informasi mengenai bagaimana sikap dan tindakan mereka misalnya sepuluh tahun lalu. Tetapi dari informasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kecurigaan dan stigma terhadap mereka cukup berkurang, meskipun sisa-sisanya masih tetap terasa.

Kedua, hubungan LDII Bali dengan pemerintah setempat berlangsung baik-baik saja. Tidak ada laporan yang masuk misalnya mengenai “riak-riak” di tengah masyarakat yang diakibatkan oleh keberadaan atau aktivitas tertentu oleh warga LDII. Dalam beberapa kasus seperti mengambil langkah-langkah penting melawan Pandemi Covid-19 seperti vaksinasi massal, pihak LDII bahkan bekerja sama dengan unsur-unsur tertentu pemerintahan lokal seperti Binda dan Dinas Kesehatan. Dilihat dari sisi kedekatan kepada pemerintah setempat, cukup mengherankan bahwa pengurus LDII belum ada yang dipilih sebagai pengurus FKUB di semua tingkatan di Bali. Namun, di segi lain, hal ini juga bisa dipahami karena umat Islam adalah kelompok minoritas agama di Bali, sehingga jumlah wakilnya di FKUB pasti lebih sedikit.

Beberapa kalangan menilai bahwa LDII lebih rajin berhubungan dengan pemerintah daripada dengan pihak-pihak lain seperti organisasi-organisasi Islam. Meskipun mungkin penilaian ini ada dasarnya (ingat misalnya penilaian bahwa kadang-kadang wakil LDII *overacting* di depan pemerintah), sulit untuk membahas lebih lanjut penilaian ini, karena masing-masing kelompok memiliki kesibukan dan skala prioritas mereka sendiri-sendiri. Kita bisa berefleksi dengan

misalnya balik bertanya: Apakah para pemimpin atau pengurus organisasi lain seperti NU atau Muhammadiyah juga rajin mengundang pihak-pihak lain untuk memperkuat tali silaturahmi?

Ketiga, hubungan LDII dengan organisasi-organisasi Islam lain di Bali juga baik-baik saja. Tidak ada catatan misalnya tentang benturan antara warga LDII dengan warga NU atau Muhammadiyah karena praktik saling mengafirkan, seperti kadang kita dengar terjadi di tempat-tempat lain di Indonesia. Indikasi kuat lainnya adalah pelibatan warga LDII tertentu dalam kepengurusan MUI di berbagai tingkatan di Bali, meskipun secara keseluruhan MUI Pusat di Jakarta jelas mengeluarkan *taushiah* bahwa LDII harus lebih konsisten menerapkan paradigma baru mereka.

Di atas kami sudah menyebutkan bahwa selain oleh sikap dan tindakan warga LDII yang makin terbuka, hal ini dimungkinkan juga oleh fakta bahwa semua organisasi Islam di Bali adalah sama-sama minoritas dan tidak ada yang dominan, seperti kita temukan di tempat-tempat lain. Tetapi dapat juga dipastikan bahwa kaum Muslim di Bali sudah makin dewasa dalam menerima perbedaan dalam masalah-masalah keagamaan. Namun, lebih penting dari ini semua, berbagai perkembangan ini makin memperkokoh solidaritas sesama Muslim di Bali ketika mereka sama-sama menghadapi tantangan baru seperti diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Desa Adat yang bisa berakibat buruk bagi kehidupan sehari-hari kaum Muslim di Bali.

Keempat, kelompok perempuan sama sekali belum memperoleh perhatian khusus dari LDII. Ketika diangkat sebagai pengurus, perannya juga hanya mengurus sektor-sektor tertentu yang terkait dengan perempuan, anak, atau kesehatan keluarga. Dengan mengambil kebijakan seperti ini, LDII sebagai organisasi dakwah akan kehilangan kesempatan untuk berkembang lebih pesat lagi, karena para pengurusnya (yang hampir seluruhnya laki-laki) menyalakan sumber daya manusia yang bisa memberi kontribusi besar kepada organisasi.

Akhirnya, hasil penelitian ini tentu saja ada batas-batasnya, karena kami hanya mengandalkan wawancara dengan jumlah narasumber yang terbatas dan observasi sekilas saja. Hasil-hasil temuannya mungkin akan berbeda atau lebih meyakinkan lagi jika kami misalnya melakukan survey yang lebih luas mengenai keberadaan LDII di Bali atau tinggal lebih lama di satu lokasi di mana LDII berada di tingkat lokal. Meskipun demikian, kami percaya bahwa temuan-temuan di atas bisa

dipertanggungjawabkan akurasinya, karena kami sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang tepat untuk penelitian ini, menanyakannya dan mengumpulkan jawabannya dari para narasumber yang tepat, dan menganalisisnya sebaik yang kami mampu.

Hasil-hasil penelitian ini dan masukan yang kami sampaikan, baik implisit maupun eksplisit, kami yakini akan bermanfaat bagi warga LDII di mana saja untuk melangkah lebih maju lagi. Bagi organisasi-organisasi lain di luar LDII, khususnya yang masih dirudung masalah penerimaan pihak-pihak lain, pengalaman LDII di Bali ini akan berguna sebagai bahan pembelajaran untuk keluar dari jeratan itu dan melangkah bersama menyongsong masa depan bersama yang lebih cerah.***

Narasumber Wawancara

Abu Bakar, Ketua Dewan Penasehat LDII Pengurus Cabang Pupuan, 13 April 2022.

Agus Purmadi, Wakil Ketua DPW LDII Provinsi Bali, 10 April 2022.

Desi Puspitasari, Pengurus Bagian Pemberdayaan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga LDII Tabanan, 12 April 2022.

Eko Tugas Pribadi, Staf Sekretariat Dewan Pimpinan MUI Provinsi Bali, 14 April 2022.

Hardilan, Ketua DPD LDII Badung, 10 April 2022.

Maulana Sandijaya, Ketua DPD LDII Tabanan, 10 April 2022 dan 4 Juli 2022.

Mariyono, Wakil Ketua I DPD LDII Tabanan, 10 April 2022.

Mashruhan, Majelis Tarjih PW Muh Bali, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Gianyar, Ketua Komisi Ukhuwah MUI Provinsi Bali, 14 April 2022.

Moh. Kafilari Rohimanto, Wakil Ketua LDII Provinsi Bali, 11 dan 14 April 2022.

Nurhayati, LDII DPW Bali Pengurus Biro Peranan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga, 14 April 2022.

Nyoman Kenak, Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, 12 April 2022.

Olih Solihat Karso, Ketua DPW LDII Bali, 11 dan 14 April 2022, dan 4 Juli 2022.

Prawoto, Kepala Bimas Islam Kemenag Kota Denpasar, 14 April 2022.

Retno Wulansari, Pengurus Bagian Pemberdayaan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga DPD LDII Tabanan, 12 April 2022.

Roichan, Wakil Sekretaris FKUB Provinsi Bali, 13 April 2022.

Rudi Hansen, Ketua DPC LDII Kecamatan Pupuan, 13 April 2022.

Sigit Sunaryanto, Sekretaris Umum (2000-2010) dan Ketua (2010-sekarang) Dewan Pimpinan MUI Provinsi Bali, 12 dan 14 April 2022 dan 4 Juli 2022.

Sugeng Sugianto (IPTU), Kanit 3 Sat Intelkam Polresta Denpasar, 13 April 2022.

Yulian Setiawan, Bendahara DPW LDII Provinsi Bali, 10 April 2022.

Tentang Para Penulis

Ihsan Ali-Fauzi adalah pendiri dan direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta. Sesudah lulus dari Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta, dia mempelajari sejarah Asia Tenggara dan ilmu politik pada Ohio University, Athens, dan Ohio State University, Columbus, keduanya di Amerika Serikat. Minat risetnya sekarang termasuk aspek-aspek sosial dan politik dari Islam di Indonesia, kebebasan beragama dan demokrasi di Indonesia, dan konflik dan binadamai terkait agama di Indonesia. Dia sesekali menulis artikel dan tinjauan buku di majalah dan koran-koran di Indonesia. Di antara karyakaryanya adalah *Disputed Churches in Indonesia* (2011), *Policing Religious Conflicts in Indonesia* (2015), *Basudara Stories of Peace from Maluku* (2017), dan beberapa artikel di jurnal *Studia Islamika* dan *Asian Survey*.

Agidia Oktavia adalah peneliti dan staf komunikasi pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta. Dia menyelesaikan pendidikannya Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semasa kuliah, dia juga aktif di *Jurnal Perempuan*. Dia kini juga tercatat sebagai mediator pada Pusat Mediasi Nasional (PMN), Jakarta.

Husni Mubarak adalah peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina dan pengajar di Universitas Paramadina, Jakarta. Ia menamatkan pendidikan pascasarjana di Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain tercatat sebagai mediator Pusat Mediasi Nasional (PMN) Jakarta, dia juga kini menjadi *lead trainer* untuk pelatihan mediasi untuk pemuka lintas agama. Dia menjadi kontributor dalam beberapa terbitan hasil penelitian, di antaranya, *Memahami dan Menengahi Konflik Keagamaan* (2020), *Kerangka Hukum dan Kelembagaan Tata Kelola Kehidupan Keagamaan di Indonesia* (2021), dan "The Impact of Rising Social Intolerance on Access to Public Services and Civil Liberties in Indonesia" (2023).

Imelda Putri adalah sekretaris dan peneliti pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina. Berbagai pelatihan kesekretariatan dan manajemen pengelolaan organisasi pernah diikutinya. Dia juga terdaftar sebagai mediator bersertifikat dari Pusat Mediasi Nasional (PMN), Jakarta. Dia lulusan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Raditya Darningtyas adalah peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina. Ia meraih gelar sarjana dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Sejak kuliah, ia terlibat dalam penelitian di bidang pelebagaan hak asasi manusia, pengelolaan konflik, dan toleransi. Di antara publikasi terakhirnya adalah artikel berbahasa Inggris berjudul “Religious Freedom and Mediation: Some Notes on Three New Initiatives in Indonesia” (dalam jurnal *Interreligious Studies and Intercultural Theology*, 2023) yang ditulis bersama Ihsan Ali-Fauzi dan laporan studi berjudul “The Impact of Rising Social Intolerance on Access to Public Services and Civil Liberties in Indonesia” (2023).

Siswo Mulyartono adalah peneliti dan koordinator bidang advokasi pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta. Dia lulus dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada 2014 dengan skripsi mengenai mobilisasi anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Banten. Mantan pegiat Forum Mahasiswa Ciptatut ini menulis di *Koran Tempo* dan *Geotimes* dan ikut menulis *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia* (2014) dan *Mengukur Kebebasan Beragama di Jawa Barat* (2016).

Siti Nurhayati adalah peneliti dan manajer HRD pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta. Semasa kuliah ia aktif menjadi peneliti lapangan di Lingkaran Survei Indonesia. Lulusan Sosiologi Agama, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada 2009 ini sempat menjadi asisten dosen untuk mata kuliah statistik di almamaternya dan pernah menjadi asisten peneliti di Pusat pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) dan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai analis data. Trainer Living Values Education (LVE) ini turut menulis *Kontroversi Gereja di Jakarta* (2011) dan *Pendidikan untuk Perubahan* (2015). Dia kini juga tercatat sebagai mediator pada Pusat Mediasi Nasional (PMN), Jakarta.